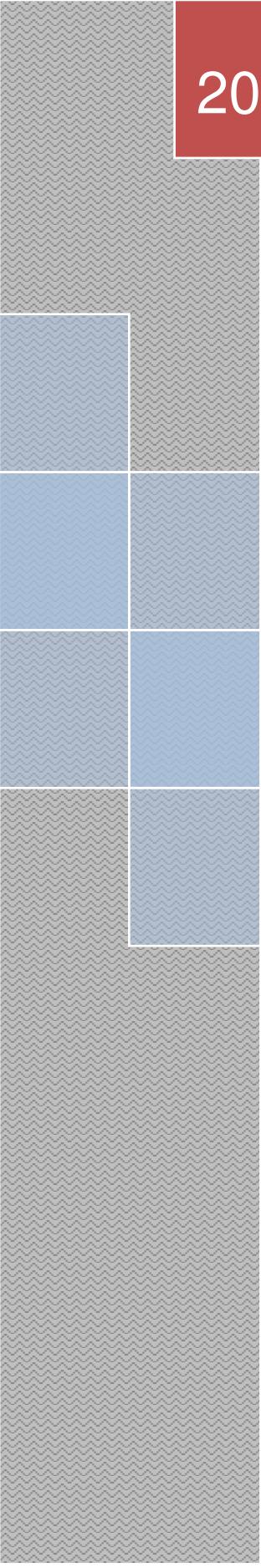




LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN (BA 015) TA 2018 AUDITED





2018

KEMENTERIAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2018

Jl. Wahidin Raya No. 1
Jakarta - 10710



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Keuangan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/05/2016 serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual dan menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat berguna bagi para pengguna laporan dan sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Keuangan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta,

2019

Sekretaris Jenderal



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	5
II. NERACA.....	6
III. LAPORAN OPERASIONAL	8
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	9
A. PENJELASAN UMUM	10
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	40
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	73
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	100
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	118
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	125



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

GEDUNG DJUANDA II LANTAI IV, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR I, JAKARTA 10710, KOTAK POS 3132
TELEPON (021) 3810162; FAKSIMILE (021) 3847442; SITUS www.itjen.kemenkeu.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN BA 015
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015 untuk Tahun Anggaran 2018 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Keuangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 28 Februari 2019

Inspektur Jenderal
Kementerian Keuangan





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 2019
Menteri Keuangan


 Sri Mulyani Indrawati 

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran s.d. 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	1
Tabel 2	Ringkasan Neraca sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	2
Tabel 3	Laporan Operasional per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	3
Tabel 4	Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	3
Tabel 5	Nilai Kinerja Organisasi Tahun Anggaran 2018	21
Tabel 6	Program Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2018	22
Tabel 7	Rekapitulasi Jumlah Satker yang Menyampaikan Laporan Keuangan Menurut Eselon I	23
Tabel 8	Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan TA 2018	40
Tabel 9	Rincian Realisasi Pendapatan Bruto TA 2018	40
Tabel 10	Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto TA 2018 dan TA 2017	41
Tabel 11	Realisasi Pendapatan Neto Per Unit Eselon I TA 2018	41
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Pendapatan Neto Per Unit Eselon I TA 2018 dan TA 2017	42
Tabel 13	Realisasi Pendapatan Neto Per Jenis Penerimaan TA 2018	42
Tabel 14	Perbandingan Realisasi Pendapatan Per Jenis Penerimaan TA 2018 dan TA 2017	42
Tabel 15	Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto TA 2018	43
Tabel 16	Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto per Unit Eselon I TA 2018	43
Tabel 17	Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto Per Unit Eselon I TA 2018 dan TA 2017	44
Tabel 18	Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto Per Jenis Penerimaan TA 2018 dan TA 2017	45
Tabel 19	Realisasi Penerimaan Perpajakan Per Jenis Penerimaan Bruto	45
Tabel 20	Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri Neto TA 2018	46
Tabel 21	Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto TA 2018 dan TA 2017	47
Tabel 22	Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Neto TA 2018	51
Tabel 23	Realisasi Pendapatan dan Pengembalian Pajak Perdagangan Internasional Bruto TA 2018	51
Tabel 24	Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Neto TA 2018 dan TA 2017	52
Tabel 25	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto TA 2018	53
Tabel 26	Realisasi dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2018	53
Tabel 27	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto TA 2018 dan 2017	53
Tabel 28	Rincian Pendapatan PNBP Lainnya Neto TA 2018	55
Tabel 29	Realisasi Pendapatan BLU Neto TA 2018	55
Tabel 30	Perbandingan Realisasi Pendapatan BLU Neto TA 2018 dan TA 2017	55
Tabel 31	Realisasi Pendapatan BLU Neto Berdasarkan Satuan Kerja TA 2018	56
Tabel 32	Realisasi Pendapatan BLU per Jenis Satker per Satker BLU TA 2018	56
Tabel 33	Perbandingan Pagu dan Realisasi Neto Belanja Kementerian Keuangan TA 2018 dan TA 2017 (Termasuk BLU)	57
Tabel 34	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I TA 2018 (Termasuk BLU)	58
Tabel 35	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Satker BLU TA 2018	58
Tabel 36	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I TA 2018 (Non BLU)	59

Tabel 37	Perbandingan Realisasi Belanja Neto Menurut Unit Eselon I TA 2018 dan TA 2017 (Termasuk BLU)	59
Tabel 38	Perbandingan Realisasi Belanja Neto Satker BLU TA 2018 dan TA 2017.....	60
Tabel 39	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2018	60
Tabel 40	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2018 (Termasuk BLU).....	61
Tabel 41	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2018 (Termasuk BLU).....	61
Tabel 42	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Satker BLU Menurut Jenis Belanja TA 2018	61
Tabel 43	Perbandingan Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja (Termasuk BLU) TA 2018 dan TA 2017	63
Tabel 44	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 (Termasuk BLU) ..	63
Tabel 45	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Neto TA 2018 dan TA 2017 (Termasuk BLU)	64
Tabel 46	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Per Eselon I TA 2018 (Termasuk BLU).....	64
Tabel 47	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang TA 2018 (Termasuk BLU) ..	65
Tabel 48	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Neto TA 2018 dan TA 2017 (Termasuk BLU)	66
Tabel 49	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang Per Eselon I TA 2018 (Termasuk BLU)	67
Tabel 50	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Neto Per Eselon I TA 2018 dengan TA 2017 (Termasuk BLU).....	67
Tabel 51	Belanja Barang Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) pada BPDPKS TA 2018 dengan TA 2017 (Termasuk BLU).....	68
Tabel 52	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Modal TA 2018 (Termasuk BLU) ...	69
Tabel 53	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Neto TA 2018 dan TA 2017 (Termasuk BLU)	70
Tabel 54	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Neto Per Eselon I TA 2018 dan TA 2017 (Termasuk BLU)	70
Tabel 55	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Modal TA 2018 (Termasuk BLU) ...	71
Tabel 56	Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	73
Tabel 57	Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	74
Tabel 58	Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	75
Tabel 59	Perbandingan Rincian Kas Lainnya di BLU per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	75
Tabel 60	Perbandingan Kas pada BLU per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 .	75
Tabel 61	Rincian kas pada BLU per unit BLU per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	76
Tabel 62	Perbandingan Rincian Investasi Jangka Pendek BLU per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	76
Tabel 63	Rincian Investasi Jangka Pendek pada BLU per unit BLU per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	76
Tabel 64	Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	77
Tabel 65	Rincian Piutang Pajak Per Jenis per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	78
Tabel 66	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Pajak Perpajakan Per Jenis per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	79

Tabel 67	Rincian Penjelasan Perubahan Status Daluwarsa per 31 Desember 2018.....	79
Tabel 68	Rincian Perubahan Status Daluwarsa per Jenis Pajak per 31 Desember 2018 .	80
Tabel 69	Rincian Nilai Setuju/Tidak Setuju SKBKB/SKPGBT Terbit s.d. 31 Desember 2018	81
Tabel 70	Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 .	82
Tabel 71	Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 .	82
Tabel 72	Rincian Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	83
Tabel 73	Rincian Piutang Operasional BLU per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	83
Tabel 74	Rincian Piutang Operasional BLU bruto per unit BLU per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	84
Tabel 75	Rincian Piutang BLU dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	84
Tabel 76	Rincian Piutang Non Operasional BLU per unit BLU per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	85
Tabel 77	Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	85
Tabel 78	Perbandingan Saldo Menurut LK dan LBNN per 31 Desember 2018	86
Tabel 79	Mutasi/Perubahan Tanah TA 2018.....	87
Tabel 80	Rincian Mutasi Tanah dari Belanja Modal TA 2018	87
Tabel 81	Mutasi/Perubahan Peralatan dan Mesin TA 2018	88
Tabel 82	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal TA 2018	88
Tabel 83	Mutasi/ Perubahan Gedung dan Bangunan TA 2018	89
Tabel 84	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal TA 2018.....	89
Tabel 85	Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018.....	90
Tabel 86	Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal TA 2018.....	90
Tabel 87	Rincian Aset Tetap Lainnya TA 2018	91
Tabel 88	Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya TA 2018	91
Tabel 89	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal TA 2018.....	92
Tabel 90	Mutasi/Perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2018	92
Tabel 91	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2018	93
Tabel 92	Komposisi Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	94
Tabel 93	Komposisi Aset Lainnya Per Jenis Aset Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	95
Tabel 94	Aset Tak Berwujud per Jenis Aset Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	95
Tabel 95	Rincian Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	96
Tabel 96	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	96
Tabel 97	Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	97
Tabel 98	Utang Kepada Pihak Ketiga per Akun Per 31 Desember 2018	97
Tabel 99	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per Akun Per 31 Desember 2018 ..	98
Tabel 100	Perbandingan Pendapatan Operasional Kementerian Keuangan Periode TA 2018 dan TA 2017	100
Tabel 101	Perbandingan Pendapatan Operasional Per Unit Eselon I Periode TA 2018 dan TA 2017	100
Tabel 102	Perbandingan Pendapatan Perpajakan Per Akun Periode TA 2018 dan TA 2017	101
Tabel 103	Perbandingan Pendapatan Perpajakan Per Unit Eselon I Periode TA 2018 dan TA 2017	101

Tabel 104	Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Per Jenis Penerimaan Periode TA 2018 dan TA 2017	102
Tabel 105	Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Per Unit Eselon I Periode TA 2018 dan TA 2017	102
Tabel 106	Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Per Satker BLU Periode TA 2018 dan TA 2017	103
Tabel 107	Rincian Beban Operasional Periode TA 2018 dan TA 2017	104
Tabel 108	Rincian Beban Operasional Per Unit Eselon I Periode TA 2018 dan TA 2017	104
Tabel 109	Rincian Beban Pegawai Per Akun Periode TA 2018 dan TA 2017	105
Tabel 110	Rincian Beban Pegawai per Unit Eselon I Periode TA 2018 dan TA 2017....	105
Tabel 111	Rincian Beban Persediaan Per Akun Periode TA 2018 dan TA 2017	106
Tabel 112	Rincian Beban Persediaan Per Unit Eselon I Periode TA 2018 dan TA 2017 106	
Tabel 113	Rincian Beban Barang dan Jasa Per Akun Periode TA 2018 dan TA 2017 ... 107	
Tabel 114	Rincian Beban Barang dan Jasa Per Unit Eselon I Periode TA 2018 dan TA 2017	107
Tabel 115	Rincian Beban Pemeliharaan Per Akun Periode TA 2018 dan TA 2017	108
Tabel 116	Rincian Beban Pemeliharaan Per Eselon I Periode TA 2018 dan TA 2017 108	
Tabel 117	Rincian Beban Perjalanan Dinas per Akun Periode TA 2018 dan TA 2017 ... 109	
Tabel 118	Rincian Beban Perjalanan Dinas Per Eselon I Periode TA 2018 dan TA 2017 109	
Tabel 119	Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Per Akun Periode TA 2018 dan TA 2017	110
Tabel 120	Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Per Eselon I Periode TA 2018 dan TA 2017	110
Tabel 121	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per Akun Periode TA 2018 dan TA 2017	111
Tabel 122	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per Unit Eselon I Periode TA 2018 dan TA 2017	111
Tabel 123	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per Akun Periode TA 2018 dan TA 2017	112
Tabel 124	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per Unit Eselon I Periode TA 2018 dan TA 2017	112
Tabel 125	Rincian Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar Per Akun Periode TA 2018 dan TA 2017	113
Tabel 126	Rincian Beban Kerugian dari Pelepasan Aset Non Lancar Per Unit Eselon I Periode TA 2018 dan TA 2017	113
Tabel 127	Rincian Beban Kerugian dari Pelepasan Aset Non Lancar Periode TA 2018 dan TA 2017	114
Tabel 128	Rincian Beban Kerugian dari Pelepasan Aset Non Lancar Per Unit Eselon I Periode TA 2018 dan TA 2017	114
Tabel 129	Rincian Pendapatan dari Kegiatan non Operasional Lainnya Periode TA 2018 dan TA 2017	115
Tabel 130	Rincian Pendapatan dari Kegiatan non Operasional Lainnya Per Eselon I Periode TA 2018 dan TA 2017	115
Tabel 131	Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Akun Periode TA 2018 dan TA 2017	116
Tabel 132	Rincian Beban dari Kegiatan non Operasional Lainnya Per Unit Eselon I Periode TA 2018 dan TA 2017	116
Tabel 133	Rincian Ekuitas Awal Per Unit Eselon I Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	118
Tabel 134	Rincian Surplus/ Defisit LO Per Unit Eselon I Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	119
Tabel 135	Rincian Koreksi Nilai Persediaan per Unit Eselon I Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	119

Tabel 136	Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per Unit Eselon I Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	120
Tabel 137	Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per Unit Eselon I Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	121
Tabel 138	Rincian Koreksi Lain-lain Menurut Eselon I Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	122
Tabel 139	Rincian Koreksi Lain-lain pada Ditjen Pajak Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018	122
Tabel 140	Rincian Transaksi Antar Entitas per Akun Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	123
Tabel 141	Rincian Transaksi Antar Entitas per Unit Eselon I Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	124
Tabel 142	Rincian Ekuitas Akhir per Unit Eselon I Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	124
Tabel 143	Rekening Pemerintah Lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2018.....	125
Tabel 144	Rekapitulasi Barang Jaminan Per 31 Desember 2018	126
Tabel 145	Rekapitulasi PHLN Per 31 Desember 2018.....	128
Tabel 146	Daftar Pagu Anggaran Sektor Industri dan Kuasa Pengguna Anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2018	132
Tabel 147	Rincian Data SP3DRI Yang Disampaikan DJBC kepada DJP Tahun 2010 s.d 31 Desember 2018	136
Tabel 148	Realisasi Penyelenggaraan Rangkaian Pertemuan Tahunan IMF – World Bank Tahun 2018.....	139
Tabel 149	Daftar BLU yang Menyusun LK Berbasis SAK dan Telah Diperiksa oleh KAP .	140

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto	40
Grafik 2	Komposisi Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto Per Jenis Penerimaan TA 2018	43
Grafik 3	Komposisi Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto per Unit Eselon I TA 2018...	44
Grafik 4	Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2018.....	46
Grafik 5	Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2018 dan TA 2017	47
Grafik 6	Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto	47
Grafik 7	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto TA 2018 dan TA 2017	54
Grafik 8	Komposisi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto TA 2018	54
Grafik 9	Perbandingan Pagu dan Realisasi Neto Belanja Kementerian Keuangan TA 2018 dan TA 2017 (Termasuk BLU)	57
Grafik 10	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2018 (Termasuk BLU).....	62
Grafik 11	Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2018 (Termasuk BLU)	62
Grafik 12	Komposisi Realisasi Belanja Pegawai TA 2018.....	64
Grafik 13	Komposisi Realisasi Belanja Barang TA 2018.....	66
Grafik 14	Komposisi Belanja Modal TA 2018 (Termasuk BLU)	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Neraca Percobaan
	LRA Belanja
	LRA Pendapatan
	Laporan Barang Milik Negara
	Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap
	Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Perpajakan
	Rekapitulasi Rincian TGR
	Rincian Aset Lancar, Aset Lain dan Kewajiban per Eselon I
	Rincian Kewajiban Jangka Pendek per Eselon I
Lampiran II	Rincian Piutang Pajak
	Laporan Rekening Pemerintah
	Rekapitulasi Piutang Negara
	Rekapitulasi Barang Jaminan
	Berita Acara Rekonsiliasi Hibah
	Matriks Tindak Lanjut Temuan BPK RI

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BLU	: Badan Layanan Umum
BMDTP	: Bea masuk Ditanggung Pemerintah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPDPKS	: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
BUN	: BendaharaUmum Negara
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPPN	: Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
LMAN	: Lembaga Manajemen Aset Negara
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MA	: Mata Anggaran Penerimaan/Pengeluaran
MPN	: Modul Penerimaan Negara
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAU	: Sistem Akuntansi Umum
SAK	: Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
TA	: Tahun Anggaran
TAB	: Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
UP	: Uang Persediaan
TNP	: <i>Treasury Notional Pooling</i>
SETJEN	: Sekretariat Jenderal
ITJEN	: Inspektorat Jenderal

DJA	:	Direktorat Jenderal Anggaran
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJPK	:	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DJPU	:	Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
DJPB	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
BPPK	:	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
BKF	:	Badan Kebijakan Fiskal
PIP	:	Pusat Investasi Pemerintah
STAN	:	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2018 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.539.713.970.066.291,00 atau mencapai 94,32 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.632.479.872.321.277,00. Jumlah tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp1.518.791.948.865.511,00 atau mencapai 93,86 persen dari target yang ditetapkan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp20.922.021.200.780,00 atau mencapai 145,45 persen dari target yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp39.900.468.088.665,00 atau mencapai 84,92 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp46.987.862.720.000,00. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp20.361.276.169.469,00 atau 97,38 persen dari anggarannya, Belanja Barang sebesar Rp17.744.369.417.285,00 atau 74,69 persen dari anggarannya dan Belanja Modal sebesar Rp1.794.822.501.911,00 atau 77,29 persen dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran s.d. 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	1.632.479.872.321.277	1.539.713.970.066.291	1.485.841.788.636.969	1.362.039.244.724.371
Penerimaan Perpajakan	1.618.095.493.162.000	1.518.791.948.865.511	1.472.709.861.674.975	1.343.529.642.786.441
PNBP	14.384.379.159.277	20.922.021.200.780	13.131.926.961.994	18.509.601.937.930
Hibah	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	1.632.479.872.321.277	1.539.713.970.066.291	1.485.841.788.636.969	1.362.039.244.724.371
BELANJA NEGARA	46.987.862.720.000	39.900.468.088.665	42.952.412.288.000	40.384.903.626.906
Belanja Pegawai	20.908.396.593.000	20.361.276.169.469	17.941.906.376.000	17.284.051.723.036
Belanja Barang	23.757.374.945.000	17.744.369.417.285	23.710.302.621.000	21.960.137.442.737
Belanja Modal	2.322.091.182.000	1.794.822.501.911	1.300.203.291.000	1.140.714.461.133
JUMLAH BELANJA	46.987.862.720.000	39.900.468.088.665	42.952.412.288.000	40.384.903.626.906

B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Nilai Aset sampai dengan 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar **Rp98.762.394.579.477,00** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp64.144.482.579.394,00**; Aset Tetap (neto) sebesar **Rp34.102.797.111.343,00**; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar **Rp278.418.524,00**; dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp514.836.470.216,00**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp25.247.726.225.714,00** dan **Rp73.514.668.353.763,00**.

Ringkasan Neraca sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2
Ringkasan Neraca sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 DESEMBER 2018 (Rp)	31 DESEMBER 2017 (Rp)	(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	64.144.482.579.394	43.024.840.981.282	21.119.641.598.112	49,09
Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-
Aset Tetap	34.102.797.111.343	34.180.799.991.722	(78.002.880.379)	(0,23)
Piutang Jangka Panjang	278.418.524	403.273.129	(124.854.605)	(30,96)
Aset Lainnya	514.836.470.216	414.295.541.672	100.540.928.544	24,27
Jumlah Aset	98.762.394.579.477	77.620.339.787.805	21.142.054.791.672	27,24
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	25.247.726.225.714	19.053.902.192.422	6.193.824.033.292	32,51
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban	25.247.726.225.714	19.053.902.192.422	6.193.824.033.292	32,51
Ekuitas				
Ekuitas	73.514.668.353.763	58.566.437.595.383	14.948.230.758.380	25,52
Jumlah Ekuitas	73.514.668.353.763	58.566.437.595.383	14.948.230.758.380	25,52
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	98.762.394.579.477	77.620.339.787.805	21.142.054.791.672	27,24

C. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp1.521.657.589.406.736,00** sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar **Rp48.384.485.610.750,00** sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai **Rp1.473.273.103.795.986,00**. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar **Rp142.605.139.099,00** dan **Rp0,00** sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar **Rp1.473.415.708.935.085,00**.

Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3
Laporan Operasional per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Tanggal LO		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)	(Rp)	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
Pendapatan Operasional	1.521.657.589.406.736	1.381.488.405.363.138	140.169.184.043.598	10,15
Pendapatan Perpajakan	1.500.170.160.060.551	1.363.088.775.091.140	137.081.384.969.411	10,06
PNBP	21.487.429.346.185	18.399.630.271.998	3.087.799.074.187	16,78
Beban Operasional	48.384.485.610.750	62.454.086.093.838	(14.069.600.483.088)	(22,53)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	1.473.273.103.795.986	1.319.034.319.269.300	154.238.784.526.686	11,69
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(13.602.319.294)	3.433.465.743	(17.035.785.037)	(496,17)
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	156.207.458.393	8.328.887.478	147.878.570.915	1775,49
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	142.605.139.099	11.762.353.221	130.842.785.878	1112,39
POS LUAR BIASA	-	-	-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO	1.473.415.708.935.085	1.319.046.081.622.521	154.369.627.312.564	11,70

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp58.566.437.595.383,00 ditambah Surplus-LO sebesar Rp1.473.415.708.935.085,00 kemudian ditambah dengan koreksi sebesar Rp29.882.528.876.262,00 dan transaksi antar entitas sebesar Rp(1.488.350.007.052.967,00) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp73.514.668.353.763,00.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4
Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Tanggal LPE		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)	(Rp)	%
EKUITAS AWAL				
EKUITAS AWAL	58.566.437.595.383	53.903.725.923.605	4.662.711.671.778	8,65
Surplus (Defisit) LO	1.473.415.708.935.085	1.319.046.081.622.521	154.369.627.312.564	11,70
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	-	-	-	-
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	29.882.528.876.262	225.062.903.875	29.657.465.972.387	13.177,41
Transaksi Antar Entitas	(1.488.350.007.052.967)	(1.314.608.432.854.618)	(173.741.574.198.349)	13,22
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	14.948.230.758.380	4.662.711.671.778	10.285.519.086.602	220,59
EKUITAS AKHIR	73.514.668.353.763	58.566.437.595.383	14.948.230.758.380	25,52

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I.LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018			(dalam rupiah)	
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	31 DESEMBER 2017	
A PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1					
1 PENERIMAAN DALAM NEGERI	B.1.1	1.632.479.872.321.277	1.539.713.970.066.291	94,32	1.362.039.244.724.371	
a Penerimaan Perpajakan	B.1.1.1	1.618.095.493.162.000	1.518.791.948.865.511	93,86	1.343.529.642.786.441	
i. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	B.1.1.1.1	1.579.395.493.162.000	1.472.910.754.750.063	93,26	1.304.316.213.666.970	
ii. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	B.1.1.1.2	38.700.000.000.000	45.881.194.115.448	118,56	39.213.429.119.471	
b Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1.2	14.384.379.159.277	20.922.021.200.780	145,45	18.509.601.937.930	
i. Pendapatan PNBP Lainnya	B.1.1.2.1	457.238.785.277	715.540.677.351	156,49	658.961.384.005	
ii. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	B.1.1.2.2.	13.927.140.374.000	20.206.480.523.429	145,09	17.850.640.553.925	
2 HIBAH	B.1.2	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		1.632.479.872.321.277	1.539.713.970.066.291	94,32	1.362.039.244.724.371	
B. BELANJA	B.2					
<i>Belanja Operasi</i>						
1 Belanja Pegawai	B.3	20.908.396.593.000	20.361.276.169.469	97,38	17.284.051.723.036	
2 Belanja Barang	B.4	23.757.374.945.000	17.744.369.417.285	74,69	21.960.137.442.737	
<i>Jumlah Belanja Operasi</i>		44.665.771.538.000	38.105.645.586.754	85,31	39.244.189.165.773	
<i>Belanja Modal</i>	B.5					
1 Belanja Modal Tanah	B.5.1	27.452.334.000	25.715.168.720	93,67	1.484.523.550	
2 Belanja Peralatan dan Mesin	B.5.2	1.151.888.470.000	1.098.483.657.722	95,36	709.908.410.177	
3 Belanja Gedung dan Bangunan	B.5.3	506.696.452.000	470.227.244.191	92,80	329.391.630.498	
4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	B.5.4	6.483.019.000	6.371.710.110	98,28	7.948.275.833	
5 Belanja Modal Lainnya	B.5.5	596.286.705.000	183.828.086.728	30,83	81.013.182.902	
6 Belanja Modal BLU	B.5.6	33.284.202.000	10.196.634.440	30,64	10.968.438.173	
<i>Jumlah Belanja Modal</i>		2.322.091.182.000	1.794.822.501.911	77,29	1.140.714.461.133	
JUMLAH BELANJA		46.987.862.720.000	39.900.468.088.665	84,92	40.384.903.626.906	

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

No	URAIAN	2018				2017			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
	Penerimaan Perpajakan	1.618.095.493.162,000	1.518.791.948.865.511	(99.303.544.296.489)	93,86	1.472.709.861.674.975	1.343.529.642.786.441	(129.180.218.888.534)	91,23
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	14.384.379.159,277	20.922.021.200,780	6.537.642.041,503	145,45	13.131.926.981,994	18.509.601.937,930	5.377.674.975,936	140,95
	Penerimaan Hibah	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	1.632.479.872.321,277	1.539.713.970.066,291	(92.765.902.254,986)	94,32	1.485.841.788.636,969	1.362.039.244.724,371	(123.802.543.912,598)	91,67
B	BELANJA NEGARA								
	Belanja Pegawai	20.908.396.593,000	20.361.276.169,469	(547.120.423,531)	97,38	17.941.906.376,000	17.284.051.723,036	(657.854.652,964)	96,33
	Belanja Barang	23.757.374.945,000	17.744.369.417,285	(6.013.005.527,715)	74,69	23.710.302.621,000	21.960.137.442,737	(1.750.165.178,263)	92,62
	Belanja Modal	2.322.091.182,000	1.794.822.501,911	(527.268.680,089)	77,29	1.300.203.291,000	1.140.714.461,133	(159.488.829,867)	87,73
	Belanja Pembayaran Bunga Kewajiban	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
	Belanja Subsidi	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
	Belanja Hibah	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
	Belanja Lain-lain	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
	JUMLAH BELANJA	46.987.862.720,000	39.900.468.088,665	(7.087.394.631,335)	84,92	42.952.412.288,000	40.384.903.626,906	(2.567.508.661,094)	94,02
C	PEMBIAYAAN								
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-

Jakarta

Sekretaris Jenderal

Hadiyanto
Hadiyanto

NIP. 196210101987031006



II.NERACA

**KEMENTERIAN KEUANGAN
NERACA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	2.313.040.226	2.533.211.245
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	3.658.057.948	6.330.715.641
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	363.024.058.349	471.927.362.187
Kas pada Badan Layanan Umum	C.1.4	22.717.545.215.069	5.098.913.847.342
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	C.1.5	2.592.473.339.265	8.730.956.109.060
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.6	403.999.653.767	436.912.535.114
Uang Muka Belanja	C.1.7	3.191.963.782	3.251.678.938
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.8	547.460.256.932	265.793.509.448
Piutang Perpajakan	C.1.9	81.477.055.227.031	58.621.958.896.480
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.1.9	(44.487.442.867.354)	(31.049.525.040.498)
Piutang Perpajakan (Netto)		36.989.612.359.677	27.572.433.855.982
Piutang Bukan Pajak	C.1.10	106.065.442.231	55.583.122.513
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.10	(45.572.869.279)	(45.673.329.718)
Piutang Bukan Pajak (Netto)		60.492.572.952	9.909.792.795
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.11	239.190.122	327.629.565
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.11	(1.195.951)	(1.638.147)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		237.994.171	325.991.418
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.1.12	93.149.342.874	49.824.275.493
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.1.12	(1.297.908.067)	(936.602.732)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)		91.851.434.807	48.887.672.761
Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	C.1.13	547.339.240	467.335.113
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.1.13	(467.735.133)	(467.335.113)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)		79.604.107	-
Persediaan	C.1.14	368.543.028.343	376.664.699.351
JUMLAH ASET LANCAR		64.144.482.579.394	43.024.840.981.282
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	19.436.535.504.094	19.349.423.511.784
Peralatan dan Mesin	C.2.2	14.107.977.235.913	13.627.399.300.896

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2018 Audited

Gedung dan Bangunan	C.2.3	14.544.545.225.457	14.271.267.493.102
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	492.466.667.314	496.240.136.223
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	51.089.377.176	55.953.215.349
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	278.968.308.402	206.417.421.601
Akumulasi Penyusutan	C.2.7	(14.808.785.207.013)	(13.825.901.087.233)
JUMLAH ASET TETAP		34.102.797.111.343	34.180.799.991.722
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	12.051.328.428	11.935.622.280
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.2	(11.772.909.904)	(11.532.349.151)
Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (<i>Netto</i>)	C.3.3	278.418.524	403.273.129
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		278.418.524	403.273.129
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	1.370.630.220.833	1.202.236.914.878
Aset Lain-lain	C.4.2	1.139.813.993.517	865.287.703.248
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	(1.995.607.744.134)	(1.653.229.076.454)
JUMLAH ASET LAINNYA		514.836.470.216	414.295.541.672
JUMLAH ASET		98.762.394.579.477	77.620.339.787.805
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	472.206.297.236	1.486.741.001.607
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5.2	117.500.000	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.5.3	24.681.785.707.564	17.295.682.218.033
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.4	88.730.205.183	267.311.529.885
Uang Muka dari KPPN	C.5.5	2.313.040.226	2.533.211.245
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.6	2.573.475.505	1.634.231.652
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		25.247.726.225.714	19.053.902.192.422
JUMLAH KEWAJIBAN		25.247.726.225.714	19.053.902.192.422
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	73.514.668.353.763	58.566.437.595.383
JUMLAH EKUITAS		73.514.668.353.763	58.566.437.595.383
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		98.762.394.579.477	77.620.339.787.805

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2018	2017	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	2,313,040,226	2,533,211,245	(220,171,019)	(8.69)
Kas di Bendahara Penerimaan	3,658,057,948	6,330,715,641	(2,672,657,693)	(42.22)
Kas Lainnya dan Setara Kas	363,024,058,349	471,927,362,187	(108,903,303,838)	(23.08)
Kas pada Badan Layanan Umum	22,717,545,215,069	5,098,913,847,342	17,618,631,367,727	345.54
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	2,592,473,339,265	8,730,956,109,060	(6,138,482,769,795)	(70.31)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	403,999,653,767	436,912,535,114	(32,912,881,347)	(7.53)
Uang Muka Belanja (prepayment)	3,191,963,782	3,251,678,938	(59,715,156)	(1.84)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	547,460,256,932	265,793,509,448	281,666,747,484	105.97
Piutang Perpajakan	81,477,055,227,031	58,621,958,896,480	22,855,096,330,551	38.99
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	(44,487,442,867,354)	(31,049,525,040,498)	(13,437,917,826,856)	43.28
Piutang Perpajakan (Netto)	36,989,612,359,677	27,572,433,855,982	9,417,178,503,695	34.15
Piutang Bukan Pajak	106,065,442,231	55,583,122,513	50,482,319,718	90.82
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(45,572,889,279)	(45,873,329,718)	100,460,439	(0.22)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	60,492,572,952	9,909,792,795	50,582,780,157	510.43
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	239,190,122	327,629,565	(88,439,443)	(26.99)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(1,195,951)	(1,638,147)	442,196	(26.99)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	237,994,171	325,991,418	(87,997,247)	(26.99)
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	93,149,342,874	49,824,275,493	43,325,067,381	86.96
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(1,297,908,067)	(936,602,732)	(361,305,335)	38.58
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)	91,851,434,807	48,887,672,761	42,963,762,046	87.88
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	547,339,240	467,335,113	80,004,127	17.12
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(467,735,133)	(467,335,113)	(400,020)	0.09
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)	79,604,107	-	79,604,107	0.00
Persediaan	368,543,028,343	376,664,699,351	(8,121,671,008)	(2.16)
JUMLAH ASET LANCAR	64,144,482,579,394	43,024,840,981,282	21,119,641,598,112	49.09
ASET TETAP				
Tanah	19,436,535,504,094	19,349,423,511,784	87,111,992,310	0.45
Peralatan dan Mesin	14,107,977,235,913	13,627,399,300,896	480,577,935,017	3.53
Gedung dan Bangunan	14,544,545,225,457	14,271,267,493,102	273,277,732,355	1.91
Jalan, Irigasi dan Jaringan	492,466,867,314	496,240,135,223	(3,773,468,909)	(0.76)
Aset Tetap Lainnya	51,089,377,176	55,953,215,349	(4,863,838,173)	(8.69)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	278,968,308,402	206,417,421,601	72,550,886,801	35.15
Akumulasi Penyusutan	(14,808,785,207,013)	(13,825,901,087,233)	(982,884,119,780)	7.11
JUMLAH ASET TETAP	34,102,797,111,343	34,180,798,991,722	(78,002,880,379)	(0.23)
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	12,051,328,428	11,935,622,280	115,706,148	0.97
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(11,772,909,904)	(11,532,349,151)	(240,560,753)	2.09
Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	278,418,524	403,273,129	(124,854,605)	(30.96)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	278,418,524	403,273,129	(124,854,605)	(30.96)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,370,630,220,833	1,202,236,914,878	168,393,305,955	14.01
Aset Lain-Lain	1,139,813,993,517	865,287,703,248	274,526,290,269	31.73
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(1,995,607,744,134)	(1,653,229,076,454)	(342,378,667,680)	20.71
JUMLAH ASET LAINNYA	514,836,470,216	414,295,541,672	100,540,928,544	24.27

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2018	2017	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH ASET	98,762,394,579,477	77,620,339,787,805	21,142,054,791,672	27.24
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	472,206,297,236	1,486,741,001,607	(1,014,534,704,371)	(68.24)
Utang Yang Belum Ditagihkan	117,500,000	-	117,500,000	0.00
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	24,681,785,707,564	17,295,682,218,033	7,386,103,489,531	42.70
Pendapatan Diterima Dlmuka	88,730,205,183	267,311,529,885	(178,581,324,702)	(66.81)
Uang Muka dari KPPN	2,313,040,226	2,533,211,245	(220,171,019)	(8.69)
Utang Jangka Pendek Lainnya	2,573,475,505	1,634,231,652	939,243,853	57.47
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	25,247,726,225,714	19,053,902,192,422	6,193,824,033,292	32.51
JUMLAH KEWAJIBAN	25,247,726,225,714	19,053,902,192,422	6,193,824,033,292	32.51
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	73,514,668,353,763	58,566,437,595,383	14,948,230,758,380	25.52
JUMLAH EKUITAS	73,514,668,353,763	58,566,437,595,383	14,948,230,758,380	25.52
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	98,762,394,579,477	77,620,339,787,805	21,142,054,791,672	27.24

Jakarta,
Sekretaris Jenderal,

Hadiyanto *[Signature]*
NIP. 196210101987031006



III.LAPORAN OPERASIONAL

**KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN		D.1		
Pendapatan Pajak		D.1.1	1.500.170.160.060.551	1.363.088.775.091.140
Pendapatan Negara Bukan Pajak		D.1.2	21.487.429.346.185	18.399.630.271.998
JUMLAH PENDAPATAN			1.521.657.589.406.736	1.381.488.405.363.138
BEBAN		D.2		
Beban Pegawai		D.2.1	20.455.990.236.598	17.349.699.254.266
Beban Persediaan		D.2.2	402.192.660.657	374.600.258.261
Beban Barang dan Jasa		D.2.3	12.932.743.025.323	18.545.831.763.959
Beban Pemeliharaan		D.2.4	1.245.505.584.295	1.243.607.606.014
Beban Perjalanan Dinas		D.2.5	1.760.282.211.778	1.626.381.716.763
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		D.2.6	453.463.604.095	465.338.954.744
Beban Penyusutan dan Amortisasi		D.2.7	1.653.119.744.914	1.591.499.698.350
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		D.2.8	9.481.188.543.090	21.257.126.841.481
JUMLAH BEBAN			48.384.485.610.750	62.454.086.093.838
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		D.3	1.473.273.103.795.986	1.319.034.319.269.300
KEGIATAN NON OPERASIONAL			-	-
Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		D.4	(13.602.319.294)	3.433.465.743
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		D.5	156.207.458.393	8.328.887.478
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		D.6	142.605.139.099	11.762.353.221
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa			-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA			-	-
SURPLUS/ (DEFISIT) LO		D.7	1.473.415.708.935.085	1.319.046.081.622.521

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	% 5
	2018 1	2017 2		
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	731,838,117,941,363	662,417,200,360,162	69,420,917,561,201	10,48
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	526,856,640,020,385	479,591,110,489,748	47,265,529,530,637	9,86
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	20,136,546,791,758	17,128,469,834,287	3,008,076,957,471	17,56
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	1,216,911,547	(1,216,911,547)	(100,00)
Pendapatan Cukai	168,411,747,414,517	153,285,335,416,261	15,125,411,998,256	9,87
Pendapatan Pajak Lainnya	6,796,688,674,946	11,065,264,993,893	(4,268,576,318,947)	(38,58)
Pendapatan Bea Masuk	39,464,702,540,677	35,054,329,773,200	4,410,372,767,477	12,58
Pendapatan Bea Keluar	6,665,716,676,905	4,544,847,292,042	2,120,869,384,863	46,67
Jumlah Pendapatan Perpajakan	1.500.170.160.000.551	1.363.088.775.091.140	137.081.384.969.411	10,08
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-	0,00
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	-	-	-	0,00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	21,487,429,346,185	18,399,630,271,998	3,087,799,074,187	16,78
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	21.487.429.346.185	18.399.630.271.998	3.087.799.074.187	10,70
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	-	-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah	-	-	-	0,00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	1.521.657.589.406.736	1.381.488.405.363.138	140.189.184.043.598	10,15
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	20,455,990,236,598	17,349,699,254,266	3,106,290,982,332	17,90
Beban Persediaan	402,192,680,657	374,600,258,261	27,592,402,396	7,37
Beban Barang dan Jasa	12,932,743,025,323	18,545,831,783,959	(5,613,088,738,636)	(30,27)
Beban Pemeliharaan	1,245,505,584,295	1,243,607,606,014	1,897,978,281	0,15
Beban Perjalanan Dinas	1,760,282,211,778	1,626,381,716,763	133,900,495,015	8,23
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	453,463,604,095	485,336,954,744	(11,875,350,649)	(2,55)
Beban Bunga	-	-	-	0,00
Beban Subsidi	-	-	-	0,00
Beban Hibah	-	-	-	0,00
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,653,119,744,914	1,591,409,698,350	61,620,046,564	3,87
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	9,481,188,543,090	21,257,126,841,481	(11,775,938,288,391)	(55,40)
Beban Transfer	-	-	-	0,00
Beban Lain-Lain	-	-	-	0,00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	48,384,485,610,760	62,454,086,093,838	(14,069,600,483,088)	(22,63)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	1.473.273.103.795.988	1.319.034.319.369.300	154.238.784.520.688	11,69
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	25,893,211,740	31,125,031,804	(5,231,820,064)	(16,81)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	39,495,531,034	27,601,566,061	11,803,964,973	42,63
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(13,602,319,284)	3,433,465,743	(17,035,785,037)	(496,17)
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA**
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2018	2017	Jumlah	%
1	2	3	4	5
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	270,541,832,125	180,507,314,796	90,034,517,330	49.88
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	114,334,373,733	172,178,427,318	(57,844,053,585)	(33.60)
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	156,207,458,393	8,328,887,478	147,878,570,915	1,775.49
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	142,605,139,098	11,762,353,221	130,842,786,878	1,112.39
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	1.473.415.708.935.095	1.319.046.081.622.521	154,369,627,312,564	11.70
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	-	-	-	-
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	1.473.415.708.935.095	1.319.046.081.622.521	154,369,627,312,564	11.70

Jakarta

Sekretaris Jenderal

Hadiyanto
NIP. 196210101987031006



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
EKUITAS AWAL	E.1	58.566.437.595.383	53.903.725.923.605
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	1.473.415.708.935.085	1.319.046.081.622.521
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		29.882.528.876.262	225.062.903.875
PENYESUAIAN NILAI ASET			-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	18.577.099	1.092.429.501
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4		-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.5	(24.609.806.951)	203.454.580.356
LAIN-LAIN	E.6	29.907.120.106.114	20.515.894.018
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.7	(1.488.350.007.052.967)	(1.314.608.432.854.618)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		14.948.230.758.380	4.662.711.671.778
EKUITAS AKHIR	E.8	73.514.668.353.763	58.566.437.595.383

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2018	2017	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	58,566,437,595,383	53,903,725,923,605	4,662,711,671,778	8.65
SURPLUS/DEFISIT - LO	1.473.415.708.936.085	1.319.046.081.622.521	154.369.627.312.564	11.70
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI				
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	29,882,528,876,262	226,062,903,875	29,657,465,972,387	13.177.41
Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	18,577,099	1,092,429,501	(1,073,852,402)	(98.30)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(24,609,806,951)	203,454,580,356	(228,064,387,307)	(112.10)
Lain-lain	29,907,120,106,114	20,515,894,018	29,886,604,212,096	145.675.37
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(1.488.350.007.052.967)	(1.314.608.432.854.618)	(173.741.674.198.349)	13.22
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	14,948,230,758,380	4,662,711,671,778	10,285,519,086,602	220.59
EKUITAS AKHIR	73,514,668,353,763	58,566,437,595,383	14,948,230,758,380	26.52

Jakarta,
Sekretaris Jenderal,



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

*Dasar
Hukum
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (4) menetapkan bahwa Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa Pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan bahwa Laporan Keuangan (*Audited*) disusun berdasarkan Laporan Keuangan (*Unaudited*) yang telah dikoreksi atau disesuaikan menurut hasil pemeriksaan BPK;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
8. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Keuangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;
19. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pungutan-Pungutan Lainnya terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
21. Instruksi Presiden RI Nomor 12 tahun 1975 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Karya, Kontrak *Production Sharing* dan kegiatan Pertamina sendiri;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.010/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara dalam Rangka Ekspor, Penerimaan atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang berasal dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.04/2013;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja pada Kategori Usaha Tertentu sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2009;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.06/2015;

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2010 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2012;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan BLU BPDPKS pada Kementerian Keuangan;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara;
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.01/2015 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018;
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;

42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (*Reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja;
51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;
52. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/ PMK.02/ 2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018;
53. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pungutan-Pungutan Lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
54. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
55. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
56. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas

Pemerintah Pusat;

57. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1319/KMK.05/2015 tentang Penetapan Lembaga Manajemen Aset Negara sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
58. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 962/KMK.05/2017 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tahap III;
59. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
60. Instruksi Menteri Keuangan Nomor 955/IMK.05/2017 tentang Dukungan Implementasi *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Lingkungan Kementerian Keuangan;
61. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 29/MK.01/2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SAKTI; dan
62. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 30/MK.01/2018 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan, Piutang, dan Utang Berbasis Akrual Lingkup Kementerian Keuangan (BA 015).

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Keuangan

A.2.1. Profil Kementerian Keuangan

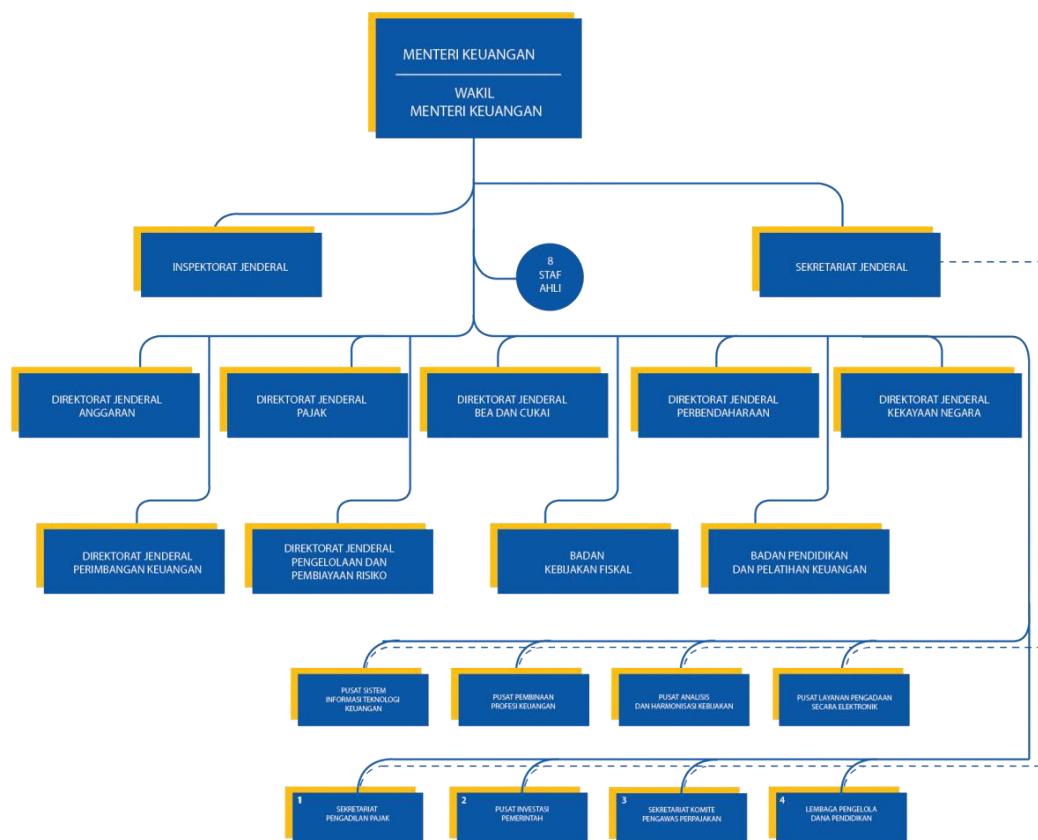
*Profil dan
Kebijakan
Teknis
Kementerian
Keuangan*

Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan mempunyai tugas yang sangat strategis dalam pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini karena Kementerian Keuangan merupakan pengelola fiskal yang berwenang dalam penyusunan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro seperti penganggaran dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan dan cukai, pertambahan, pengelolaan kekayaan Negara, perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta pengelolaan pembiayaan dan risiko.

Dalam melaksanakan peran strategis seperti diuraikan di atas, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Keuangan mempunyai fungsi: (a) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, pertambahan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan risiko; (b) perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan; (c) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan; (d) pengelolaan barang milik/kekayaan negara; (e) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; (f) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah; (g) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; (h) pelaksanaan

pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan (i) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan dibantu oleh Wakil Menteri Keuangan, 11 (sebelas) Unit Eselon I, 8 (delapan) staf ahli, dan 4 (empat) Pusat. Selain itu, untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian Keuangan telah dibentuk Sekretariat Pengadilan Pajak, Pusat Investasi Pemerintah, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Bagan struktur organisasi Kementerian Keuangan dapat dilihat dalam gambar berikut:



Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
 1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/1/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak
 2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
 3. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2010 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan
 4. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Berikut ini domisili Kementerian Keuangan dan masing-masing unit Eselon I dibawahnya.

1. Kementerian Keuangan
Gd. Djuanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
2. Sekretariat Jenderal
Gd. Djuanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
3. Direktorat Jenderal Anggaran
Gd. Sutikno Slamet, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
4. Direktorat Jenderal Pajak
Gd. Utama, Jl. Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Achmad Yani By Pass, Rawamangun, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

6. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Gd. Prijadi Praptosuhardjo I, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
7. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Gd. Syafrudin Prawiranegara, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
8. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Gd. Radius Prawiro, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
9. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Gd. Frans Seda, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
10. Inspektorat Jenderal
Gd. Djuanda II, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
11. Badan Kebijakan Fiskal
Gd. R.M. Notohamiprodjo, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
12. Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan
Jl. Purnawarman No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

A.2.2. Visi Kementerian Keuangan

Visi Kementerian Keuangan untuk tahun 2015-2019 adalah '**Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21**'.

Dalam visi yang baru, penggerak utama berarti bahwa Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai *prime mover* dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif, Kementerian Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara menyongsong masa depan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan fiskal yang efektif.

Menekankan abad ke-21 sebagai periode waktu menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan di dunia modern, dengan menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses yang modern guna mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan.

Dengan visi baru ini, Kementerian Keuangan dengan sepenuh hati memegang peranan pentingnya dalam menentukan perkembangan negara. Kementerian Keuangan juga memperbarui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik.

A.2.3. Misi Kementerian Keuangan

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang *prudent*;
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
5. Menarik dan mempertahankan *talent* terbaik di kelasnya dengan menawarkan proporsi nilai pegawai yang kompetitif.

A.2.4. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Dalam visi yang baru, penggerak utama berarti bahwa Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai *prime mover* dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif, Kementerian Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara menyongsong masa depan.

Dalam mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, dan mendukung peningkatan kinerja institusi Kementerian Keuangan yang akan menjadi dasar dan pondasi bagi institusi Kementerian Keuangan, pimpinan dan seluruh pegawai dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap, Menteri Keuangan telah menerbitkan Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang meliputi:

1. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:

- a. Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya;
- b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

2. Profesionalisme

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas;
- b. Bekerja dengan hati.

3. Sinergi

Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

- a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati;
- b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

4. Pelayanan

Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

- a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
- b. Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

5. Kesempurnaan

Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan terus menerus;
- b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

A.2.5. Tujuan Kementerian Keuangan

Kebijakan fiskal yang tercermin dalam alokasi pendapatan dan belanja pemerintah dalam APBN memiliki pengaruh yang besar terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud.

Kebijakan fiskal pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi reindustrialisasi dalam transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja Negara serta optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang dan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara.

Tujuan Kementerian Keuangan pada tahun 2015-2019 adalah:

1. Terjaganya kesinambungan fiskal;
2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai;
3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara;
4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran;
6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan;
7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.

A.2.6. Sasaran Strategis Kementerian Keuangan

Dalam rangka mendukung pencapaian 7 tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian Keuangan telah menetapkan 16 sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2019:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan terjaganya kesinambungan fiskal adalah :
 - a. Meningkatnya tax ratio;
 - b. Terjaganya rasio utang pemerintah;
 - c. Terjaganya defisit anggaran.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai adalah:
 - a. Penerimaan pajak negara yang optimal;
 - b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal;
 - c. Percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance*) untuk mendukung upaya penurunan rata-rata *dwelling time*.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara adalah Sistem pelayanan PNBP yang optimal.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah adalah:
 - a. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas;
 - b. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan.

5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
 - b. Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal.
6. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan adalah optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi *community protection* serta melaksanakan fungsi sebagai *border management*.
7. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:
 - a. Organisasi yang *fit for purpose*;
 - b. SDM yang kompetitif;
 - c. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi;
 - d. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian.

A.2.7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kementerian Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN Tahun Anggaran 2018 diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

A.2.8. Nilai Kinerja Organisasi

Pada Tahun 2018, dari 33 IKU terdapat 30 IKU berstatus hijau, 2 IKU berstatus kuning dan 1 IKU berstatus merah dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5
Nilai Kinerja Organisasi Tahun Anggaran 2018

KODE SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Indek
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (-)				107,10
1	Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan guna mendukung masyarakat adil dan makmur			101,70
1a	Rasio Defisit APBN terhadap PDB	-2,19%	-1,76%	119,63
1b	Rasio keseimbangan primer terhadap PDB	-0,59%	-0,01%	120,00
1c	Rasio utang terhadap PDB	28,83%	29,98%	96,00
1d	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	10,90%	10,32%	94,68
1e	Indeks pemerataan kemampuan keuangan antar daerah	0,58	0,55	105,17
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)				105,49
2	Pemenuhan layanan publik yang prima			94,56
2a	Indeks kepuasan publik atas layanan Kemenkeu	4,35	4,41	101,38
2b	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,87	0,57	120,00
2c	<i>Dwelling time</i>	2,9	3,82	68,28
3	Kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan negara yang tinggi			116,41
3a	Rata-rata persentase kepatuhan atas aturan perpajakan	67,50%	78,58%	116,41
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (40%)				114,40
4	Formulasi kebijakan fiskal yang berkualitas			120,00
4a	Deviasi proyeksi indikator ekonomi makro	3,00%	1,23%	120,00
4b	Deviasi exercise <i>I-account</i>	3,00%	0,85%	120,00
5	Kerjasama ekonomi dan keuangan internasional yang optimal			117,65
5a	Persentase pemanfaatan hasil kerja sama ekonomi dan keuangan internasional di bidang keuangan	85,00%	100,00%	117,65
6	Penerimaan, belanja, dan transfer yang optimal			106,20
6a	Persentase penerimaan negara (pajak, bea & cukai, dan PNBP)	100,00%	101,98%	101,98
6b	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga	80,00%	87,81%	109,76
6c	Persentase belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan dana desa untuk kemiskinan terhadap Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)	75,00%	80,01%	106,68
7	Pengelolaan kas, kekayaan negara, dan pembiayaan yang optimal			114,45
7a	Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat	5,00%	1,22%	120,00
7b	Rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap	85,00%	87,30%	102,71
7c	Persentase pengadaan utang dengan biaya yang terkendali	100,00%	119,01%	119,01
8	Pengendalian mutu yang efektif			115,85
8a	Indeks opini BPK RI atas LKPP	4	4	120,00
8b	Indeks opini BPK RI atas LK BUN	4	4	120,00
8c	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89,00%	94,39%	106,06
9	Penegakan hukum yang efektif			112,25
9a	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	65,00%	99,75%	120,00
9b	Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Audit	81,20%	84,85%	104,50
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (40%)				111,17
10	SDM yang kompetitif			111,00
10a	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	94,00%	95,88%	102,00
10b	Persentase Alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	70,00%	91,53%	120,00
11	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>			108,36
11a	Persentase implementasi inisiatif RBTK	92,00%	98,00%	106,52
11b	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100,00%	115,05%	115,05
11c	Indeks Persepsi Integritas	85	87,65	103,12
12	Sistem manajemen informasi yang andal			117,24
12a	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,35%	0,0106%	120,00
12b	Persentase kapabilitas tata kelola TIK	75,00%	85,30%	113,73
13	Pengelolaan anggaran yang berkualitas			108,09
13a	Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang telah ditindaklanjuti	89,00%	91,19%	102,46
13b	Indeks opini BPK atas LK BA 15	4	4	120,00
13c	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,00%	96,73%	101,82
	Nilai Kinerja Organisasi			110,27

A.2.9. Program dan Kegiatan Kementerian Keuangan

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis, telah ditetapkan 11 (sebelas) Program di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6
Program Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2018

NO	PROGRAM
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan
2	Program Pengelolaan Anggaran Negara
3	Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak
4	Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
5	Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara
6	Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang
7	Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
8	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
9	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan
10	Program Perumusan Kebijakan Fiskal
11	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk diperbandingkan dengan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2018 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian Keuangan seperti eselon I, wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan adalah 1.104 satker termasuk 5 satker BLU dan 1 satker konsolidasi. Dari jumlah tersebut yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 1.104 satker (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7
Rekapitulasi Jumlah Satker yang Menyampaikan Laporan Keuangan
Menurut Eselon I

Kode Eselon I	Uraian	KP	KD	Jumlah Satker
01	Sekretariat Jenderal	10	20	30
02	Inspektorat Jenderal	1	-	1
03	Ditjen Anggaran	1	-	1
04	Ditjen Pajak	4	592	596
05	Ditjen Bea dan Cukai	6	135	141
06	Ditjen Perimbangan Keuangan	1	-	1
07	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	1	-	1
08	Ditjen Perbendaharaan	5	216	221
09	Ditjen Kekayaan Negara	2	88	90
10	BPPK	7	13	20
11	BKF	1	-	1
55	Satker Konsolidasi	1		1
Jumlah		40	1.064	1.104

Keterangan: KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah

A.4. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kementerian Keuangan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

*Dasar
Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Keuangan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

*Kebijakan
Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

A.6.1. Pendapatan- LRA

*Pendapatan-
LRA*

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.6.2. Pendapatan- LO

Pendapatan-
LO

- Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO dibedakan berdasarkan sistem pemungutan pajak, yaitu secara *Self Assessment System*, *Withholding Assessment System*, dan *Official Assessment System*. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang diperoleh dengan sistem *self assessment* maupun sistem *withholding assessment* diakui pada saat realisasi penerimaan perpajakan yang masuk ke Rekening Kas Umum Negara tanpa terlebih dahulu Pemerintah menerbitkan ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan sistem *self assessment* maupun sistem *withholding assessment* di lingkup Kementerian Keuangan yang digunakan adalah hasil rekonsiliasi penerimaan. Pada DJBC, apabila pada akhir periode pelaporan masih terdapat penerimaan yang belum mendapatkan nomor pendaftaran pada dokumen kepabeanan, maka diungkap dalam CaLK.
- Sesuai dengan Buletin Teknis 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan, Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang dipungut dengan sistem *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Perpajakan. Timbulnya hak menagih adalah pada saat Pemerintah telah menerbitkan ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku atau saat badan peradilan mengeluarkan putusan atas gugatan. Ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Perpajakan-LO. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan sistem *official assessment* di lingkup Kementerian Keuangan adalah ketetapan/keputusan/putusan diterbitkan oleh Pemerintah atau badan peradilan yang mengakibatkan kurang bayar sehingga timbul Piutang Perpajakan.
- Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Keuangan telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-30/MK.01/2018 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan, Piutang, dan Utang Berbasis Akrual Lingkup Kementerian Keuangan BA 015, adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Perpajakan
 - Pendapatan Pajak Penghasilan diakui pada saat penghasilan terutang dibayar dan/atau dilaporkan oleh wajib pajak atau penerbitan ketetapan atau keputusan yang mengakibatkan kurang bayar pada wajib pajak.
 - Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) diakui pada saat PPN dan PPnBM terutang dibayar dan/atau dilaporkan oleh pengusaha atau pada saat ketetapan atas pemeriksaan/keputusan keberatan/banding yang mengakibatkan kurang bayar diterbitkan petugas pajak dan tidak diajukan upaya hukum oleh Wajib Pajak sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

- Pendapatan PPh 22 Impor, PPN Impor, dan PPnBM Impor diakui pada saat setoran pajak yang terutang dibayar dan/atau dilaporkan.
- Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diakui pada saat terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) oleh DJP.
- Pendapatan Bea Meterai diakui pada saat diterimanya penyetoran atas Bea Meterai paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau pada saat penetapan jika diketahui adanya penggunaan Bea Meterai yang melebihi jumlah yang diperbolehkan oleh DJP.
- Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri – Pendapatan Cukai
 - Pendapatan Cukai Hasil Tembakau (CK-HT) diakui pada saat dokumen pemesanan pita cukai telah mendapat nomor pendaftaran (CK-1) dan telah dilakukan pembayaran (SSPCP) atau dokumen CK-1 Kredit dan SK Penundaan Pembayaran. Pencatatan pendapatan cukai sebesar nilai dalam dokumen CK-1 dan SSPCP.
Nilai CK-1 yang dicatat sebagai pendapatan Cukai HT berasal dari pemesanan pita cukai dikurangi penggantian pita cukai yang berasal dari dokumen CK-2 dan CK-3.
 - Pendapatan Cukai Etil Alkohol (CK-EA) diakui pada saat mendapatkan nomor pendaftaran dokumen Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5).
 - Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol
 - Pada saat impor, mendapatkan nomor pendaftaran dokumen permohonan pemesanan pita cukai MMEA (CK-1A);
 - Jika hasil produksi dalam negeri, menggunakan CK-1A (pelekatan) dan SSPCP (pembayaran);
 - Untuk Pengusaha BKC yang mendapat fasilitas penundaan pada saat mendapatkan nomor pendaftaran dokumen CK-1A Kredit.
 - Pendapatan Denda Administrasi Cukai diakui pada saat diterbitkannya dokumen STCK-1 oleh Kantor Pelayanan DJBC.
 - Pendapatan Cukai Lainnya diakui pada saat diterbitkan dokumen STCK atau SPPBP oleh Kantor Pelayanan DJBC.
- Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
 - Bea Masuk diakui pada saat disetorkan dan/ diterbitkan nomor pendaftaran pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) oleh Kantor Pelayanan DJBC atau pada saat terbitnya ketetapan/keputusan kurang bayar.
 - Bea Keluar diakui pada saat disetorkan dan/ diterbitkan nomor pendaftaran oleh Kantor Pelayanan DJBC atau pada saat terbitnya ketetapan/ keputusan kurang bayar.

- Pendapatan Denda Administrasi Pabean diakui pada saat penetapan SPTNP, SPKTNP, SPP, SPSA, dan SPPBMCP
 - Pendapatan Pabean Lainnya diakui pada saat diterbitkannya dokumen penetapan SPP, SPSA.
 - Pendapatan atas Fasilitas Kepabeaan pengakuan pendapatannya sama dengan pengakuan pendapatan saat disetor untuk *self assesment* maupun saat ditetapkan untuk *official assessment*.
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - Pendapatan atas keterlambatan/kekurangan penyetoran penerimaan negara oleh Bank Persepsi diakui pada saat diterbitkannya surat pengenaan denda.
 - Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Non Eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas II diakui pada saat terdapat penyetoran ke Kas Negara.
 - Penerimaan atas Kertas Sekuriti untuk Pembuatan Kutipan Risalah Lelang Bagi Pejabat Lelang Kelas II diakui pada saat terdapat penyetoran ke Kas Negara.
 - Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli Atas Lelang Pegadaian diakui pada saat terdapat penyetoran ke Kas Negara.
 - Penerimaan atas Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II diakui pada saat terdapat penyetoran ke Kas Negara.
 - Penerimaan Pemberian Izin Operasional Balai Lelang diakui pada saat sudah terbitnya SK dan sudah disetor ke Kas Negara.
 - Penerimaan atas Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Lelang Kelas II diakui pada saat izin perpanjangan telah terbit dan sudah disetor ke Kas Negara.
 - Penerimaan Denda Keterlambatan Penyetoran Bea Lelang Ke Kas Negara Oleh Balai Lelang Atau Pejabat Lelang Kelas II diakui pada saat diketahui bahwa Pejabat Lelang Kelas II atau Balai Lelang terlambat menyetorkan Bea Lelang.
 - Penerimaan Bea Lelang Batal Atas Permintaan Penjual diakui pada saat diterimanya surat pemberitahuan pembatalan dari penjual oleh Kepala KPKNL dan disetor ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL.
 - Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli Atas Lelang Eksekusi, Non Eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas I, dan Lelang Kayu Hasil Hutan Lainnya dari Tangan Pertama diakui pada saat pembeli melunasi pembayaran Pokok Lelang ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL.
 - Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung Hutang diakui pada saat telah pastinya pembayaran angsuran atau penarikan yang diindikasikan oleh telah diterimanya pembayaran oleh Bendahara Penerima atau telah masuk ke dalam

rekening Bendahara Penerima dan telah terverifikasi.

- Penerimaan Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli Wanprestasi diakui pada saat telah ditetapkannya Pembeli Lelang wanprestasi oleh Pejabat Lelang.
- Penerimaan Atas Uang Jaminan Penawaran Lelang yang Tidak Diambil diakui pada saat 6 bulan setelah upaya pemberitahuan melalui surat panggilan/pengumuman melalui surat kabar harian kepada pemilik uang jaminan dan telah disetor ke Kas Negara.
- Penerimaan Kelebihan Hasil Bersih Lelang PUPN yang Tidak Diambil oleh Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang diakui setelah 3 (tiga) kali dipanggil secara patut tidak bersedia mengambil uang kelebihan hasil lelang atau telah dipanggil melalui koran dan telah disetor ke Kas Negara.
- Penerimaan Pemohon Lelang Tidak Bersedia Mengambil/ Mencairkan Cek/BG Menerima Hasil Bersih Lelang diakui pada saat pemberitahuan tertulis telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali dan telah disetor ke Kas Negara.
- Penyetoran atas Penerimaan Piutang Negara yang Tidak Jelas diakui setelah Proses verifikasi dan konfirmasi dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak penerimaan tersebut masuk ke Rekening Penampungan Piutang dan telah disetorkan ke Kas Negara.
- Pendapatan denda administrasi atas perpanjangan izin akuntan publik diakui ketika timbul hak menagih kepada akuntan publik yang telah habis masa berlaku izinnya.
- Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik diakui pada saat PPPK mengeluarkan surat penetapan sanksi administratif (surat tagihan pertama).
- Pendapatan imbal jasa penjaminan infrastruktur diakui pada saat timbul hak atas pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur yang telah diberikan sesuai berlalunya waktu
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- Semua pendapatan-LO di Kementerian Keuangan yang belum diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-30/MK.01/2018 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan, Piutang, dan Utang Berbasis Akrual Lingkup Kementerian Keuangan BA 015 mengikuti kebijakan akuntansi pendapatan-LO secara umum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.6.3. Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

A.6.4. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

A.6.5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

A.6.5.1. Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca yaitu tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp14.481,00.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung

Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Terhadap Piutang Perpajakan, keputusan saat terjadinya Piutang Perpajakan, dicatat dan dinilai berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi pengakuan aset yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, kebijakan akuntansi yang diambil dalam pengakuan dan pengukuran piutang pajak adalah sebagai berikut:
 - Untuk Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak sebelumnya, piutang pajak diakui pada saat diterbitkan:
 - a) Surat Tagihan Pajak;
 - b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; dan
 - d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
 - e) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan PBB, SKP PBB;
 - f) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
 - g) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tambahan;
 - h) Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - Untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak selanjutnya, piutang pajak diakui setelah melewati masa jatuh tempo dari:
 - a) diterbitkan Surat Tagihan Pajak;
 - b) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah disetujui oleh WP;
 - c) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
 - d) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
 - e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
- f) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
 - g) Wajib Pajak tidak mengajukan banding sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan banding atas Surat Keputusan Keberatan;
 - h) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding;
 - i) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah yang masih harus dibayar bertambah;
 - j) diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
 - k) diterbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
 - l) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
 - m) diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
 - n) diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan; dan
 - o) diterbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

A.6.5.2. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang

Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung, dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

*Piutang
Jangka
Panjang*

A.6.5.3. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

- Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

A.6.5.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Sesuatu diakui sebagai Aset Tak Berwujud diakui jika dan hanya jika:
 - Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- Untuk keseragaman penyajian dan pengungkapan ATB di seluruh satuan kerja di Pemerintah Pusat, tata cara penyajian dan pengungkapan ATB (sesuai Bultek SAP No.17) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

A.6.6. Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar

Utang Jangka Panjang,dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

A.6.7. Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

A.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian		Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo		0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan		10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan		50%
Macet	1.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2.	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Secara khusus, kualitas Piutang Perpajakan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tanggal 25 Januari 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak. Menurut PER-39/PJ/2013 Kualitas Piutang Pajak digolongkan menjadi kualitas yang terdiri dari: lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.
 - a. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas lancar apabila:

- (i) mempunyai umur piutang sampai dengan 4 bulan dan belum diterbitkan Surat Paksa; atau
 - (ii) telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak dan belum melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut.
- b. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila:
- (i) mempunyai umur piutang lebih dari 4 bulan sampai dengan 1 tahun dan belum diterbitkan Surat Paksa;
 - (ii) telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak tetapi telah melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut;
 - (iii) telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
 - (iv) telah diterbitkan Surat Paksa dengan umur Surat Paksa sampai dengan 1 tahun; atau
 - (v) telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- c. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas diragukan apabila:
- (i) mempunyai umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun dan belum diterbitkan Surat Paksa;
 - (ii) telah diterbitkan Surat Paksa dengan umur Surat Paksa lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
 - (iii) telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - (iv) sedang diajukan upaya hukum;
 - (v) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sedang dalam proses pailit atau proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- d. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas macet apabila:
- (i) mempunyai umur piutang lebih dari 2 tahun dan belum diterbitkan Surat Paksa;
 - (ii) telah diterbitkan Surat Paksa dengan umur Surat Paksa lebih dari 2 tahun;

- (iii) Wajib Pajak berstatus Non Efektif (NE);
 - (iv) terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sedang dilakukan proses hukum oleh instansi yang berwenang yang meliputi penyidikan, penyelidikan, ataupun penuntutan terkait tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
 - (v) dalam waktu kurang dari 58 hari hak penagihannya akan daluwarsa;
 - (vi) hak penagihannya telah daluwarsa; atau
 - (vii) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan.
- e. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya melalui pemindahbukuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran digolongkan dalam kualitas lancar apabila mempunyai umur piutang pajak sampai dengan 1 (satu) tahun dan ada kepastian penyelesaian dari Direktorat Jenderal Anggaran.
 - f. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya melalui pemindahbukuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran digolongkan dalam kualitas macet apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 1 (satu) tahun dan belum ada kepastian penyelesaian dari Direktorat Jenderal Anggaran.
 - g. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak digolongkan dalam kualitas lancar apabila mempunyai umur piutang pajak sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - h. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
 - i. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak digolongkan dalam kualitas diragukan apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun.
 - j. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak digolongkan dalam kualitas macet apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 5 (lima) tahun.

A.8. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan

Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

A.9. Amortisasi Aset Tak Berwujud

*Amortisasi
Aset Tak
Berwujud*

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.06/2015, amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki Masa Manfaat terbatas, antara lain meliputi:
 - a. Perangkat Lunak (*Software*) Komputer;
 - b. Lisensi;
 - c. Waralaba (*Franchise*);
 - d. Hak Cipta (*Copyright*); dan
 - e. Hak Paten.
- Amortisasi tidak dilakukan terhadap:
 - a. Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta (*Copyright*) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pendeklegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/ atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendeklegasian kewenangan, untuk dilakukan pemindah tanginan, pemusnahan, atau penghapusan.

- Amortisasi pertama kali dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015, berdasarkan saldo pada tanggal 1 Januari 2016, dengan menggunakan nilai buku Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2015 yang telah dilakukan amortisasi.
- Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebelum tahun 2015 sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan/atau nilai Aset Tak Berwujud, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat diamortisasikan.
- Hasil amortisasi pertama kali dibukukan pada tanggal 1 Januari 2016.
- Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2015, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan. Penentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud tanpa adanya nilai residu.
- Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Penerapan atas Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat berdasarkan SAP Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.
- Amortisasi di Kementerian Keuangan dilaksanakan pada Semester II Tahun Anggaran 2016.
- Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015, masa manfaat Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut.

Kode Barang					Uraian	Tahun
8	01	01	01	001	Software Komputer	4
8	01	01	01	002	Lisensi	10
8	01	01	01	003	Franchise	5
8	01	01	01	004	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70
8	01	01	01	005	Hak Paten Sederhana	10
8	01	01	01	008	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
8	01	01	01	009	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	01	01	01	010	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
8	01	01	01	011	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
8	01	01	01	012	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
8	01	01	01	013	Paten Biasa	20
8	01	01	01	014	Merek	10
8	01	01	01	015	Desain Industri	10
8	01	01	01	016	Rahasia Dagang	10
8	01	01	01	017	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10

8	01	01	01	018	Perlindungan Varietas Tanaman Musiman	20
8	01	01	01	019	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

A.10. Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan BLU

Dalam rangka penerapan pertama kali PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan BLU lingkup Kementerian Keuangan TA 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Kementerian Keuangan memiliki 5 (lima) satker BLU, yaitu: PKN STAN, LPDP, LMAN, BPDP Kelapa Sawit, dan Pusat Investasi Pemerintah;
- b. Kelima satker BLU menyusun Laporan Keuangan TA 2018 berdasarkan SAP berbasis akrual. Selain itu, untuk keperluan manajerial, satker BLU dapat juga menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK;
- c. Penyusunan Neraca per 1 Januari 2018 memperhatikan saldo Neraca per 31 Desember 2017, baik versi SAK maupun SAP;
- d. Satker BLU merekam saldo awal dana kelolaan BLU dan/atau reklasifikasi serta penyesuaianya sesuai saldo Neraca (versi SAK) *audited* 2017 serta Utang Jangka Panjang Kepada BUN ke dalam Neraca awal 1 Januari 2018;
- e. Keseluruhan Laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Laporan Arus Kas (LAK) disajikan secara komparasi untuk periode pelaporan tahun 2018 dan 2017;
- f. Transaksi antar BLU dalam satu entitas Kementerian Keuangan dilakukan eliminasi pada Satuan Kerja Konsolidasi Kementerian Keuangan. Transaksi yang dieliminasi adalah transaksi antar satker BLU (selaku penerima kerja) dengan satker lain, baik BLU maupun non BLU (selaku pemberi kerja) TA 2018.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah Neto
TA 2018
Rp1.539,71
Triliun*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto Kementerian Keuangan TA 2018 sebesar **Rp1.539.713.970.066.291,00** atau **94,32** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar **Rp1.632.479.872.321.277,00**.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8
Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan
TA 2018

(dalam ribuan rupiah)			
Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Penerimaan Perpajakan	1.618.095.493.162	1.518.791.948.866	93,86
Penerimaan Negara Bukan Pajak	14.384.379.159	20.922.021.201	145,45
Jumlah	1.632.479.872.321	1.539.713.970.067	94,32

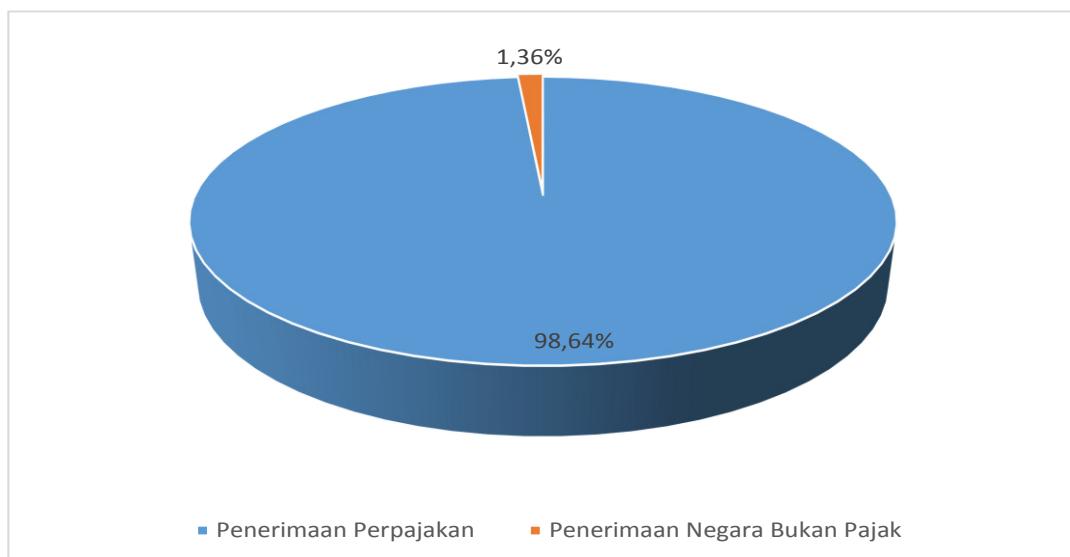
Adapun Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Bruto dan Pengembalian Pendapatan Kementerian Keuangan TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9
Rincian Realisasi Pendapatan Bruto
TA 2018

(dalam ribuan rupiah)			
Uraian	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto
Penerimaan Perpajakan	1.639.382.122.533	(120.590.173.667)	1.518.791.948.866
Penerimaan Negara Bukan Pajak	21.147.791.537	(225.770.336)	20.922.021.201
Jumlah	1.660.529.914.070	(120.815.944.003)	1.539.713.970.067

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto TA 2018 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 1
Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto
TA 2018



Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto TA 2018 mengalami kenaikan sebesar **Rp177.674.725.341.995,00** atau **13,04** persen dari realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2017. Kenaikan ini berasal dari Pendapatan Pajak Dalam Negeri **Rp168.594.541.083.168,00** dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional **Rp6.667.764.995.977,00** serta pada Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp2.412.419.262.850,00**.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto
TA 2018 dan TA 2017

Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
Penerimaan Perpajakan	1.518.791.948.865	1.343.529.642.786	175.262.306.080	13,04
Penerimaan Negara Bukan Pajak	20.922.021.201	18.509.601.938	2.412.419.263	13,03
Jumlah	1.539.713.970.068	1.362.039.244.724	177.674.725.341	13,04

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Per Unit Eselon I (Neto)

Realisasi Pendapatan per Unit Eselon I Neto lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11
Realisasi Pendapatan Neto Per Unit Eselon I
TA 2018

No.	Eselon I	Estimasi	Realisasi	%
1	Sekretariat Jenderal	1.817.084.050	1.867.070.102	102,75
2	Inspektorat Jenderal	0	161.639	0,00
3	Ditjen Anggaran	0	699.535	0,00
4	Ditjen Pajak	1.423.999.938.462	1.313.347.887.240	92,23
5	Ditjen Bea dan Cukai	194.118.461.553	205.530.571.812	105,88
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	0	677.539	0,00
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	84.865.895	95.499.404	112,53
8	Ditjen Perbendaharaan	11.554.836.676	15.563.997.941	134,70
9	Ditjen Kekayaan Negara	884.391.221	3.255.633.927	368,12
10	Badan Diklat Keuangan	20.294.464	50.746.903	250,05
11	Badan Kebijakan Fiskal	0	1.024.026	0,00
Jumlah		1.632.479.872.321	1.539.713.970.068	94,32

Perbandingan realisasi pendapatan per Unit Eselon I Neto TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Pendapatan Neto Per Unit Eselon I
TA 2018 dan TA 2017

No.	Uraian	TA 2018	TA 2017	(dalam ribuan rupiah)	
				Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	1.867.070.101	1.863.811.291	3.258.810	0,17
2	Inspektorat Jenderal	161.639	33.443	128.195	383,32
3	Ditjen Anggaran	699.535	450.761	248.774	55,19
4	Ditjen Pajak	1.313.347.887.239	1.151.077.845.435	162.270.041.804	14,10
5	Ditjen Bea dan Cukai	205.530.571.812	192.566.831.945	12.963.739.867	6,73
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	677.539	1.727.984	(1.050.445)	(60,79)
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	95.499.404	69.172.546	26.326.859	38,06
8	Ditjen Perbendaharaan	15.563.997.941	14.802.660.586	761.337.355	5,14
9	Ditjen Kekayaan Negara	3.255.633.927	1.605.176.506	1.650.457.421	102,82
10	Badan Diklat Keuangan	50.746.903	49.684.081	1.062.822	2,14
11	Badan Kebijakan Fiskal	1.024.026	1.850.147	(826.121)	(44,65)
	Jumlah	1.539.713.970.066	1.362.039.244.725	177.674.725.342	13,04

2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Per Jenis Penerimaan

Pendapatan Kementerian Keuangan terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Komposisi realisasi pendapatan Neto per jenis penerimaan TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13
Realisasi Pendapatan Neto Per Jenis Penerimaan
TA 2018

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Penerimaan Perpajakan	1.618.095.493.162	1.518.791.948.865	93,86
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.579.395.493.162	1.472.910.754.750	93,26
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	38.700.000.000	45.881.194.115	118,56
Penerimaan Negara Bukan Pajak	14.384.379.159	20.922.021.200	145,45
PNBP BLU	13.927.140.374	20.206.480.523	145,09
PNBP Lainnya	457.238.785	715.540.677	156,49

Perbandingan realisasi pendapatan per jenis penerimaan untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Pendapatan Per Jenis Penerimaan
TA 2018 dan TA 2017

Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
Penerimaan Perpajakan	1.518.791.948.865	1.343.529.642.786	175.262.306.079	13,04
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.472.910.754.750	1.304.316.213.667	168.594.541.083	12,93
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	45.881.194.115	39.213.429.119	6.667.764.996	17,00
Penerimaan Negara Bukan Pajak	20.922.021.200	18.509.601.938	2.412.419.263	13,03
PNBP BLU	20.206.480.523	17.850.640.554	2.355.839.970	13,20
PNBP Lainnya	715.540.677	658.961.384	56.579.293	8,59

B.1.1. PENERIMAAN DALAM NEGERI

B.1.1.1. Penerimaan Perpajakan

*Realisasi
Penerimaan
Perpajakan
Neto
Rp1.518,79
Triliun*

Penerimaan Perpajakan berasal dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto TA 2018 sebesar **Rp1.518.791.948.865.511,00** atau **93,86** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar **Rp1.618.095.493.162.000,00**.

Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

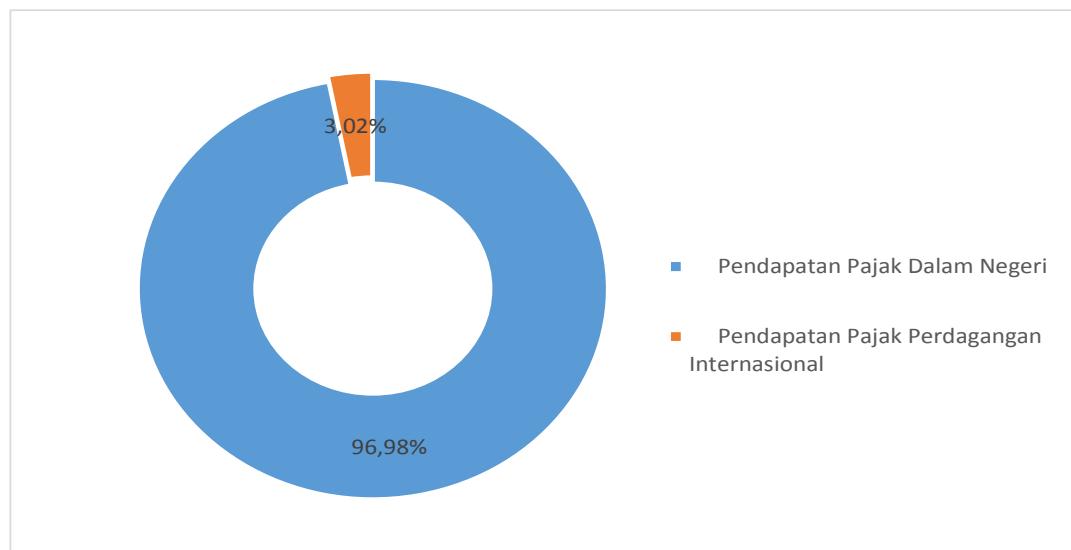
Tabel 15
Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.579.395.493.162	1.472.910.754.750	93,26
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	38.700.000.000	45.881.194.115	118,56
Jumlah	1.618.095.493.162	1.518.791.948.865	93,86

Komposisi realisasi Penerimaan Perpajakan Neto TA 2018 per jenis penerimaan dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2
Komposisi Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto Per Jenis Penerimaan TA 2018



Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto TA 2018 per Unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16
Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto per Unit Eselon I TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

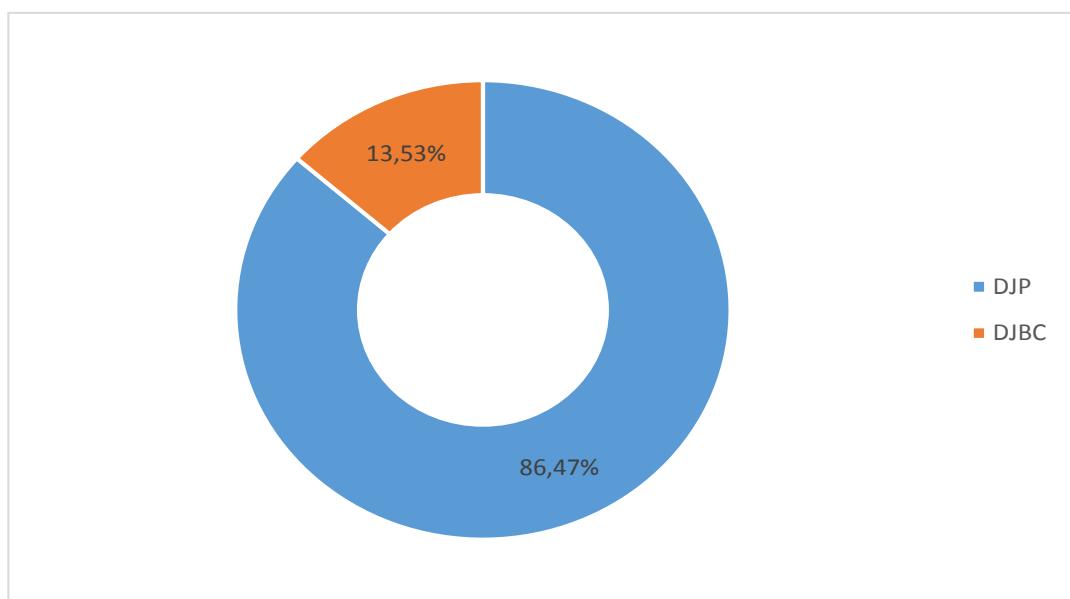
Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Ditjen Pajak	1.423.995.493.162	1.313.322.214.395	92,23
Ditjen Bea dan Cukai	194.100.000.000	205.469.734.471	105,86
Jumlah	1.618.095.493.162	1.518.791.948.866	93,86

Pencatatan Penerimaan Perpajakan di LK BA 015 berbeda dengan pencatatan Penerimaan Perpajakan di BUN. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara data SiAP dan SAI pada LK BA 015 sebesar **Rp2.171.714.481,00** dengan penjelasan:

1. Adanya perbedaan *cut off* pengakuan transaksi pada SiAP dan SAI yang menyebabkan terjadinya selisih kurs;
2. SAI tidak mengakui beberapa pendapatan perpajakan yang terindikasi bukan pendapatan perpajakan atau tusi Kementerian Keuangan meskipun menggunakan akun pendapatan perpajakan seperti PBB P2 dan BPHTB.

Komposisi realisasi Penerimaan Perpajakan Neto TA 2018 per Unit Eselon I dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3
Komposisi Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto per Unit Eselon I TA 2018



Perbandingan realisasi Penerimaan Perpajakan Neto TA 2018 dan TA 2017 per Unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto Per Unit Eselon I
TA 2018 dan TA 2017

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
Ditjen Pajak	1.313.322.214.395	1.151.028.064.275	162.294.150.120	14,10
Ditjen Bea dan Cukai	205.469.734.471	192.501.578.512	12.968.155.959	6,74
Jumlah	1.518.791.948.866	1.343.529.642.787	175.262.306.079	13,04

Penerimaan Perpajakan mengalami kenaikan sebesar **Rp175.262.306.079.145,00** atau **13,04** persen dari realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2017. Kenaikan Penerimaan Perpajakan terutama terjadi pada Pajak Penghasilan (PPH) sebesar **Rp103.190.024.079.201,00** dan Pendapatan PPN sebesar **Rp56.538.118.423.430,00**.

Penerimaan PBB Pedesaan dan BPHTB sebesar [Rp430.602.783,00](#) di DJP tidak dicatat sebagai Penerimaan Perpajakan pada Laporan Keuangan BA 015 karena penerimaan tersebut pengelolaannya sudah diserahkan dari DJP ke Pemda sejak Tahun 2015.

Penerimaan Perpajakan di DJBC per 31 Desember 2018 masih terdapat penerimaan yang belum mendapatkan nomor pendaftaran pada dokumen kepabeanan sebesar [Rp33.842.193.000,00](#), namun demikian sampai dengan 30 Januari 2019 seluruhnya telah mendapatkan nomor pendaftaran.

Perbandingan realisasi Penerimaan Perpajakan Neto TA 2018 dan TA 2017 per Jenis Penerimaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto Per Jenis Penerimaan
TA 2018 dan TA 2017

Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
Penerimaan Perpajakan	1.518.791.948.865	1.343.529.642.787	175.262.306.079	13,04
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.472.910.754.750	1.304.316.213.667	168.594.541.083	12,93
Pendapatan PPh	749.986.231.280	646.796.207.201	103.190.024.079	15,95
Pendapatan PPN	537.261.153.014	480.723.034.591	56.538.118.423	11,76
Pendapatan PBB	19.444.517.438	16.770.346.937	2.674.170.501	15,95
Pendapatan Cukai	159.588.540.355	153.288.149.392	6.300.390.963	4,11
Pendapatan Pajak Lainnya	6.630.312.663	6.738.475.546	(108.162.883)	(1,61)
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	45.881.194.116	39.213.429.120	6.667.764.996	17,00
Pendapatan Bea Masuk	39.117.123.486	35.066.277.071	4.050.846.415	11,55
Pendapatan Bea Keluar	6.764.070.630	4.147.152.049	2.616.918.581	63,10

Realisasi Penerimaan Perpajakan Bruto TA 2018 sebesar [Rp1.639.382.122.532.643,00](#) dan Pengembalian Penerimaan Perpajakan sebesar [Rp120.590.173.667.132,00](#).

Rincian Penerimaan Perpajakan Bruto dan Pengembalian Penerimaan Perpajakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19
Realisasi Penerimaan Perpajakan Per Jenis Penerimaan Bruto
TA 2018

Uraian	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto
Penerimaan Perpajakan	1.639.382.122.532	(120.590.173.668)	1.518.791.948.865
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.591.788.000.917	(118.877.246.168)	1.472.910.754.750
Pendapatan PPh	785.577.922.001	(35.591.690.721)	749.986.231.280
Pendapatan PPN	618.986.903.362	(81.725.750.348)	537.261.153.014
Pendapatan PBB	20.170.645.388	(726.127.951)	19.444.517.437
Pendapatan Cukai	159.591.447.829	(2.907.474)	159.588.540.355
Pendapatan Pajak Lainnya	7.461.082.337	(830.769.674)	6.630.312.663
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	47.594.121.615	(1.712.927.500)	45.881.194.115
Pendapatan Bea Masuk	40.816.234.476	(1.699.110.991)	39.117.123.486
Pendapatan Bea Keluar	6.777.887.139	(13.816.509)	6.764.070.630

B.1.1.1.2. Pendapatan Pajak Dalam Negeri (Neto)

*Realisasi
Pendapatan
Pajak Dalam
Negeri Neto
Rp1.472,91
Triliun*

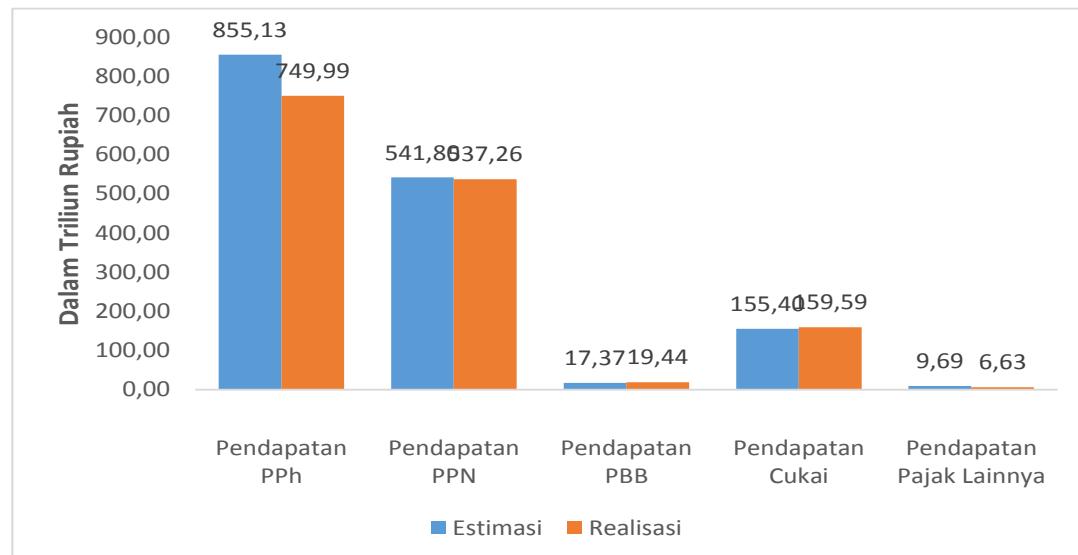
Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto TA 2018 sebesar **Rp1.472.910.754.750.140,00** atau **93,26** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar **Rp1.579.395.493.162.000,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2017 terjadi kenaikan sebesar **Rp168.594.541.083.168,00** atau **12,93** persen.

Rincian realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 20
Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri Neto
TA 2018

(dalam ribuan rupiah)			
Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan PPh	855.133.462.162	749.986.231.280	87,70
Pendapatan PPN	541.801.130.000	537.261.153.014	99,16
Pendapatan PBB	17.369.101.000	19.444.517.438	111,95
Pendapatan Cukai	155.400.000.000	159.588.540.355	102,70
Pendapatan Pajak Lainnya	9.691.800.000	6.630.312.663	68,41
Jumlah	1.579.395.493.162	1.472.910.754.750	93,26

Grafik 4
Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri
TA 2018



Perbandingan realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 21
Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto
TA 2018 dan TA 2017

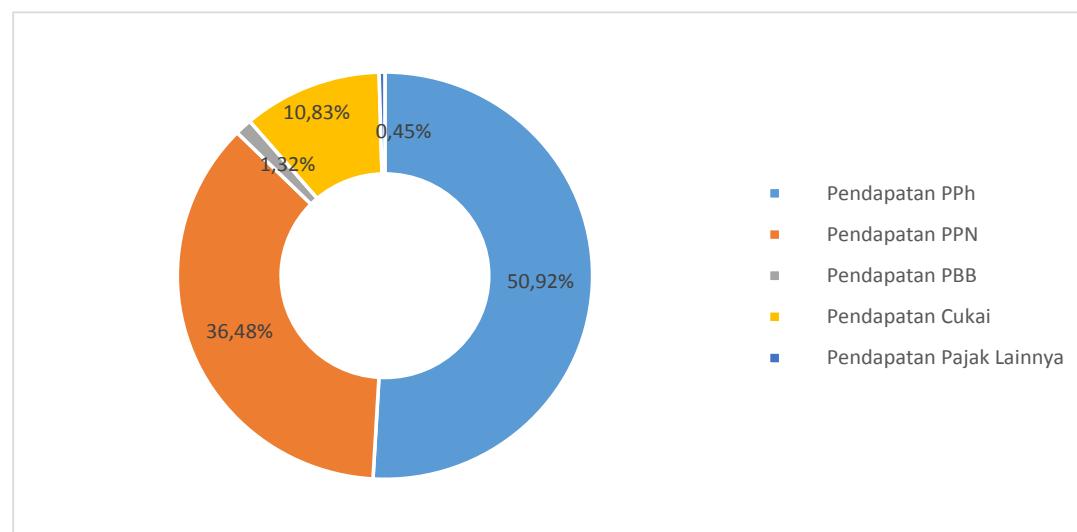
Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan (Penurunan)	(dalam ribuan rupiah) Naik (Turun) %
Pendapatan PPh	749.986.231.280	646.796.207.201	103.190.024.079	15,95
Pendapatan PPN	537.261.153.014	480.723.034.591	56.538.118.423	11,76
Pendapatan PBB	19.444.517.438	16.770.346.937	2.674.170.501	15,95
Pendapatan Cukai	159.588.540.355	153.288.149.392	6.300.390.963	4,11
Pendapatan Pajak Lainnya	6.630.312.663	6.738.475.546	(108.162.883)	(1,61)
Jumlah	1.472.910.754.750	1.304.316.213.667	168.594.541.083	12,93

Grafik 5
Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri
TA 2018 dan TA 2017



Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto TA 2018 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 6
Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto



Jika dibandingkan dengan TA 2017, Pendapatan Pajak Dalam Negeri mengalami kenaikan, diantaranya disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar **Rp103.190.024.079.201,00** dan Pendapatan PPN sebesar **Rp56.538.118.423.430,00**.

Secara umum Penerimaan Perpajakan di tahun anggaran 2018 mencapai Rp **1.518,79 triliun** atau tumbuh **13,05%** dibandingkan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan di tahun anggaran 2018 ini lebih banyak ditopang oleh masih positifnya kondisi sektoral utama yaitu sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertambangan, dan Jasa Keuangan.

Beberapa kondisi yang turut berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak di tahun anggaran 2018, antara lain penurunan nilai pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang cukup signifikan, peningkatan harga komoditas, khususnya hasil tambang, peningkatan impor bahan baku dan barang modal, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pasca program *tax amnesty*, termasuk peningkatan jumlah Wajib Pajak, peningkatan kualitas hasil pemeriksaan yang mengakibatkan meningkatnya nilai ketetapan pajak, peningkatan pembayaran dividen di beberapa sektor usaha dibanding periode yang sama tahun lalu, peningkatan setoran PPh Migas sebagai akibat meningkatnya nilai kurs dan jumlah *lifting*, peningkatan pembayaran gaji di beberapa sektor usaha maupun belanja gaji APBN dan APBD, serta adanya kegiatan pilkada serentak dan gelaran piala dunia sepak bola juga menyumbang peningkatan aktivitas perekonomian di Indonesia.

Gambaran umum penerimaan pajak TA 2018 adalah sebagai berikut:

1) Pajak Penghasilan Pasal 21

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 dalam tahun anggaran 2018 mencapai Rp134,91 triliun atau tumbuh 14,56% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun anggaran 2017. Pertumbuhan PPh Pasal 21 yang positif ini ditunjang oleh peningkatan pemberian gaji dan tunjangan yang cukup signifikan di beberapa sektor usaha termasuk peningkatan realisasi belanja gaji APBN dan APBD pada tahun anggaran 2018. Beberapa sektor usaha yang paling utama berkontribusi antara lain, sektor administrasi pemerintahan meningkat Rp2,94 triliun (tumbuh 12,46%), sektor usaha industri pengolahan meningkat Rp2,79 triliun (tumbuh 11,71%), dan sektor usaha jasa keuangan meningkat Rp0,28 triliun (tumbuh 9,50%).

2) Pajak Penghasilan Pasal 22

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 tahun anggaran 2018 mencapai Rp 18,01 triliun atau tumbuh 11,36% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun anggaran 2017. Pertumbuhan PPh Pasal 22 yang positif ini ditopang oleh kondisi ekonomi secara umum yang masih kuat seperti membaiknya harga komoditas pertambangan dengan pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 22 atas Eksport Komoditas Tambang Batu Bara dan Mineral. Berdasarkan jenis setorannya, PPh Pasal 22 didominasi oleh setoran Masa dengan kontribusi sebesar 51,91% dan realisasi sebesar Rp9,14 triliun. Pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 22 periode s.d. bulan Desember dari Kode Jenis Setoran (KJS) tersebut adalah sebesar 31,8%. Jika dilihat dari sektor usahanya, Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor dengan setoran PPh Pasal 22 paling dominan (berkontribusi 25,25%) dengan nilai realisasi s.d. bulan Desember

adalah sebesar Rp4,46 triliun, dan pertumbuhan sebesar 2,23% dibandingkan dengan tahun 2017.

3) Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor tahun anggaran 2018 mencapai Rp54,73 triliun atau tumbuh 26,81% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun anggaran 2017. Penerimaan PPh Pasal 22 Impor didominasi oleh 2 jenis Sektor usaha saja, yakni sektor Perdagangan dan sektor Industri Pengolahan. Penopang utama pertumbuhan PPh Pasal 22 berasal dari subsektor Perdagangan Besar, yang di tahun 2018 tumbuh 39,7% melanjutkan pertumbuhan 22,5% tahun 2017. Selain itu subsektor Industri Logam Dasar juga mengalami pertumbuhan signifikan, tumbuh 59,2% ditahun 2018, melanjutkan pertumbuhan 48,2% di tahun 2017.

4) Pajak Penghasilan Pasal 23

Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 tahun anggaran 2018 mencapai Rp39,74 triliun atau tumbuh 16,86% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun anggaran 2017. Pertumbuhan PPh Pasal 23 yang positif ini ditopang oleh meningkatnya aktivitas usaha secara umum pada sektor utama juga mendorong peningkatan PPh Pasal 23 khususnya PPh Pasal 23 atas Jasa dan Sewa bagi WP di sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan. Pembagian dividen korporasi relatif meningkat di tahun 2017 dengan pertumbuhan PPh Pasal 23 atas Dividen yang cukup signifikan mencapai 30,13%.

5) Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tahun anggaran 2018 mencapai Rp9,4 triliun atau tumbuh 20,50% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun anggaran 2017. Pertumbuhan yang signifikan ini merupakan salah satu dampak langsung peningkatan kepatuhan pasca Program Pengampunan Pajak. Pertumbuhan yang signifikan juga ditopang oleh pembayaran PPh Pasal 29 (kurang bayar dalam SPT Tahunan) dengan pertumbuhan sebesar 23,78% (mencapai Rp 1 triliun).

6) Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan tahun anggaran 2018 mencapai Rp252,13 triliun atau tumbuh 22,07% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun anggaran 2017. Kinerja positif sektoral secara umum kembali terlihat pada penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan dimana yang paling dominan antara lain, Sektor Jasa Keuangan tumbuh 17,21%, Sektor Industri Pengolahan tumbuh 11,87% sementara Sektor Pertambangan tumbuh sangat signifikan hingga 100,56% sejalan dengan harga komoditas tambang yang terus menguat di tahun 2018, serta Sektor Perdagangan tumbuh 36,07%. Selain daripada itu, pertumbuhan positif ini juga disebabkan oleh penurunan nilai restitusi di tahun anggaran 2018 senilai Rp33 triliun, atau turun sebesar 5,8%.

7) Pajak Penghasilan Pasal 26

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 tahun anggaran 2018 mencapai Rp50,64 triliun atau tumbuh 15,9% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun anggaran 2017. Pertumbuhan positif ini sejalan dengan tingginya PPh Pasal 23 atas bunga dan PPh Pasal 26 atas pembayaran dividen kepada Subyek Pajak Luar Negeri tumbuh signifikan total mencapai 43,68%, atau mencapai Rp31,3 triliun.

8) Pajak Penghasilan Final

Realisasi penerimaan PPh Final tahun anggaran 2018 mencapai Rp115,46 triliun atau tumbuh 8,61% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun anggaran 2017. Pertumbuhan positif ini lebih disebabkan oleh peningkatan penerbitan obligasi di tahun 2018 sehingga terjadi peningkatan pada pembayaran pajak atas bunga/diskonto obligasi senilai Rp 1,64 triliun atau tumbuh sebesar 13,07%. Peningkatan persewaan juga menopang pertumbuhan PPh Final dengan peningkatan senilai Rp1,35 triliun atau tumbuh sebesar 10,38%. Selanjutnya, peningkatan aktivitas pembangunan/konstruksi juga menopang pertumbuhan penerimaan PPh Final, senilai Rp2,14 triliun atau tumbuh sebesar 12,17%. Selain daripada itu, pertumbuhan penerimaan PPh Final juga disebabkan adanya kebijakan perpajakan yaitu dengan berlakunya PP Nomor 36 TAHUN 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan, yang berlaku sejak September 2017.

9) Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPN Dalam Negeri tahun anggaran 2018 mencapai Rp333,92 triliun atau tumbuh 6,23% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun anggaran 2017. Pertumbuhan positif ini didorong oleh kombinasi kondisi ekonomi secara umum yang masih positif dimana yang paling dominan adalah Sektor Jasa Konstruksi dengan peningkatan senilai Rp2,27 triliun (tumbuh 5,39%) dan Sektor Perdagangan Besar dengan peningkatan senilai Rp10,6 triliun (tumbuh 14,34%).

10) Pajak Pertambahan Nilai Impor

Realisasi penerimaan PPN Impor tahun anggaran 2018 mencapai Rp186,39 triliun atau tumbuh 25,07% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun anggaran 2017. Jika dilihat dari Sektor usahanya, Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor dengan setoran PPN Impor paling dominan (berkontribusi 58,55%) dengan nilai realisasi s.d. bulan Desember adalah sebesar Rp109,15 triliun, dan pertumbuhan sebesar 22,99% dibandingkan dengan tahun 2017. Sektor Industri Pengolahan terdiri dari 24 SubSektor. Kontribusi terbesar sektor ini berasal dari SubSektor industri makanan dengan realisasi s.d. bulan Desember 2018 sebesar Rp11,63 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 12,36% dibandingkan dengan tahun 2017. Sektor dengan kontribusi PPN Impor terbesar kedua adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran (berkontribusi 33,75%) dengan nilai realisasi sebesar Rp62,92 triliun dan pertumbuhan sebesar 32,07%.

11) Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Realisasi penerimaan PPnBM (dalam negeri dan impor) tahun anggaran 2018 mencapai Rp12,79 triliun atau tumbuh -3,75% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun anggaran 2017. Pertumbuhan negatif ini ditopang oleh masih tingginya konsumsi jenis kendaraan bermotor roda empat/lebih yang termasuk dalam kategori *Low Cost Green Car* yaitu yang mendapat fasilitas PPnBM sehingga menahan pertumbuhan PPnBM dari sektor otomotif. Selain itu, pertumbuhan negatif penerimaan PPnBM juga diakibatkan menurunnya penjualan hunian mewah di tahun 2018 ini.

12) Pajak Bumi dan Bangunan

Realisasi penerimaan PBB tahun anggaran 2018 mencapai Rp19,44 triliun atau tumbuh 15,83% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun anggaran 2017. Pertumbuhan penerimaan PBB ini dominan ditopang oleh peningkatan penerimaan PBB Migas sebesar Rp14,4 triliun dengan peningkatan senilai Rp2,15 triliun, seiring dengan peningkatan produksi dan harga minyak bumi dan gas alam.

13) Pajak Lainnya

Realisasi penerimaan Pajak Lainnya tahun anggaran 2018 mencapai Rp6,63 triliun atau tumbuh -1,62% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2017. Pertumbuhan negatif ini lebih disebabkan oleh penerimaan yang tidak berulang berupa pembayaran atas bunga penagihan di tahun 2017 dengan nilainya cukup signifikan mencapai Rp400 miliar. Sementara itu, peningkatan penerimaan dari Penjualan Benda Meterai dan Bea Meterai masih senilai Rp373 miliar atau hanya tumbuh 7,35%.

B.1.1.3. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

*Realisasi
Pajak
Perdagangan
Internasional
Neto
Rp45,88
Triliun*

Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Neto TA 2018 sebesar **Rp45.881.194.115.448,00** atau **118,56** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar **Rp38.700.000.000.000,00**.

Rincian realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Neto dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22
Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Neto
TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Bea Masuk	35.700.000.000	39.117.123.485	109,57
Pendapatan Bea Keluar	3.000.000.000	6.764.070.630	225,47
Jumlah	38.700.000.000	45.881.194.115	118,56

*Realisasi
Pendapatan
Pajak
Perdagangan
Internasional
Bruto
Rp47,59
Triliun*

Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Bruto dan realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23
Realisasi Pendapatan dan Pengembalian Pajak Perdagangan Internasional Bruto
TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto
Pendapatan Bea Masuk	40.816.234.476	(1.699.110.991)	39.117.123.485
Pendapatan Bea Keluar	6.777.887.139	(13.816.509)	6.764.070.630
Jumlah	47.594.121.615	(1.712.927.500)	45.881.194.115

Adapun perbandingan realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Neto TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24
Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Neto
TA 2018 dan TA 2017

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
Pendapatan Bea Masuk	39.117.123.485	35.066.277.071	4.050.846.414	11,55
Pendapatan Bea Keluar	6.764.070.630	4.147.152.049	2.616.918.581	63,10
Jumlah	45.881.194.115	39.213.429.120	6.667.764.995	17,00

*Realisasi
Bea Masuk
TA 2018
sebesar Rp
Rp39,11
Triliun*

Penerimaan Bea Masuk TA 2018 (neto) tercapai sebesar **Rp39.117.123.485.521,00** atau **109,57** persen dibandingkan target TA 2018.

Secara umum, faktor yang mempengaruhi pencapaian penerimaan Bea Masuk TA 2018 antara lain:

- Peningkatan devisa impor 15,16% y.o.y;
- Peningkatan utilisasi *Free Trade Agreement* (FTA) yang sebelumnya pada tahun 2017 sebesar 28% dari devisa impor meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar 30%;
- Kenaikan kurs sebesar 6,23% (13,380 menjadi 14,212);
- Program Penertiban Importasi Berisiko Tinggi yang menghasilkan kenaikan *taxbase* atas importasi berisiko tinggi sebesar 61,8%;

*Realisasi
Bea Keluar
TA 2018
sebesar
Rp6,76
Triliun*

Pendapatan Bea Keluar TA 2018 (neto) sebesar **Rp6.764.070.629.927,00** atau **225,47** persen dari target TA 2018.

Secara umum, faktor yang mempengaruhi penerimaan Bea Keluar TA 2018 antara lain:

- Penerimaan Bea Keluar masih mengandalkan penerimaan dari ekspor minerba;
- Membaiknya harga komoditas tambang di pasar internasional yang mendorong peningkatan volume ekspor;
- Membaiknya harga komoditas, permintaan, dan nilai tukar Rupiah untuk komoditas mineral non tembaga;
- Anggaran Bea Keluar belum memperhitungkan potensi peningkatan tarif Bea Keluar atas ekspor konsentrat tembaga dari semula 5% menjadi 7,5% pada PT FI;
- Pengenaan tarif Bea Keluar yang telah memperhitungkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 yaitu berdasarkan kemajuan fisik pembangunan smelter.

Atas realisasi Bea Keluar sebesar **Rp6.764.070.629.927,00**, terdapat Wajib Bayar yang mengajukan banding ke Pengadilan Pajak sebesar **Rp204.021.300.846,00** atas penetapan tarif oleh DJBC. Atas pengajuan banding tersebut, seluruhnya dikabulkan oleh Pengadilan Pajak. Kementerian Keuangan dhi. DJBC mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak tersebut.

B.1.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (Neto)

Realisasi

*Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak Neto
Rp20,92
Triliun*

Penerimaan Negara Bukan Pajak berasal dari Pendapatan PNBP Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto TA 2018 sebesar **Rp20.922.021.200.780,00** atau **145,45** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar **Rp14.384.379.159.277,00**.

Rincian Realisasi PNBP dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 25
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto
TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
PNBP BLU	13.927.140.374	20.206.480.524	145,09
PNBP Lainnya	457.238.785	715.540.677	156,49
Jumlah	14.384.379.159	20.922.021.201	145,45

*Realisasi
Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak Bruto
Rp21,14
Triliun*

Adapun realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bruto TA 2018 sebesar **Rp21.147.791.537.155,00** dengan Pengembalian PNBP sebesar **Rp225.770.336.375,00**.

Rincian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 26
Realisasi dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak
TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto
PNBP BLU	20.432.073.778	(225.593.254)	20.206.480.524
PNBP Lainnya	715.717.759	(177.082)	715.540.677
Jumlah	21.147.791.537	(225.770.336)	20.922.021.201

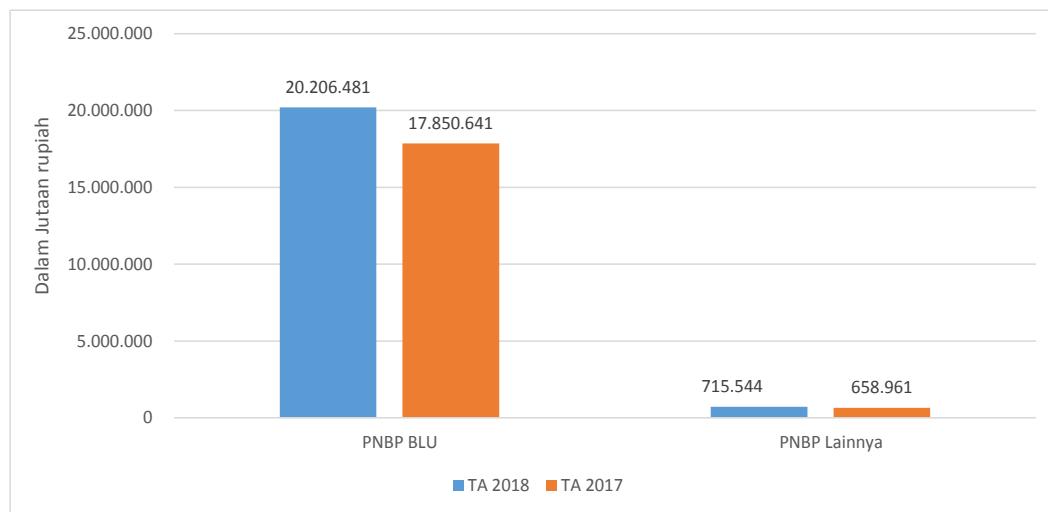
Perbandingan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 27
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto
TA 2018 dan 2017

(dalam ribuan rupiah)

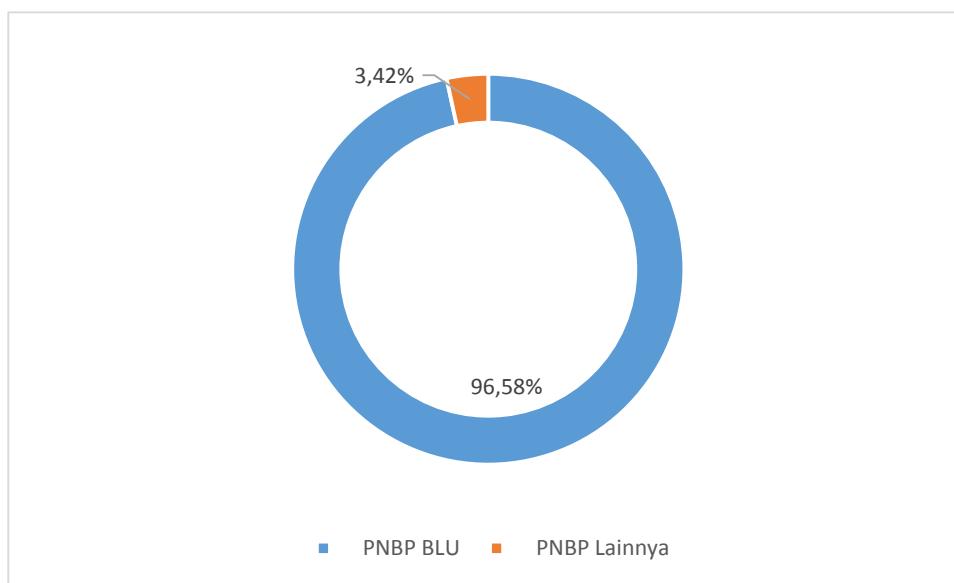
Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
PNBP BLU	20.206.480.524	17.850.640.554	2.355.839.970	13,20
PNBP Lainnya	715.540.677	658.961.384	56.579.293	8,59
Jumlah	20.922.021.201	18.509.601.938	2.412.419.263	13,03

Grafik 7
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto
TA 2018 dan TA 2017



Komposisi realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto TA 2018 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 8
Komposisi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto TA 2018



B.1.1.2.1. Pendapatan PNBP Lainnya (Neto)

- Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Neto Rp715,54 Miliar*
- Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Neto TA 2018 sebesar Rp715.540.677.351,00 atau 156,49 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2018, yaitu sebesar Rp457.238.785.277,00.
- Rincian realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Neto dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 28
Rincian Pendapatan PNBP Lainnya Neto TA 2018

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	30.532.507	70.674.961	231,47
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	1.827.135	2.318.640	126,90
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0	393.288	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	899	5.803.671	645.569,63
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	420.325.117	577.313.550	137,35
Pendapatan Denda	161.302	7.189.242	4.457,01
Pendapatan Lain-Lain	4.391.826	51.847.325	1.180,54
Jumlah	457.238.786	715.540.677	156,49

Pada TA 2018, terdapat Pengembalian Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp177.081.608,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2017 yang sebesar Rp658.961.384.005,00 maka realisasi PNBP Lainnya TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp56.579.293.346,00 atau 8,59 persen.

B.1.1.2.2. Pendapatan Badan Layanan Umum (Neto)

*Realisasi
Pendapatan
BLU
Rp20,20
Triliun*

Realisasi Pendapatan BLU TA 2018 Rp20.206.480.523.429,00 atau mencapai 145,09 persen dari target yang ditetapkan dalam DIPA TA 2018 yaitu sebesar Rp13.927.140.374,000,00.

Rincian Realisasi Pendapatan BLU Neto yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 29
Realisasi Pendapatan BLU Neto
TA 2018

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Jasa Layanan Umum	13.203.700.750	17.271.437.233	130,81
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	0	4.756.700	0
Pendapatan BLU Lainnya	723.439.624	2.930.286.591	405,05
Jumlah	13.927.140.374	20.206.480.524	145,09

Pada TA 2018, terdapat Pengembalian Pendapatan BLU sebesar Rp225.593.254.767,00. Perbandingan realisasi Pendapatan BLU TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 30
Perbandingan Realisasi Pendapatan BLU Neto
TA 2018 dan TA 2017

Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa Layanan Umum	17.271.437.233	16.373.042.570	898.394.663	5,49
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	4.756.700	4.552.312	204.388	0,00
Pendapatan BLU Lainnya	2.930.286.591	1.473.045.672	1.457.240.919	98,93
Jumlah	20.206.480.524	17.850.640.554	2.355.839.970	13,20

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2018 mencakup 5 (lima) unit satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) yaitu:

1. Pusat Investasi Pemerintah (PIP);
2. Lembaga Penjamin Dana Pendidikan (LPDP);
3. Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN);
4. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
5. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Realisasi Pendapatan BLU Neto berdasarkan satuan kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 31
Realisasi Pendapatan BLU Neto Berdasarkan Satuan Kerja TA 2018

Uraian	Estimasi	Realisasi	(dalam ribuan rupiah)
			%
Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	42.935.354	99.350.802	231,40
Lembaga Penjamin Dana Pendidikan (LPDP)	1.807.750.000	1.839.109.172	101,73
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)	11.507.000.000	15.456.480.417	134,32
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	550.606.020	2.767.629.590	502,65
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)	18.849.000	43.910.542	232,96
Jumlah	13.927.140.374	20.206.480.523	145,09

Pendapatan PIP merupakan Pendapatan Investasi dan Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU, Pendapatan LPDP merupakan pendapatan investasi (deposito dan obligasi), Pendapatan BPDPKS yang terbesar terdiri dari Pendapatan Pungutan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU, Pendapatan LMAN merupakan PNBP dari aktivitas manajemen aset dan PNBP dari jasa layanan perbankan, sedangkan Pendapatan STAN merupakan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan.

Adapun Realisasi Pendapatan BLU per Jenis Pendapatan per Satuan Kerja BLU di lingkungan Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 32
Realisasi Pendapatan BLU per Jenis Satker per Satker BLU TA 2018

Uraian	PIP	LPDP	BPDPKS	LMAN	STAN	Jumlah	(dalam ribuan rupiah)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	31.589.534	1.825.567.843	14.413.921.271	965.866.715	34.709.918	17.271.655.281	
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	0	4.756.700	4.756.700	
Pendapatan BLU Lainnya	67.761.268	13.541.329	1.042.559.146	1.801.762.875	4.443.925	2.930.068.543	
Jumlah	99.350.802	1.839.109.172	15.456.480.417	2.767.629.590	43.910.543	20.206.480.524	

B.1.2. HIBAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Hibah, yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mewakili Pemerintah dalam pencatatan Penerimaan Hibah adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, oleh karena itu di dalam Laporan Keuangan Bagian Anggaran 015 ini tidak ada Penerimaan Hibah.

B.2. BELANJA

*Realisasi
Belanja Rp39,9
Triliun*

Realisasi Belanja neto Kementerian Keuangan TA 2018 adalah sebesar **Rp39.900.468.088.665,00** atau **84,92** persen dari pagu belanja sebesar **Rp46.987.862.720.000,00**. Pada TA 2018 jumlah pengembalian belanja Kementerian Keuangan adalah sebesar **Rp25.307.154.530,00**.

Realisasi Belanja neto pada TA 2018 mengalami penurunan sebesar **Rp484.435.538.241,00** atau **1,20** persen dari realisasi belanja neto pada periode TA 2017 sebesar **Rp40.384.903.626.906,00**. Penurunan belanja terjadi pada Belanja Barang. Hal tersebut terjadi karena berkurangnya Belanja Barang operasional BPDP Kelapa Sawit dalam rangka belanja penyaluran subsidi biodiesel.

Perbandingan antara pagu dan realisasi Belanja Kementerian Keuangan TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut.

Grafik 9
Perbandingan Pagu dan Realisasi Neto Belanja Kementerian Keuangan
TA 2018 dan TA 2017 (Termasuk BLU)

*Perbandingan
Pagu dan
Realisasi
Belanja Neto
Kementerian
Keuangan TA
2018 dan TA
2017*



Tabel 33
Perbandingan Pagu dan Realisasi Neto Belanja Kementerian Keuangan
TA 2018 dan TA 2017 (Termasuk BLU)

Uraian	TA 2018	TA 2017
Pagu	46.987.862.720	42.952.412.288
Realisasi	39.900.468.089	40.384.903.627
Persentase	84,92%	94,02%

B.2.1. Realisasi Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Keuangan. Adapun Belanja Kementerian Keuangan dapat diklasifikasikan berdasarkan Unit Eselon I, Program, dan Jenis Belanja.

Realisasi Belanja Per Eselon I**B.2.1.1. Belanja Kementerian Keuangan Menurut Unit Eselon I**

Realisasi Belanja Kementerian Keuangan TA 2018 dapat dirinci menurut Unit Eselon I sebagaimana dapat dilihat pada tabel. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar adalah pada Sekretariat Jenderal sebesar **Rp19.652.661.489.190,00** atau **49,25** persen dari total realisasi Belanja Kementerian Keuangan.

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja menurut Unit Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 34
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I
TA 2018 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)						
No	Unit Eselon I	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
1	Setjen	20.763.842.227	19.668.089.117	(15.427.627)	19.652.661.489	94,65
2	Itjen	118.341.754	104.830.415	(203.374)	104.627.041	88,41
3	DJA	154.537.430	133.798.783	(468.985)	133.329.798	86,28
4	DJP	7.441.587.985	6.736.325.524	(1.955.836)	6.734.369.688	90,50
5	DJBC	3.754.677.608	3.499.909.068	(1.792.311)	3.498.116.757	93,17
6	DJPK	145.975.618	126.667.253	(768.942)	125.898.311	86,25
7	DJPPR	119.511.382	111.641.136	(76.104)	111.565.032	93,35
8	DJPB	12.682.854.534	7.984.612.173	(256.868)	7.984.355.305	62,95
9	DJKN	872.909.999	744.841.856	(1.769.903)	743.071.953	85,13
10	BPPK	774.327.499	685.875.790	(2.557.580)	683.318.211	88,25
11	BKF	159.296.684	129.184.128	(29.625)	129.154.504	81,08
		Jumlah Belanja	46.987.862.720	39.925.775.243	(25.307.155)	39.900.468.089
						84,92

Adapun perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja menurut Satker BLU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 35
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Satker BLU
TA 2018

(dalam ribuan rupiah)						
No	Eselon I	Satker BLU		Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian
1	Setjen	Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP)		2.351.963.987	2.238.778.945	-
2	DJPB	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)	10.992.000.000	6.364.398.427	-	6.364.398.427
3	DJPB	Pusat Investasi Pemerintah (PIP)		41.547.037	23.864.851	-
4	DJKN	Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)		103.553.000	68.423.287	-
5	BPPK	Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN)		142.481.362	128.863.055	(91.909)
		Jumlah Belanja		13.631.545.386	8.824.328.565	(91.909)
						8.824.236.656
						64,73

Perbandingan pagu dan realisasi Belanja Unit Eselon I TA 2018 (Non BLU) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 36
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I
TA 2018 (Non BLU)

(dalam ribuan rupiah)

No	Unit Eselon I	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
1	Setjen	18.411.878.240	17.429.310.172	(15.427.627)	17.413.882.545	94,58
2	Itjen	118.341.754	104.830.415	(203.374)	104.627.041	88,41
3	DJA	154.537.430	133.798.783	(468.985)	133.329.798	86,28
4	DJP	7.441.587.985	6.736.325.524	(1.955.836)	6.734.369.688	90,50
5	DJBC	3.754.677.608	3.499.909.068	(1.792.311)	3.498.116.757	93,17
6	DJPK	145.975.618	126.667.253	(768.942)	125.898.311	86,25
7	DJPPR	119.511.382	111.641.136	(76.104)	111.565.032	93,35
8	DJPB	1.649.307.497	1.596.348.894	(256.868)	1.596.092.026	96,77
9	DJKN	769.356.999	676.418.570	(1.769.903)	674.648.667	87,69
10	BPPK	631.846.137	557.012.735	(2.465.671)	554.547.064	87,77
11	BKF	159.296.684	129.184.128	(29.625)	129.154.504	81,08
	Jumlah Belanja	33.356.317.334	31.101.446.678	(25.215.246)	31.076.231.433	93,16

Perbandingan antara Realisasi Belanja neto menurut unit Eselon I termasuk satker BLU TA 2018 dan 31 Desember TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 37
Perbandingan Realisasi Belanja Neto Menurut Unit Eselon I
TA 2018 dan TA 2017 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

No	Unit Eselon I	TA 2018	TA 2017	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Setjen	19.652.661.489	16.624.858.156	3.027.803.333	18,21
2	Itjen	104.627.041	94.448.657	10.178.384	10,78
3	DJA	133.329.798	127.813.821	5.515.977	4,32
4	DJP	6.734.369.688	6.234.464.194	499.905.494	8,02
5	DJBC	3.498.116.757	3.212.778.243	285.338.514	8,88
6	DJPK	125.898.311	109.881.084	16.017.227	14,58
7	DJPPR	111.565.032	105.668.761	5.896.271	5,58
8	DJPB	7.984.355.305	12.419.880.567	(4.435.525.262)	(35,71)
9	DJKN	743.071.953	672.835.492	70.236.461	10,44
10	BPPK	683.318.211	650.125.132	33.193.079	5,11
11	BKF	129.154.504	132.149.520	(2.995.016)	(2,27)
	Jumlah Belanja	39.900.468.089	40.384.903.627	(484.435.538)	(1,20)

Perbandingan realisasi Belanja neto per satker BLU TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 38
Perbandingan Realisasi Belanja Neto Satker BLU
TA 2018 dan TA 2017

(dalam ribuan rupiah)						
No	Eselon I	Satker BLU	TA 2018	TA 2017	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Setjen	Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP)	2.238.778.945	2.603.137.220	(364.358.275)	(14,00)
2	Setjen	Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	-	7.604.756	(7.604.756)	(100,00)
3	DJPB	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)	6.364.398.427	10.689.717.970	(4.325.319.543)	(40,46)
4	DJPB	Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	23.864.851	-	23.864.851	-
5	DJKN	Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	68.423.287	35.438.860	32.984.427	93,07
6	BPPK	Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN)	128.771.146	134.824.317	(6.053.171)	(4,49)
Jumlah Belanja			8.824.236.656	13.470.723.123	(4.646.486.467)	(34,49)

Pada TA 2018, BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menjadi satuan kerja di bawah koordinasi Eselon I DJPB. Adapun pada tahun sebelumnya PIP masih menjadi satuan kerja di bawah eselon I Sekretariat Jenderal.

B.2.1.2. Belanja Kementerian Keuangan Menurut Program

*Realisasi
Belanja Neto TA
2018 Menurut
Program*

Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018 menurut Program dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 39
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program
TA 2018

(dalam ribuan rupiah)			
Uraian	Pagu	Realisasi Neto	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	20.763.842.227	19.652.661.489	94,65
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	118.341.754	104.627.041	88,41
Pengelolaan Anggaran Negara	154.537.430	133.329.798	86,28
Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	7.441.587.985	6.734.369.688	90,50
Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3.754.677.608	3.498.116.757	93,17
Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	145.975.618	125.898.311	86,25
Pengelolaan dan Pembiayaan Utang	119.511.382	111.565.032	93,35
Pengelolaan Perbendaharaan Negara	12.682.854.534	7.984.355.305	62,95
Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	872.909.999	743.071.953	85,13
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan	774.327.499	683.318.211	88,25
Perumusan Kebijakan Fiskal	159.296.684	129.154.504	81,08
Jumlah Belanja	46.987.862.720	39.900.468.089	84,92

B.2.1.3. Belanja Kementerian Keuangan Menurut Jenis Belanja

*Realisasi
Belanja Neto TA
2018 Menurut
Jenis Belanja*

Belanja Kementerian Keuangan menurut Jenis Belanja terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 40
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
TA 2018 (Termasuk BLU)

Uraian	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	(dalam ribuan rupiah) %
Belanja Pegawai	20.908.396.593	20.372.596.733	(11.320.563)	20.361.276.170	97,38
Belanja Barang	23.757.374.945	17.758.177.220	(13.807.803)	17.744.369.417	74,69
Belanja Modal	2.322.091.182	1.795.001.290	(178.788)	1.794.822.502	77,29
Jumlah Belanja	46.987.862.720	39.925.775.243	(25.307.154)	39.900.468.089	84,92

Perbandingan pagu dan realisasi Belanja menurut Jenis Belanja Kementerian Keuangan baik satker BLU maupun Non BLU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 41
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
TA 2018 (Termasuk BLU)

Uraian	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	(dalam ribuan rupiah) %
Belanja Pegawai Non BLU	20.894.554.110	20.359.129.338	(11.299.896)	20.347.829.442	97,38
Belanja Pegawai BLU	13.842.483	13.467.395	(20.667)	13.446.728	97,14
Belanja Barang Non BLU	10.188.314.969	8.972.679.791	(13.736.561)	8.958.943.230	87,93
Belanja Barang BLU	13.569.059.976	8.785.497.429	(71.242)	8.785.426.187	64,75
Belanja Modal Non BLU	2.273.448.255	1.769.637.549	(178.788)	1.769.458.761	77,83
Belanja Modal BLU	48.642.927	25.363.741	-	25.363.741	52,14
Jumlah Belanja	46.987.862.720	39.925.775.243	(25.307.154)	39.900.468.089	84,92

Adapun perbandingan pagu dan realisasi Belanja menurut Jenis Belanja per satker BLU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 42
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Satker BLU Menurut Jenis Belanja
TA 2018

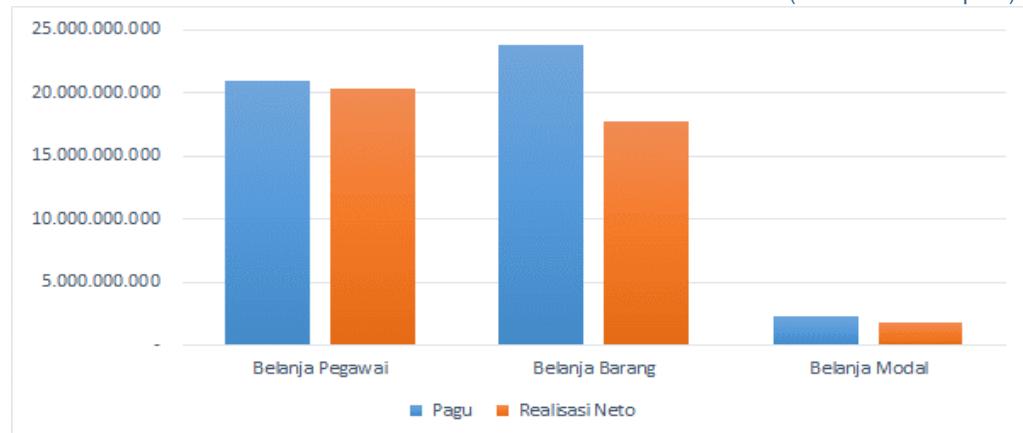
No	Eselon I	Satker BLU	Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal	
			Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	Setjen	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	-	-	2.343.699.437	2.231.660.045	8.264.550	7.118.900
2	DJPB	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	-	-	10.991.355.000	6.363.767.078	645.000	631.349
3	DJPB	Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	294.480	-	40.700.677	23.368.269	551.880	496.582
4	DJKN	Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	-	-	79.730.228	66.473.483	23.822.772	1.949.803
5	BPPK	Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN)	13.548.003	13.446.728	113.574.634	100.157.312	15.358.725	15.167.107
Jumlah Belanja			13.842.483	13.446.728	13.569.059.976	8.785.426.187	48.642.927	25.363.741

Beberapa satker BLU tidak memiliki Belanja Pegawai diantaranya LPDP, BPDPKS, dan LMAN karena Belanja Pegawai PNS dibiayai oleh satker kantor pusat unit eselon I satker BLU dan Belanja Gaji non PNS dibiayai dari akun Belanja Barang.

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja berdasarkan Jenis Belanja untuk TA 2018 dapat dilihat pada grafik berikut.

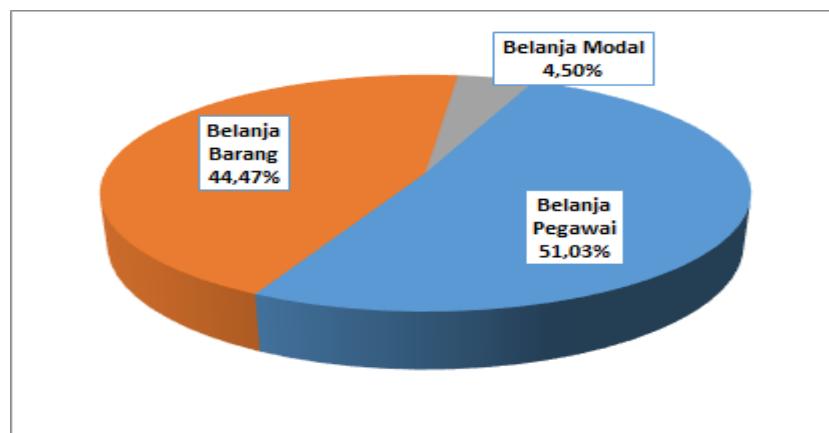
Grafik 10
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
TA 2018 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)



Komposisi Realisasi Belanja berdasarkan Jenis Belanja untuk TA 2018 juga dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 11
Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
TA 2018 (Termasuk BLU)



Perbandingan Realisasi Belanja Kementerian Keuangan menurut Jenis Belanja untuk TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 43
Perbandingan Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja (Termasuk BLU)
TA 2018 dan TA 2017

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja Pegawai	20.361.276.170	17.284.051.723	3.077.224.446	17,80
Belanja Barang	17.744.369.417	21.960.137.443	(4.215.768.025)	(19,20)
Belanja Modal	1.794.822.502	1.140.714.461	654.108.041	57,34
Jumlah Belanja	39.900.468.089	40.384.903.627	(484.435.538)	(1,20)

B.3. Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp20,36 Triliun*

Realisasi Belanja Pegawai Neto TA 2018 adalah sebesar Rp20.361.276.169.469,00 atau 97,38 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2018 sebesar Rp20.908.396.593.000,00 dan jumlah Pengembalian Belanja Pegawai pada TA 2018 adalah sebesar Rp11.320.563.781,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2017, realisasi Belanja Pegawai TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp3.077.224.446.433,00 atau 17,08 persen. Adapun realisasi Belanja Pegawai pada TA 2017 adalah sebesar Rp17.284.051.723.036,00.

Kenaikan Belanja Pegawai pada TA 2018 disebabkan antara lain:

1. Terdapat penerimaan pegawai baru dan widyaiswara pada TA 2018.
2. Peningkatan belanja gaji dan tunjangan Pejabat Negara dengan penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 16 Tahun 2018 pada Sekretariat Pengadilan Pajak.
3. Peningkatan tunjangan kinerja pegawai karena kenaikan *grade* reguler.

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 termasuk satker BLU dapat dilihat pada tabel berikut.

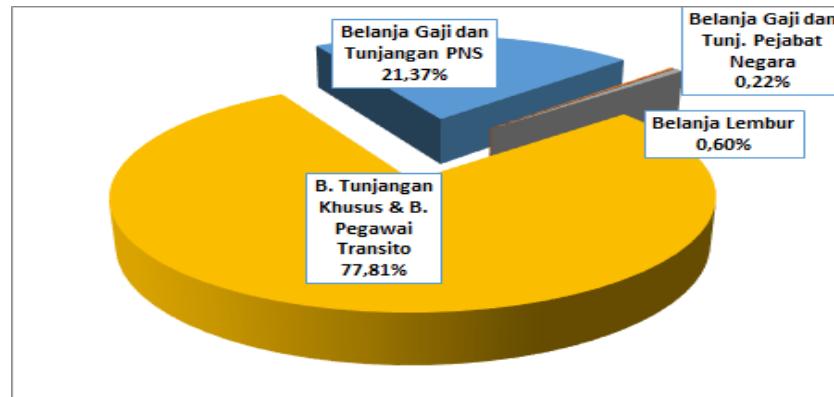
Tabel 44
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2018 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.507.101.345	4.352.958.627	(1.010.359)	4.351.948.268	96,56
Belanja Gaji dan Tunj. Pejabat Negara	44.013.634	44.000.104	(1.300)	43.998.804	99,97
Belanja Lembur	157.320.841	122.571.955	(36.578)	122.535.377	77,89
B. Tunjangan Khusus & B. Pegawai Transito	16.199.960.773	15.853.066.048	(10.272.327)	15.842.793.721	97,80
Jumlah Belanja	20.908.396.593	20.372.596.734	(11.320.564)	20.361.276.170	97,38

Komposisi Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 12
Komposisi Realisasi Belanja Pegawai
TA 2018



Perbandingan antara realisasi Belanja Pegawai termasuk satker BLU TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 45
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Neto
TA 2018 dan TA 2017 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.351.948.268	4.146.683.237	205.265.031	4,95
Belanja Gaji dan Tunj. Pejabat Negara	43.998.804	34.780.831	9.217.973	26,50
Belanja Lembur	122.535.377	145.706.643	(23.171.266)	(15,90)
B. Tunjangan Khusus & B. Pegawai Transito	15.842.793.721	12.956.881.012	2.885.912.709	22,27
Jumlah Belanja	20.361.276.170	17.284.051.723	3.077.224.447	17,80

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai per Unit Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 46
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Per Eselon I
TA 2018 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

No	Unit Eselon I	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
1	Setjen Non BLU	16.452.243.310	16.045.672.687	(10.339.166)	16.035.333.521	97,47
	Setjen BLU	-	-	-	-	-
2	Itjen	44.805.237	43.553.856	(51.802)	43.502.054	97,09
3	DJA	62.917.733	59.723.389	(2.420)	59.720.969	94,92
4	DJP	2.473.721.820	2.400.963.909	(443.478)	2.400.520.431	97,04
5	DJBC	887.580.295	863.047.146	(240.461)	862.806.685	97,21
6	DJPK	34.749.826	32.836.097	(11.000)	32.825.097	94,46
7	DJPPR	30.656.597	30.457.309	(7.680)	30.449.629	99,32
8	DJPB Non BLU	546.769.130	539.803.417	(90.286)	539.713.131	98,71
	DJPB BLU	294.480	-	-	-	-
9	DJKN Non BLU	252.831.374	238.583.038	(59.376)	238.523.662	94,34
	DJKN BLU	-	-	-	-	-
10	BPPK Non BLU	72.124.831	69.781.027	(34.742)	69.746.285	96,70
	BPPK BLU	13.548.003	13.467.395	(20.667)	13.446.728	99,25
11	BKF	36.153.957	34.707.464	(19.486)	34.687.978	95,95
	Jumlah Belanja	20.908.396.593	20.372.596.734	(11.320.564)	20.361.276.170	97,38

Beberapa satker BLU tidak memiliki Belanja Pegawai diantaranya LPDP (Setjen), BPDPKS (DJPB), dan LMAN (DJKN) karena Belanja Pegawai PNS dibiayai oleh satker kantor pusat unit eselon I satker BLU dan Belanja Gaji non PNS dibiayai dari akun Belanja Barang. Adapun pagu Belanja Pegawai pada DJPB BLU berasal dari satker BLU PIP yang merupakan Uang Lembur.

B.4. Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp17,74 Triliun*

Realisasi Belanja Barang Neto TA 2018 adalah sebesar [Rp17.744.369.417.285,00](#) yang berarti 74,69 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2018 sebesar [Rp23.757.374.945.000,00](#) dan jumlah Pengembalian Belanja Barang TA 2018 adalah sebesar [Rp13.807.802.499,00](#). Apabila dibandingkan dengan TA 2017, realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami penurunan sebesar [Rp4.215.768.025.452,00](#) atau 19,20 persen. Adapun realisasi Belanja Barang TA 2017 adalah sebesar [Rp21.960.137.442.737,00](#).

Penurunan realisasi Belanja Barang TA 2018 disebabkan antara lain:

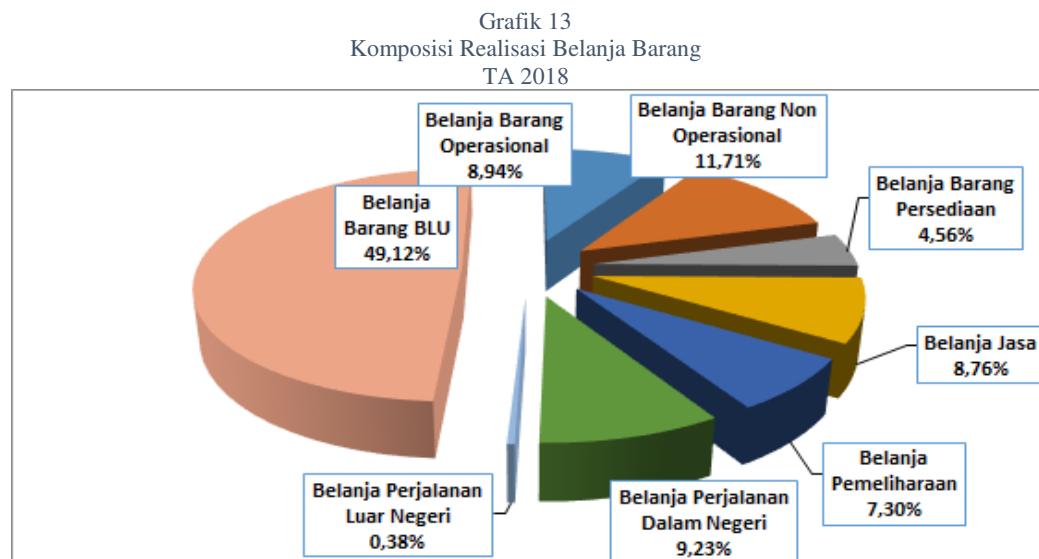
1. Berkurangnya Belanja Barang operasional BPDP Kelapa Sawit dalam rangka belanja penyaluran subsidi biodiesel.
2. Belanja Jasa untuk pembayaran jasa lainnya (imbalan jasa bank/pos persepsi) pada DJPB telah dialihkan pembayarannya ke BA BUN.
3. Adanya implementasi Instruksi Menteri Keuangan nomor 346/MK.01/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Gerakan Efisiensi Dalam Rangka Penguatan Budaya Kementerian Keuangan.

Perbandingan pagu dan realisasi Belanja Barang termasuk satker BLU TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 47
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang
TA 2018 (Termasuk BLU)

Uraian	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	(dalam ribuan rupiah) %
Belanja Barang Operasional	1.702.462.106	1.586.047.681	(313.064)	1.585.734.617	93,14
Belanja Barang Non Operasional	2.392.214.564	2.079.224.274	(854.806)	2.078.369.468	86,88
Belanja Barang Persediaan	860.551.467	809.033.856	(27.232)	809.006.624	94,01
Belanja Jasa	1.944.206.770	1.554.947.628	(327.228)	1.554.620.400	79,96
Belanja Pemeliharaan	1.410.578.571	1.294.719.719	(173.591)	1.294.546.128	91,77
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.879.230.958	1.647.428.766	(9.458.776)	1.637.969.990	87,16
Belanja Perjalanan Luar Negeri	81.364.983	70.636.272	(2.649.373)	67.986.899	83,56
Belanja Barang BLU	13.486.765.526	8.716.139.024	(3.733)	8.716.135.291	64,63
Jumlah Belanja	23.757.374.945	17.758.177.220	(13.807.803)	17.744.369.417	74,69

Komposisi Belanja Barang TA 2018 dapat dilihat dalam grafik.



Perbandingan antara Realisasi Belanja Barang termasuk satker BLU TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 48
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Neto
TA 2018 dan TA 2017 (Termasuk BLU)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	(dalam ribuan rupiah) %
Belanja Barang Operasional	1.585.734.617	2.170.998.615	(585.263.998)	(26,96)
Belanja Barang Non Operasional	2.078.369.468	1.351.219.431	727.150.037	53,81
Belanja Barang Persediaan	809.006.624	736.258.890	72.747.734	9,88
Belanja Jasa	1.554.620.400	1.479.805.376	74.815.024	5,06
Belanja Pemeliharaan	1.294.546.128	1.270.593.610	23.952.518	1,89
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.637.969.990	1.519.388.942	118.581.049	7,80
Belanja Perjalanan Luar Negeri	67.986.899	69.484.562	(1.497.663)	(2,16)
Belanja Barang BLU	8.716.135.291	13.362.388.017	(4.646.252.726)	(34,77)
Jumlah Belanja	17.744.369.417	21.960.137.443	(4.215.768.025)	(19,20)

Perbandingan pagu dan realisasi Belanja Barang per unit eselon I termasuk pada satker BLU dan Non BLU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 49
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang Per Eselon I
TA 2018 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

No	Unit Eselon I	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
1	Setjen Non BLU	1.781.181.426	1.228.418.705	(4.994.891)	1.223.423.814	68,69
	Setjen BLU	2.343.699.437	2.231.660.045	-	2.231.660.045	95,22
2	Itjen	64.586.848	53.148.382	(151.571)	52.996.811	82,06
3	DJA	71.878.425	55.893.251	(466.566)	55.426.685	77,11
4	DJP	3.991.228.444	3.793.857.262	(1.502.890)	3.792.354.372	95,02
5	DJBC	2.421.223.401	2.216.914.577	(1.492.084)	2.215.422.493	91,50
6	DJPK	87.201.906	70.812.034	(757.943)	70.054.091	80,34
7	DJPPR	78.803.172	71.243.865	(68.423)	71.175.442	90,32
8	DJPB Non BLU	702.655.062	659.252.576	(150.598)	659.101.978	93,80
	DJPB BLU	11.032.055.677	6.387.135.347	-	6.387.135.347	57,90
9	DJKN Non BLU	409.623.802	339.813.098	(1.710.527)	338.102.571	82,54
	DJKN BLU	79.730.228	66.473.483	-	66.473.483	83,37
10	BPPK Non BLU	468.969.586	400.553.803	(2.430.930)	398.122.873	84,89
	BPPK BLU	113.574.634	100.228.553	(71.241)	100.157.312	88,19
11	BKF	110.962.897	82.772.239	(10.139)	82.762.100	74,59
	Jumlah Belanja	23.757.374.945	17.758.177.220	(13.807.803)	17.744.369.417	74,69

Perbandingan pagu dan realisasi Belanja Barang per Unit Eselon I termasuk satker BLU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 50
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Neto Per Eselon I
TA 2018 dengan TA 2017 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

No	Unit Eselon I	TA 2018	TA 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Setjen Non BLU	1.223.423.814	782.352.209	441.071.605	56,38
	Setjen BLU	2.231.660.045	2.609.676.553	(378.016.508)	(14,49)
2	Itjen	52.996.811	48.634.932	4.361.879	8,97
3	DJA	55.426.685	58.980.500	(3.553.815)	(6,03)
4	DJP	3.792.354.372	3.621.582.601	170.771.771	4,72
5	DJBC	2.215.422.493	2.035.762.240	179.660.253	8,83
6	DJPK	70.054.091	61.653.760	8.400.331	13,63
7	DJPPR	71.175.442	64.532.191	6.643.251	10,29
8	DJPB Non BLU	659.101.978	1.069.439.135	(410.337.157)	(38,37)
	DJPB BLU	6.387.135.347	10.687.894.003	(4.300.758.656)	(40,24)
9	DJKN Non BLU	338.102.571	318.608.541	19.494.030	6,12
	DJKN BLU	66.473.483	32.664.616	33.808.867	103,50
10	BPPK Non BLU	398.122.873	385.552.660	12.570.213	3,26
	BPPK BLU	100.157.312	100.234.688	(77.376)	(0,08)
11	BKF	82.762.100	82.568.814	193.286	0,23
	Jumlah Belanja	17.744.369.417	21.960.137.443	(4.215.768.025)	(19,20)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Barang BLU DJPB oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP Kelapa Sawit) turun signifikan karena berkurangnya belanja operasional BPDP Kelapa Sawit untuk biodiesel pada TA 2018.

Belanja Barang BLU DJPB senilai [Rp6.387.135.347.203](#), termasuk didalamnya Belanja Barang BLU BPDPKS senilai [Rp6.363.767.077.756,00](#).

Atas Belanja Barang BLU BPDPKS terdapat Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit senilai [Rp6.276.885.963.449,00](#). Dalam belanja tersebut terdapat realisasi Belanja Barang Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) pada BPDPKS yang ditransfer kepada pekebun atau kelompok tani senilai [Rp315.155.072.500,00](#). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, masih terdapat saldo dana pada rekening kelompok tani sebesar [Rp234.033.229.873,46](#) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51
Belanja Barang Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) pada BPDPKS
TA 2018 dengan TA 2017 (Termasuk BLU)

(dalam rupiah)

No	Jumlah Kelompok Tani	Tahun Penyaluran Dana PPKS	Nilai Transfer Dana PPKS oleh BPDPKS	Saldo Rekening Escrow (Penampungan) per 31 Desember 2018
1	46	2018	315.155.072.500,00	211.189.613.371,46
2	6	2017	73.495.210.000,00	22.843.616.502,00
Jumlah			388.650.282.500,00	234.033.229.873,46

B.5. Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp1,79 Triliun*

Realisasi Belanja Modal Neto Kementerian Keuangan TA 2018 adalah sebesar [Rp1.794.822.501.911,00](#) yang berarti [77,29](#) persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2018 sebesar [Rp2.322.091.182.000,00](#) dan jumlah Pengembalian Belanja Modal TA 2018 adalah sebesar [Rp178.788.250,00](#). Apabila dibandingkan dengan TA 2017, realisasi Belanja Modal TA 2018 mengalami kenaikan sebesar [Rp654.108.040.778,00](#) atau [57,34](#) persen. Adapun realisasi Belanja Modal TA 2017 sebesar [Rp1.140.714.461.133,00](#).

Kenaikan realisasi Belanja Modal TA 2018 disebabkan antara lain:

1. Adanya realisasi Belanja Modal Tanah pada satker Kanwil DJPB Provinsi Kaimantan Utara dan KPPN Kutacane.
2. Terdapat pembangunan dan renovasi gedung pada terdapat pembangunan gedung dan bangunan pada Satker Balai Diklat Pekanbaru, Kantor Pusat DJPB, Kanwil DJPB Provinsi Kepri, KPPN Samarinda dan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara).
3. Terdapat pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas perkantoran, kendaraan bermotor, dan buku perpustakaan pada PKN STAN dan Sekretariat BPPK.
4. Terdapat realisasi Belanja Modal untuk pengembangan aplikasi SAKTI dam MPN G-2.
5. Pada Sekretariat Jenderal terdapat penggantian Generator Set untuk Gedung Radius Prawiro dan Gedung Sumitro Djojohadikusumo, pengadaan perangkat *All Flash Storage*, perangkat infrastruktur jaringan Kemenkeu, perangkat TIK DC dan DRC Kemenkeu di Pusintek, dan pengadaan

kendaraan dinas pada Sekretariat Pengadilan Pajak dan Kantor Pusat Setjen.

6. Pengadaan videotron, kendaraan operasional, *access control*, CCTV, dan peremajaan *data storage* dan *server* pada DJA..

Perbandingan pagu dan realisasi Belanja Modal termasuk satker BLU TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

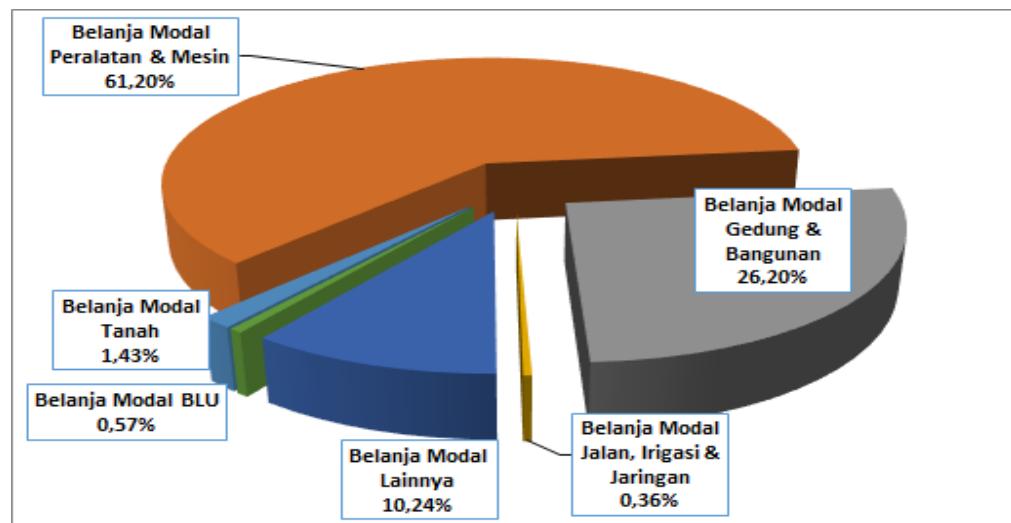
Tabel 52
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Modal
TA 2018 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
Belanja Modal Tanah	27.452.334	25.715.169	-	25.715.169	93,67
Belanja Modal Peralatan & Mesin	1.151.888.470	1.098.657.004	(173.347)	1.098.483.657	95,36
Belanja Modal Gedung & Bangunan	506.696.452	470.232.686	(5.441)	470.227.245	92,80
Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	6.483.019	6.371.710	-	6.371.710	98,28
Belanja Modal Lainnya	596.286.705	183.828.087	-	183.828.087	30,83
Belanja Modal BLU	33.284.202	10.196.634	-	10.196.634	30,64
Jumlah Belanja	2.322.091.182	1.795.001.290	(178.788)	1.794.822.502	77,29

Komposisi Belanja Modal termasuk satker BLU TA 2018 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 14
Komposisi Belanja Modal
TA 2018 (Termasuk BLU)



Perbandingan antara Realisasi Belanja Modal termasuk satker BLU TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 53
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Neto
TA 2018 dan TA 2017 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja Modal Tanah	25.715.169	1.484.524	24.230.645	1.632,22
Belanja Modal Peralatan & Mesin	1.098.483.657	709.908.410	388.575.247	54,74
Belanja Modal Gedung & Bangunan	470.227.245	329.391.630	140.835.615	42,76
Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	6.371.710	7.948.276	(1.576.566)	(19,84)
Belanja Modal Lainnya	183.828.087	81.013.183	102.814.904	126,91
Belanja Modal BLU	10.196.634	10.968.438	(771.804)	(7,04)
Jumlah Belanja	1.794.822.502	1.140.714.461	654.108.041	57,34

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per Unit Eselon I TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 54
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Neto Per Eselon I
TA 2018 dan TA 2017 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

No	Unit Eselon I	TA 2018	TA 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Setjen Non BLU	155.125.209	102.573.757	52.551.452	51,23
	Setjen BLU	7.118.900	780.054	6.338.846	812,62
2	Itjen	8.128.177	4.328.772	3.799.405	87,77
3	DJA	18.182.144	9.572.316	8.609.828	89,95
4	DJP	541.494.885	311.070.394	230.424.491	74,07
5	DJBC	419.887.578	375.369.821	44.517.757	11,86
6	DJPK	23.019.123	19.551.285	3.467.838	17,74
7	DJPPR	9.939.962	11.829.664	(1.889.702)	(15,97)
8	DJPB Non BLU	397.276.917	105.871.148	291.405.769	275,25
	DJPB BLU	1.127.931	1.823.967	(696.036)	(38,16)
9	DJKN Non BLU	98.022.434	93.284.846	4.737.588	5,08
	DJKN BLU	1.949.804	2.774.243	(824.439)	(29,72)
10	BPPK Non BLU	86.677.906	63.987.173	22.690.733	35,46
	BPPK BLU	15.167.107	21.630.238	(6.463.131)	(29,88)
11	BKF	11.704.425	16.266.783	(4.562.358)	(28,05)
	Jumlah Belanja	1.794.822.502	1.140.714.461	654.108.041	57,34

Perbandingan pagu dan realisasi Belanja Modal per unit eselon I satker BLU dan Non BLU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 55
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Modal
TA 2018 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

No	Unit Eselon I	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
1	Setjen Non BLU	178.453.504	155.218.779	(93.570)	155.125.209	86,93
	Setjen BLU	8.264.550	7.118.900	-	7.118.900	86,14
2	Itjen	8.949.669	8.128.177	-	8.128.177	90,82
3	DJA	19.741.272	18.182.144	-	18.182.144	92,10
4	DJP	976.637.721	541.504.353	(9.468)	541.494.885	55,44
5	DJBC	445.873.912	419.947.344	(59.766)	419.887.578	94,17
6	DJPK	24.023.886	23.019.123	-	23.019.123	95,82
7	DJPPR	10.051.613	9.939.962	-	9.939.962	98,89
8	DJPB Non BLU	399.883.305	397.292.901	(15.984)	397.276.917	99,35
	DJPB BLU	1.196.880	1.127.931	-	1.127.931	94,24
9	DJKN Non BLU	106.901.823	98.022.434	-	98.022.434	91,69
	DJKN BLU	23.822.772	1.949.804	-	1.949.804	8,18
10	BPPK Non BLU	90.751.720	86.677.906	-	86.677.906	95,51
	BPPK BLU	15.358.725	15.167.107	-	15.167.107	98,75
11	BKF	12.179.830	11.704.425	-	11.704.425	96,10
	Jumlah Belanja	2.322.091.182	1.795.001.290	(178.788)	1.794.822.502	77,29

B.5.1. Belanja Modal Tanah

*Belanja Modal
Tanah Rp25,71
Miliar*

Realisasi Belanja Modal Tanah Neto TA 2018 adalah sebesar **Rp25.715.168.720,00** yang berarti **93,67** persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2018 sebesar **Rp27.452.334.000,00**. Apabila dibandingkan dengan TA 2017, realisasi Belanja Modal TA 2018 mengalami kenaikan sebesar **Rp24.230.645.170,00** atau **1.632,22** persen. Kenaikan ini disebabkan adanya realisasi pembelian tanah pada KPPN Kutacane dan Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Utara.

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp1,09
Triliun*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Neto TA 2018 adalah sebesar **Rp1.098.483.657.722,00** yang berarti **95,36** persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2018 sebesar **Rp1.151.888.470.000,00**. Apabila dibandingkan dengan TA 2017, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 mengalami kenaikan sebesar **Rp388.575.247.545,00** atau **54,74** persen.

Kenaikan belanja peralatan dan mesin disebabkan antara lain:

1. Terdapat pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas perkantoran, dan kendaraan bermotor pada PKN STAN dan Sekretariat BPPK.
2. Pada Sekretariat Jenderal terdapat penggantian *Generator Set* untuk Gedung Radius Prawiro dan Gedung Sumitro Djojohadikusumo, pengadaan perangkat *All Flash Storage*, perangkat infrastruktur jaringan Kemenkeu, perangkat TIK DC dan DRC Kemenkeu di Pusintek, dan pengadaan

- kendaraan dinas pada Sekretariat Pengadilan Pajak dan Kantor Pusat Setjen.
3. Pengadaan videotron, kendaraan operasional, access control, CCTV, dan peremajaan data storage dan server pada DJA.

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Rp470,22 Miliar*

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Neto TA 2018 adalah sebesar **Rp470.227.244.191,00** yang berarti **92,80** persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2018 sebesar **Rp506.696.452.000,00**. Apabila dibandingkan dengan TA 2017, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 mengalami kenaikan sebesar **Rp140.835.613.693,00** atau **42,76** persen. Kenaikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan terjadi antara lain karena terdapat pembangunan gedung pada BDK Pekanbaru, Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Riau, KPPN Samarinda dan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp6,37 Miliar*

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Neto TA 2018 adalah sebesar **Rp6.371.710.110,00** yang berarti **98,28** persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2018 sebesar **Rp6.483.019.000,00**. Apabila dibandingkan dengan TA 2017, realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2018 mengalami penurunan sebesar **Rp1.576.565.723,00** atau **19,84** persen. Penurunan tersebut disebabkan karena pembangunan jaringan dan penambahan irigasi pada DJBC dan BPPK telah selesai pada tahun sebelumnya.

B.5.5. Belanja Modal Lainnya

*Belanja Modal Lainnya
Rp183,82 Miliar*

Realisasi Belanja Modal Lainnya Neto TA 2018 adalah sebesar **Rp183.828.086.728,00** yang berarti **30,83** persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2018 sebesar **Rp596.286.705.000,00**. Apabila dibandingkan dengan TA 2017, realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2018 mengalami kenaikan sebesar **Rp102.814.903.826,00** atau **126,91** persen. Kenaikan Belanja Modal Lainnya disebabkan antara lain karena pengadaan software dan lisensi untuk keperluan perkantoran, pengembangan aplikasi SAKTI dan MPN G-2, dan pengadaan buku perpustakaan pada BPPK.

B.5.6. Belanja Modal BLU

Belanja Modal BLU Rp10,19 Miliar

Realisasi Belanja Modal BLU Neto TA 2018 adalah sebesar **Rp10.196.634.440,00** yang berarti **30,64** persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2018 sebesar **Rp33.284.202.000,00**. Apabila dibandingkan dengan TA 2017, realisasi Belanja Modal BLU TA 2018 mengalami penurunan sebesar **Rp771.803.733,00** atau **7,04** persen. Penurunan Belanja Modal BLU dikarenakan adanya kendala dalam proses pengadaan renovasi gedung dan bangunan kantor LMAN.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar
Rp64,14 Triliun.*

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar **Rp64.144.482.579.394,00** dan **Rp43.024.840.981.282,00** atau naik sebesar **Rp21.119.641.598.112,00**. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 56
Aset Lancar
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan (Penurunan)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.313.040	2.533.211	(220.171)	(8,69)
Kas di Bendahara Penerimaan	3.658.058	6.330.716	(2.672.658)	(42,22)
Kas Lainnya dan Setara Kas	363.024.058	471.927.362	(108.903.304)	(23,08)
Kas pada Badan Layanan Umum	22.717.545.215	5.098.913.847	17.618.631.368	345,54
Investasi Jangka Pendek BLU	2.592.473.339	8.730.956.109	(6.138.482.770)	(70,31)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	403.999.654	436.912.535	(32.912.881)	(7,53)
Uang muka belanja (prepayment)	3.191.964	3.251.679	(59.715)	(1,84)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	547.460.257	265.793.510	281.666.747	105,97
Piutang Perpajakan (Netto)	36.989.612.360	27.572.433.856	9.417.178.504	34,15
Piutang Bukan Pajak (Netto)	60.492.573	9.909.793	50.582.780	510,43
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)	237.994	325.991	(87.997)	(26,99)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)	91.851.435	48.887.673	42.963.762	87,88
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)	79.604	-	79.604	-
Persediaan	368.496.708	376.664.699	(8.167.991)	(2,17)
Jumlah	64.144.436.259	43.024.840.981	21.119.595.278	49,09

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp2,3 Miliar*

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Keuangan per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar **Rp2.313.040.226,00** dan **Rp2.533.211.245,00**, turun sebesar **Rp220.171.019,00** dari tahun sebelumnya.

Rincian posisi Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 57
Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	(dalam ribuan rupiah) %
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.175.223	1.882.768	292.455	15,53
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	137.817	650.443	(512.626)	(78,81)
Jumlah	2.313.040	2.533.211	(220.171)	(8,69)

Atas Kas di Bendahara Pengeluaran sisa UP senilai Rp2.175.223.153,00 tersebut telah disetor ke kas negara sebesar Rp91.584.835,00, senilai Rp1.789.405.873,00 diperhitungkan dengan UP Tahun Anggaran 2019, dan sisanya senilai Rp294.232.445,00 merupakan saldo kas untuk keperluan transaksi *VAT Refund For Tourist* pada Kantor Pelayanan Pajak. Atas Kas di Bendahara Pengeluaran sisa TUP senilai Rp137.817.073,00 seluruhnya telah disetor ke kas negara.

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada per unit eselon I disajikan pada lampiran.

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp3,66 Miliar*

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp3.658.057.948,00 dan Rp6.330.715.641,00, turun sebesar Rp2.672.657.693,00 dari tahun sebelumnya. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Perpajakan. Penurunan signifikan sebesar Rp3.025.294.904,00 berasal dari unit eselon I DJBC.

Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada per unit eselon I disajikan pada lampiran.

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp363 Miliar*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp363.024.058.349,00 dan Rp471.927.362.187,00, turun sebesar Rp108.903.303.838,00 dari tahun sebelumnya. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas pada bendahara penerimaan yang bukan merupakan pendapatan satker, dan kas lainnya di BLU.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut.

Tabel 58
Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/(Penurunan)	(dalam ribuan rupiah) %
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	63.280.335	64.052.187	(771.852)	(1,21)
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	296.211.335	405.081.367	(108.870.032)	(26,88)
Kas Lainnya di BLU	3.532.388	2.793.808	738.580	26,44
Jumlah	363.024.058	471.927.362	(108.903.304)	(23,08)

Rincian Kas Lainnya di BLU per unit BLU disajikan sebagai berikut.

Tabel 59
Perbandingan Rincian Kas Lainnya di BLU
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/(Penurunan)	(dalam ribuan rupiah) %
PIP	-	2.304	(2.304)	(100,00)
BPDPKS	708.489	-	708.489	-
LMAN	2.823.899	925.871	1.898.028	205,00
STAN	-	1.865.633	(1.865.633)	(100,00)
Jumlah	3.532.388	2.793.808	738.580	26,44

Rincian atas Kas Lainnya dan Setara Kas pada unit eselon I disajikan dalam lampiran.

C.1.4. Kas pada Badan Layanan Umum

*Kas pada BLU
Rp22,72 Triliun*

Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp22.717.545.215.069,00 dan Rp5.098.913.847.342,00, naik sebesar Rp17.618.631.367.727,00 dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 60
Perbandingan Kas pada BLU
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/(Penurunan)	(dalam ribuan rupiah) %
Kas dan Bank - BLU	1.459.447.243	1.482.913.847	(23.466.604)	(1,58)
Setara kas Lainnya - BLU	21.258.097.972	3.616.000.000	17.642.097.972	487,89
Jumlah	22.717.545.215	5.098.913.847	17.618.631.368	345,54

Kas dan Bank – BLU merupakan kas yang dimiliki BLU untuk melakukan kegiatan operasionalnya pada PIP, LPDP, BPDPKS, LMAN, dan PKN STAN.

Rincian kas pada BLU per unit BLU disajikan sebagai berikut.

Tabel 61
Rincian kas pada BLU per unit BLU
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/(Penurunan)	%
PIP	245.805.093	170.319.143	75.485.950	44,32
LPDP	104.356.341	503.653.136	(399.296.795)	(79,28)
BPDPKS	20.922.093.871	3.186.919.096	17.735.174.775	556,50
LMAN	1.345.865.104	1.151.641.793	194.223.311	16,86
STAN	99.424.806	86.380.679	13.044.127	15,10
Jumlah	22.717.545.215	5.098.913.847	17.618.631.368	345,54

Rincian atas Kas di BLU pada unit eselon I disajikan dalam lampiran.

C.1.5. Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum

*Investasi Jangka Pendek BLU
Rp2,6 Miliar*

Investasi Jangka Pendek pada BLU per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp2.592.473.339.265,00 dan Rp8.730.956.109.060,00, turun sebesar Rp6.138.482.769.795,00 dari tahun sebelumnya. Nilai ini merupakan deposito yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.

Rincian Investasi Jangka Pendek pada BLU disajikan sebagai berikut.

Tabel 62
Perbandingan Rincian Investasi Jangka Pendek BLU
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/(Penurunan)	%
Deposito - BLU	2.592.473.339	8.730.956.109	(6.138.482.770)	(70,31)
Jumlah	2.592.473.339	8.730.956.109	(6.138.482.770)	(70,31)

Rincian atas Investasi Jangka Pendek pada BLU per unit BLU disajikan sebagai berikut.

Tabel 63
Rincian Investasi Jangka Pendek pada BLU per unit BLU
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/(Penurunan)	%
LPDP	0	372.977	(372.977)	(100,00)
BPDPKS	0	8.643.092.785	(8.643.092.785)	(100,00)
LMAN	2.592.473.339	87.490.347	2.504.982.992	2.863,15
Jumlah	2.592.473.339	87.490.347	2.504.982.992	2.863,15
Jumlah	2.592.473.339	8.730.956.109	(6.138.482.770)	(70,31)

Penurunan Investasi Jangka Pendek pada BPDPKS terjadi karena pada TA 2018 dilakukan reklassifikasi dari Investasi Jangka Pendek menjadi akun Kas pada BLU. Investasi Jangka Pendek pada BLU pada LMAN senilai

Rp2.592.473.339.265,00 merupakan kas dan Bank BLU yang telah disahkan BUN berupa Deposito dan investasi jangka pendek lainnya (deposito di Bank Mandiri dan BRI). Rincian atas Investasi Jangka Pendek pada BLU pada unit eselon I disajikan dalam lampiran.

C.1.6. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar di Muka
Rp403,99 Miliar*

Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp403.999.653.767,00 dan Rp436.912.535.114,00, turun sebesar Rp32.912.881.347,00 dari tahun sebelumnya. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 64
Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	401.795.010	436.018.902	(34.223.892)	(7,85)
Belanja Modal yang Dibayar Dimuka	2.204.644	893.633	1.311.011	146,71
Jumlah	403.999.654	436.912.535	(32.912.881)	(7,53)

Rincian Belanja Dibayar di Muka berdasarkan unit eselon I disajikan pada lampiran.

C.1.7. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja Rp3,19 Miliar

Uang Muka Belanja (*prepayment*) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp3.191.963.782,00 dan Rp3.251.678.938,00 turun sebesar Rp59.715.156,00 dari tahun sebelumnya. Uang Muka Belanja merupakan pembayaran awal atas perolehan barang/jasa yang akan dilunasi dalam jangka waktu tertentu setelah diterimanya barang/jasa sesuai perjanjian pelunasan.

Rincian Uang Muka Belanja berdasarkan unit eselon I disajikan pada lampiran.

C.1.8. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp547,5 Miliar

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp547.460.256.932,00 dan Rp265.793.509.448,00 naik sebesar Rp281.666.747.484,00 dari tahun sebelumnya. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima mengalami kenaikan terutama dari investasi Deposito dan Obligasi pada LPDP atas jasa layanan perbankan.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Eselon I disajikan pada lampiran.

**Piutang
Perpajakan
Rp81,47 Triliun**

C.1.9. Piutang Perpajakan

Jumlah Piutang Perpajakan Bruto per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp81.477.055.227.031,00** dan **Rp58.621.958.896.480,00**, naik sebesar **Rp22.855.096.330.551,00** dari tahun sebelumnya. Jumlah tersebut merupakan piutang negara kepada Wajib Pajak berupa pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, namun sampai dengan tanggal neraca belum mendapat pelunasan.

Perubahan saldo Piutang Perpajakan yang signifikan jika dibandingkan dengan TA 2017 antara lain karena adanya kenaikan saldo pada Piutang Cukai dan Bea Meterai sebesar **Rp8.823.309.015.104,00**, nilai saldo Piutang Pajak Lainnya naik sebesar **Rp8.611.289.193.763,00** dan nilai saldo Piutang Pajak PPh Non Migas naik sebesar **Rp4.041.520.001.772,00**. Kenaikan saldo pada Piutang Cukai dan Bea Meterai disebabkan karena pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai pasal 31 poin b.

Rincian Piutang Perpajakan Bruto berdasarkan jenis disajikan sebagai berikut.

Tabel 65
Rincian Piutang Pajak Per Jenis
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Pajak PPh Non Migas	24.226.282.819	20.184.762.817	4.041.520.002	20,02
Piutang Pajak PPN	24.081.126.456	24.241.868.811	(160.542.155)	(0,74)
Piutang Pajak PPnBM	506.938.435	355.413.375	151.525.060	42,63
Piutang Pajak PBB dan BPHTB	7.968.871.988	6.819.833.388	1.148.838.602	16,85
Piutang Cukai dan Bea Meterai	8.913.391.928	90.082.913	8.823.309.015	9.794,65
Piutang Pajak Lainnya	11.704.776.608	3.093.487.414	8.611.289.194	278,37
Piutang Pajak Perdagangan Internasional	4.030.766.088	3.812.291.758	218.474.330	5,73
Piutang Bea Masuk Tindakan	65.100.905	24.418.623	40.682.282	166,60
Jumlah	81.477.055.227	58.621.958.896	22.855.096.330	38,99

Rincian Piutang Perpajakan bruto per eselon I disajikan pada Lampiran.

Dari nilai Piutang Perpajakan sebesar **Rp81.477.055.227.031,00**, terdapat Penyisihan Piutang Perpajakan sebesar **Rp44.487.442.867.354,00** sehingga nilai Piutang Perpajakan bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar **Rp36.989.612.359.677,00**.

Dalam menghitung Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Perpajakan di atas, terdapat nilai sitaan/jaminan yang dikurangkan dari nilai piutang sebagai dasar perhitungan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Perpajakan. Nilai estimasi harga pasar aset Wajib Pajak yang dilakukan penyitaan yang belum dilakukan penjualan secara lelang dan atau penjualan yang dikecualikan dari lelang per 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp60.873.840.679,00** pada DJP.

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per jenis disajikan sebagai berikut.

Tabel 66
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Pajak Perpajakan Per Jenis
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	(dalam ribuan rupiah) %
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPh Non Migas	(15.608.454.940)	(12.327.832.755)	(3.280.622.185)	26,61
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPN	(12.910.651.974)	(11.863.974.673)	(1.046.677.301)	8,82
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPnBM	(452.316.382)	(299.430.166)	(152.886.216)	51,06
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PBB dan BPHTB	(2.692.417.812)	(2.126.318.365)	(566.099.447)	26,62
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Cukai dan Bea Materai	(157.090.888)	(81.011.399)	(76.079.489)	93,91
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya	(9.561.022.376)	(1.235.170.751)	(8.325.851.625)	674,06
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	(3.105.488.495)	(3.115.786.931)	10.298.436	(0,33)
Jumlah	(44.487.442.867)	(31.049.525.040)	(13.437.917.827)	43,28

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Perpajakan per eselon I disajikan pada lampiran.

Pada tahun 2018 saldo piutang yang dihapusbukukan sebesar **Rp23.545.731.800.089,00** mengalami penurunan sebesar **Rp9.208.465.044.843,00** dari saldo 2017 sebesar **Rp32.754.196.844.932,00**. Terdapat perubahan status daluwarsa piutang untuk saldo 2017 dari **Rp32.754.196.844.932,00** menjadi **Rp18.378.263.989.626,60** karena adanya penghapustagihan Piutang Pajak, pembayaran/pelunasan oleh Wajib Pajak, dan penghitungan kembali daluwarsa Piutang Pajak sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 67
Rincian Penjelasan Perubahan Status Daluwarsa
per 31 Desember 2018

Keterangan		Nilai		Perubahan Nilai
31 Desember 2017	31 Desember 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2018	
Daluwarsa Penagihan	Belum	621.501.443.551,98	-	
	Daluwarsa Penagihan	21.213.503.685.595,40	15.397.138.425.271,60	
	Daluwarsa Penetapan	2.701.682.591,00	2.040.043.550,00	
Total Daluwarsa Penagihan		21.837.706.811.738,38	15.399.178.468.821,60	6.438.528.342.916,78
Daluwarsa Penetapan	Belum	7.256.884.429.646,74	-	
	Daluwarsa Penagihan	1.579.864.856.426,92	1.363.248.024.844,32	
	Daluwarsa Penetapan	2.079.740.747.126,85	1.615.837.495.960,69	
Total Daluwarsa Penetapan		10.916.490.033.200,51	2.979.085.520.805,01	7.937.404.512.395,50
Grand Total		32.754.196.844.938,89	18.378.263.989.626,61	14.375.932.855.312,28

Terdapat penambahan piutang daluwarsa tahun berjalan sebesar **Rp5.167.467.810.463,69** dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 68
Rincian Perubahan Status Daluwarsa per Jenis Pajak
per 31 Desember 2018

Jenis Pajak	Daluwarsa Penagihan	Daluwarsa Penetapan	Total
Piutang PPh Pasal 21	104.481.008.138,02	174.558.385,56	104.655.566.523,58
Piutang PPh Pasal 22	13.946.140.190,07	984.964,00	13.947.125.154,07
Piutang PPh Pasal 23	106.100.531.924,92	64.398.517,00	106.164.930.441,92
	94.249.405.967,56	380.233.391,00	94.629.639.358,56
Piutang PPh Pasal 25 Orang Pribadi			
Piutang PPh Pasal 25 Badan	1.171.013.333.670,51	2.179.903.023,60	1.173.193.236.694,11
Piutang PPh Pasal 26	85.899.823.839,68	187.637.481,00	86.087.461.320,68
Piutang PPh Final	246.437.694.747,86	633.923.238,16	247.071.617.986,02
Piutang PPN Dalam Negeri	2.163.922.265.846,43	50.309.788.281,00	2.214.232.054.127,43
Piutang PPnBM Dalam Negeri	21.776.853.859,00	6.553.225.278,00	28.330.079.137,00
Piutang PBB Perkebunan	59.774.640.464,50	3.978.025.562,00	63.752.666.026,50
Piutang PBB Kehutanan	43.345.286.921,00	19.222.894.986,00	62.568.181.907,00
Piutang PBB Pertambangan	254.924.684.775,00	60.170.825.007,00	315.095.509.782,00
Piutang PTLL	-	-	-
PBB Sektor Lainnya	-	-	-
Piutang Bunga Penagihan PPh	175.846.151.436,00	328.519.958.304,34	504.366.109.740,34
Piutang Bunga Penagihan PPN	92.725.244.184,48	60.624.703.305,00	153.349.947.489,48
Piutang Bunga Penagihan PPnBM	23.684.775,00		23.684.775,00
Total	4.634.466.750.740,03	533.001.059.723,66	5.167.467.810.463,69

Terdapat Piutang yang daluwarsa penagihan yang telah dihapusbukukan pada 2017 dilakukan penghapustagihanpiutang pajak sesuai SE-13/PJ/2013. Usulan Penghapusan Piutang Pajak dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dihapuskan. Sampai dengan tanggal laporan telah diterbitkan 5 Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi senilai **Rp5.231.748.984.942,00**.

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Nominal ketetapan pajak kurang bayar yang menjadi sengketa pajak, yang belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah **Rp177.652.417.652.198,00**.

Nilai nominal ketetapan pajak/keputusan/putusan yang menjadi sengketa pajak tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan nilai piutang pajak per 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, khusus untuk sengketa pajak keberatan, nilai nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak tersebut adalah atas nilai ketetapan pajak awal, bukan atas nilai piutang pajak atau tunggakan pajak yang belum dibayar. Kedua, nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak untuk SKPKB/SKPKBT hasil pemeriksaan tahun pajak 2008 dan seterusnya, sebagian nilai dalam SKPKB/SKPKBT tersebut yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak belum diakui sebagai piutang pajak.

Piutang pajak yang diakui pada SKPKB/SKPKBT adalah sebesar nilai yang disetujui oleh Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya. Hal ini tidak berlaku pada STP dan SPPT karena pada jenis ketetapan tersebut tidak ada unsur nilai setuju atau tidak setuju atas nilai ketetapan pajak. Pada 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, SKPKB/SKPKBT yang terbit sebanyak 248.503 dengan total nilai ketetapan sebesar **Rp83.514.611.978.805,00** dan **US\$953.466.142**.

Rincian nilai setuju/tidak setuju atas SKPKB/SKPKBT per jenis pajak disajikan sebagai berikut

Tabel 69
Rincian Nilai Setuju/Tidak Setuju SKPKB/SKPKBT Terbit s.d. 31 Desember 2018

(dalam rupiah)					
Jenis Pajak	Kurs	Jumlah Data	Nilai Ketetapan Pajak	Nilai Setuju	Nilai Tidak Setuju
PPh Final	IDR	70.290	6.059.092.433.684	1.237.839.170.756	4.821.253.262.928
	USD	13	25.574.777	10.733.841	14.840.936
PPh Pasal 21	IDR	16.531	2.119.367.528.952	1.089.014.659.370	1.030.352.869.582
	USD	-	-	-	-
PPh Pasa I22	IDR	2.600	1.967.832.136.875	494.271.760.096	1.473.560.376.779
	USD	-	-	-	-
PPh Pasal 23	IDR	34.591	6.395.152.601.047	1.677.038.792.802	4.718.113.808.245
	USD	2	181.998	4.625	177.373
PPh Pasal 25 Badan	IDR	7.007	26.192.419.076.089	5.277.029.225.364	20.915.389.850.725
	USD	329	927.709.368	125.624.843	802.084.525
PPh Pasal 25 OP	IDR	2.957	623.050.170.156	329.538.654.607	293.511.515.549
	USD	-	-	-	-
PPh Pasal 26	IDR	3.773	4.536.487.011.007	1.100.179.416.165	3.436.307.594.842
	USD	-	-	-	-
PPN	IDR	110.286	35.514.020.301.861	8.113.984.733.539	27.400.035.568.322
	USD	-	-	-	-
PPnBM	IDR	44	81.336.050.783	48.570.482.071	32.765.568.712
	USD	-	-	-	-
Bea Materai	IDR	80	25.854.668.351	6.503.024.351	19.351.644.000
	USD	-	-	-	-
Total	IDR	248.159	83.514.611.978.805	19.373.969.919.121	64.140.642.059.684
	USD	344	953.466.142	136.363.309	817.102.834

C.1.10. Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak

*Piutang PNBP
Rp106,05 Miliar*

Piutang Bukan Pajak Bruto per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah **Rp106.065.442.231,00** dan **Rp55.583.122.513,00**, naik sebesar **Rp50.482.319.718,00** dari tahun sebelumnya. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang Bukan Pajak antara lain tagihan denda keterlambatan, kekurangan pekerjaan, dan lain-lain.

Rincian Piutang Bukan Pajak secara Bruto dan Neto (setelah dikurangi penyisihan) dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 70
Rincian Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	(dalam ribuan rupiah)			
	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Bukan Pajak	106.065.442	55.583.122	50.482.320	90,82
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(45.572.869)	(45.673.329)	100.460	(0,22)
Piutang PNBP Netto	60.492.573	9.909.793	50.582.780	510,43

Rincian Piutang Bukan Pajak Bruto, Neto, dan Penyisihan Piutang Bukan Pajak per unit eselon I disajikan pada lampiran.

Tabel 71
Rincian Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Kualitas	(dalam ribuan rupiah)		
	Nilai Piutang	Tarif Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	54.938.264	0.5%	274.691
Kurang Lancar	266.080	10%	26.608
Diragukan	11.179.056	50%	5.589.528
Macet	39.682.042	100%	39.682.042
Jumlah	106.065.442		45.572.869

Atas piutang PNBP dengan kategori Macet, telah dilimpahkan penagihannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebesar **Rp39.461.836.301,00**.

C.1.11. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp239 juta*

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Bruto per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar **Rp239.190.122,00** dan **Rp327.629.565,00** turun sebesar **Rp88.439.443,00** dari tahun sebelumnya.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 72
Rincian Bagian Lancar TP/TGR
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	(dalam ribuan rupiah) %
Bagian Lancar TP	109.311	136.311	(27.000)	(19,81)
Penyisihan Bagian Lancar TP	(547)	(682)	135	(19,81)
Bagian Lancar TP Netto	108.764	135.629	(26.865)	(19,81)
Bagian Lancar TGR	129.879	191.319	(61.440)	(32,11)
Penyisihan Bagian Lancar TGR	(649)	(957)	308	(32,20)
Bagian Lancar TGR Netto	129.230	190.362	(61.132)	(32,11)
Bagian Lancar TP/TGR Bruto	239.190	327.630	(88.439)	(26,99)
Bagian Lancar TP/TGR Netto	237.994	325.991	(87.997)	(26,99)

Rincian TP/TGR untuk per unit eselon I disajikan pada lampiran.

C.1.12. Piutang Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

*Piutang Dari
Kegiatan
Operasional
Badan Layanan
Umum Rp93,15
Miliar*

Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum merupakan hak atau pengakuan BLU atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dalam rangka kegiatan operasional BLU namun belum diselesaikan pembayarannya. Nilai Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum bruto per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar **Rp93.149.342.874,00** dan **Rp49.824.275.493,00**, naik sebesar **Rp43.325.067.381,00** dari tahun sebelumnya.

Rincian Piutang Dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum disajikan sebagai berikut.

Tabel 73
Rincian Piutang Operasional BLU
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	(dalam ribuan rupiah) %
Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	290.350	290.350	0	0,00
Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	91.722.808	48.542.565	43.180.243	88,95
Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya	990.360	991.360	(1.000)	(0,10)
Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional	145.825	0	145.825	0,00
Jumlah Bruto	93.149.343	49.824.275	43.325.068	86,96
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(1.297.908)	(936.602)	(361.306)	38,58
Jumlah Netto	91.851.435	48.887.673	42.963.762	87,88

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (bruto) per unit BLU disajikan sebagai berikut.

Tabel 74
Rincian Piutang Operasional BLU bruto per unit BLU
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	(dalam ribuan rupiah) %
LPDP	990.360	991.360	(1.000)	(0,10)
LMAN	91.722.808	48.542.565	43.180.243	88,95
STAN	290.350	290.350	-	-
BPDPKS	145.825	-	145.825	-
Jumlah	93.149.343	49.824.275	43.325.068	86,96

Terkait Piutang BLU pada LMAN sebesar Rp91.722.807.562,00 tidak termasuk:

- *Invoice* atas pengenaan tarif pendayagunaan (*toll fee*) aset Kilang LNG Badak oleh PT PHM dalam rangka pencairan gas alam sebesar US\$6,999,997.40 atau setara Rp101.366.962.349,00. Hal ini disebabkan karena pencairan gas alam tersebut merupakan kontrak jangka panjang (*committed cargo*) dari PT TEP yang tidak dikenakan tarif sewa dan dilanjutkan oleh PT PHM.
- *Invoice* atas kekurangan tagih pengenaan *toll fee* sebesar 13.390 MMBTU atau sebesar US\$2.945,80 setara Rp42.658.130,00 dari ENI MB B.V, yang diterbitkan invoice pada bulan Februari 2019.
- *Invoice* atas pendayagunaan aset Kilang Gas Arun oleh TP Inc. yang dilakukan dengan skema *facility sharing* dengan PT PN NSB sebesar US\$11,806.32 periode 15 Maret 2018 s.d. 15 Oktober 2018 yang diterbitkan *invoice* pada bulan Februari 2019.

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per unit eselon I disajikan pada lampiran.

C.1.13. Piutang Dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

Piutang Dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum Rp547,3 juta

Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum merupakan hak atau pengakuan BLU atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dalam rangka kegiatan non operasional BLU namun belum diselesaikan pembayarannya. Nilai Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum bruto per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp547.339.240,00 dan Rp467.335.113,00.

Tabel 75
Rincian Piutang BLU dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	(dalam ribuan rupiah) %
Piutang dari keg. Non Operasional BLU	547.339	467.335	80.004	17,12
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(467.735)	(467.335)	(400)	0,09
Jumlah Netto	79.604	-	79.604	-

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per unit BLU disajikan sebagai berikut.

Tabel 76
Rincian Piutang Non Operasional BLU per unit BLU
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	(dalam ribuan rupiah) %
STAN	467.335	467.335	-	-
LPDP	4.409	-	4.409	-
BPDPKS	75.595	-	75.595	-
Jumlah	547.339	467.335	80.004	17,12

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per unit eselon I disajikan pada lampiran.

C.1.14. Persediaan

Persediaan
Rp368,5 Miliar

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar **Rp368.543.028.343,00** dan **Rp376.664.699.351,00**, turun sebesar **Rp8.121.671.008,00** dari tahun sebelumnya.

Rincian Persediaan disajikan sebagai berikut.

Tabel 77
Rincian Persediaan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	(dalam ribuan rupiah) %
Barang Konsumsi	221.316.331	234.099.763	(12.783.432)	(5,46)
Amunisi	3.778.336	3.112.260	666.076	21,40
Bahan untuk Pemeliharaan	6.538.175	7.750.209	(1.212.034)	(15,64)
Suku Cadang	33.162.111	28.331.488	4.830.623	17,05
Pita Cukai Materai dan Leges	-	595	(595)	(100,00)
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	90.857.296	95.307.508	(4.450.212)	(4,67)
Bahan Baku	8.252.216	3.760.825	4.491.391	119,43
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	13.779	(13.779)	(100,00)
Persediaan Lainnya	4.638.563	4.288.272	350.291	8,17
Jumlah	368.543.028	376.664.699	(8.121.671)	(2,16)

Rincian Persediaan per unit eselon I disajikan pada lampiran.

C.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap Kementerian Keuangan Per 31 Desember 2018 berdasarkan saldo menurut Laporan Keuangan dan saldo menurut Laporan BMN adalah sebagai berikut:

Tabel 78
Perbandingan Saldo Menurut LK dan LBMN
per 31 Desember 2018

No	Jenis Aset	Saldo Menurut LK	Saldo Menurut LBMN	Selisih	(dalam ribuan rupiah)
					Penjelasan Selisih
1	Tanah	19.436.535.504	91.347.415.058	(71.910.879.554)	Take Out Revaluasi 2018
2	Peralatan dan Mesin	14.107.977.236	14.107.977.236	-	
3	Gedung dan Bangunan	14.544.545.225	15.395.582.095	(851.036.870)	Reklasifikasi dari ATR ke Gedung dan Bangunan Rp12.884.311 Take Out Revaluasi 2018 senilai (Rp863.921.181)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	492.466.667	421.093.788	71.372.879	Take Out Revaluasi 2018
5	Aset Tetap Lainnya	51.089.377	63.973.688	(12.884.311)	Reklasifikasi dari ATR ke Gedung dan Bangunan (Rp12.884.311)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	278.968.308	278.968.308	-	
	Jumlah	48.911.582.317	121.615.010.173	(72.703.427.856)	

Penjelasan mengenai masing-masing jenis aset diatas akan dijelaskan lebih rinci dibawah ini.

C.2.1. Tanah

*Tanah
Rp19,44
Triliun*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar **Rp19.436.535.504.094,00** dan **Rp19.349.423.511.784,00**. Terdapat kenaikan nilai aset tanah pada TA 2018 sebesar **Rp87.111.992.310,00** atau **0,45** persen. Dalam nilai Aset Tetap berupa Tanah Per 31 Desember 2018, terdapat Tanah milik Badan Layanan Umum (BLU) sebesar **Rp2.907.299.277.000,00**.

Adapun penjelasan atas status kepemilikan Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari total jumlah bidang Tanah di Kementerian Keuangan, sebanyak 4.053 bidang Tanah telah bersertifikat, dan sebanyak 301 bidang Tanah belum bersertifikat;
2. Terdapat 23 bidang Tanah di Kementerian Keuangan masih dalam status sengketa sampai ranah pengadilan.

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai Tanah pada TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 79
Mutasi/Perubahan Tanah
TA 2018

		(dalam ribuan rupiah)
Saldo Awal E-Rekon SAI		19.349.423.512
Take Out Revaluasi 2017		72.003.749.619
Saldo Awal BMN		91.353.173.131
Mutasi Tambah		896.459.682
100 - Penambahan Saldo Awal		23.127.520
102 - Transfer Masuk		666.522.499
103 - Hibah (Masuk)		2.230.471
105 - Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP		23.695.868
107 - Reklasifikasi Masuk		177.132.648
Lain-Lain		3.750.676
Mutasi Kurang		(902.217.755)
204 - Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas		(18.844.774)
302 - Transfer Keluar		(691.057.599)
304 - Reklasifikasi Keluar		(175.482.840)
305 - Koreksi Pencatatan		(12.140.075)
401 - Penghentian Aset Dari Penggunaan		(3.978.644)
Lain-Lain		(713.823)
Saldo Akhir BMN		91.347.415.058
Take Out Revaluasi 2018		(71.910.879.554)
Saldo Akhir E-Rekon SAI		19.436.535.504

Adapun rincian mutasi Tanah dari belanja modal pada TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 80
Rincian Mutasi Tanah dari Belanja Modal
TA 2018

		(dalam ribuan rupiah)
BELANJA ASSET TANAH :		
531 Belanja Modal Tanah		25.715.169
MUTASI :		-
Pembelian		2.078.909
Penyelesaian pembangunan langsung		-
Pengembangan langsung		52.374
Perolehan KDP		17.217.878
Pengembangan KDP		7.339.287
TOTAL MUTASI ASSET		26.688.448
SELISIH		(973.279)
PENJELASAN SELISIH:		
BM Tanah untuk Pengembangan/Perolehan Aset selain Tanah		-
Perolehan/Pengembangan Tanah dari BM selain BM Tanah		(973.280)
Perolehan/Pengembangan Tanah dari Belanja Barang		-
Koreksi karena Pengembalian Belanja Modal		-
Kurang/ lebih kapitalisasi		1

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Nilai
Peralatan
dan Mesin
Rp14.11
Triliun*

Nilai Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar [Rp14.107.977.235.913,00](#) dan [Rp13.627.399.300.896,00](#). Terdapat kenaikan nilai aset Peralatan dan Mesin pada TA 2018 sebesar [Rp480.577.935.017,00](#) atau [3,53](#) persen. Dalam nilai Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2018, terdapat Peralatan dan Mesin milik Badan Layanan Umum (BLU) sebesar [Rp106.727.761.508,00](#).

Adapun mutasi/perubahan nilai aset Peralatan dan Mesin pada TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 81
Mutasi/Perubahan Peralatan dan Mesin
TA 2018

		(dalam ribuan rupiah)
Saldo Awal E-Rekon SAI		13.627.399.301
Selisih Barang Hilang		20.238
Selisih Aset Likuidasi		(222)
Reklasifikasi ATR		(49.259)
Saldo Awal BMN		13.627.370.058
Mutasi Tambah		1.738.771.728
101 - Pembelian		674.348.296
102 - Transfer Masuk		489.414.511
105 - Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP		360.062.877
112 - Perolehan Lainnya		53.299.386
922 - Internal Transfer Masuk		61.734.108
Lain-lain		99.912.550
Mutasi Kurang		(1.258.164.550)
302 - Transfer Keluar		(472.983.166)
305 - Koreksi Pencatatan		(84.723.283)
401 - Penghentian Aset Dari Penggunaan		(605.759.134)
921 - Internal Transfer Keluar		(61.734.108)
Lain-lain		(32.964.859)
Saldo Akhir E-Rekon SAI dan BMN		14.107.977.236

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin dari belanja modal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 82
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal
TA 2018

		(dalam ribuan rupiah)
BELANJA ASET PERALATAN MESIN :		
532 Belanja Modal Peralatan dan Mesin		1.098.483.658
MUTASI :		-
Pembelian		674.348.296
Penyelesaian pembangunan langsung		39.996
Pengembangan langsung		38.734.708
Perolehan KDP		231.032.866
Pengembangan KDP		139.613.342
TOTAL MUTASI ASET		1.083.769.208
SELISIH		14.714.450
PENJELASAN SELISIH:		
Pembelian Ekstrakomptabel		6.026.068
BM Peralatan Mesin untuk Pengembangan/Perolehan Aset selain PM		39.977.075
Perolehan/Pengembangan PM dari BM selain BM Peralatan & Mesin		(31.102.519)
Perolehan/Pengembangan PM dari Belanja Barang		(20.174)
Koreksi karena Pengembalian Belanja Modal		(165.999)

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Nilai Gedung
dan
Bangunan
Rp14,54
Triliun*

Nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar **Rp14.544.545.225.457,00** dan **Rp14.271.267.493.102,00**. Terdapat kenaikan nilai aset Gedung dan Bangunan pada TA 2018 sebesar **Rp 273.277.732.355,00** atau **1,91** persen. Dalam nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2018, terdapat Gedung dan Bangunan milik Badan Layanan Umum (BLU) sebesar **Rp201.599.673.850,00**.

Tabel 83
Mutasi/ Perubahan Gedung dan Bangunan
TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

Saldo Awal E-Rekon SAI	14.271.267.493
Reklasifikasi ATR	(320.669)
Take Out Revaluasi 2017	727.474.409
Saldo Awal BMN	14.998.421.233
Mutasi Tambah	810.855.753
102 - Transfer Masuk	243.438.308
105 - Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	210.235.094
107 - Reklasifikasi Masuk	107.192.466
205 - Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	54.579.609
208 - Pengembangan Melalui KDP	156.401.357
Lain-lain	39.008.919
Mutasi Kurang	(413.694.891)
302 - Transfer Keluar	(242.787.039)
304 - Reklasifikasi Keluar	(117.630.024)
305 - Koreksi Pencatatan	(24.145.255)
401 - Penghentian Aset Dari Penggunaan	(22.020.294)
Lain-lain	(7.112.279)
Saldo Akhir BMN	15.395.582.095
Reklasifikasi ATR	12.884.311
Take Out Revaluasi 2018	(863.921.181)
Saldo Akhir E-Rekon SAI	14.544.545.225

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan dari belanja modal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 84
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal
TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

BELANJA ASET GEDUNG BANGUNAN :	
533 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	470.227.244
MUTASI :	
Pembelian	3.213.623
Penyelesaian pembangunan langsung	702.297
Pengembangan langsung	19.516.950
Perolehan KDP	26.433.159
Pengembangan KDP	415.136.916
TOTAL MUTASI ASET	465.002.945
SELISIH	5.224.299
PENJELASAN SELISIH:	
Pembelian Ekstrakomptabel	-
BM Gedung Bangunan untuk Pengembangan/Perolehan Aset selain GB	10.324.247
Perolehan/Pengembangan GB dari BM selain BM GB	(5.294.448)
Perolehan/Pengembangan GB dari Belanja Barang	197.821
Koreksi karena Pengembalian Belanja Modal	(3.321)

Kementerian Keuangan memiliki 2 (dua) unit Barang Bersejarah berupa Tugu Peringatan Lainnya pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Samarinda dan Gedung A.A. Maramis pada Kantor Pusat Sekretariat Jenderal.

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Nilai Jalan
Irigasi, dan
Jaringan
sebesar
Rp492,47
Miliar*

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar **Rp492.466.667.314,00** dan **Rp496.240.136.223,00**. Terdapat penurunan nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA 2018 sebesar **Rp3.773.468.909,00** atau **0,76** persen. Jalan, Irigasi, dan Jaringan terdiri dari Jalan dan Jembatan senilai **Rp 242.577.019.589,00**, Irigasi senilai **Rp54.804.051.511,00**, dan Jaringan senilai **Rp195.085.596.214,00**. Dalam nilai Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2018, terdapat Jalan, Irigasi, dan Jaringan milik Badan Layanan Umum (BLU) sebesar **Rp10.582.667.419,00**.

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 85
Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

Saldo Awal E-Rekon SAI	496.240.136
Take Out Revaluasi 2017	(74.180.558)
Saldo Awal BMN	422.059.578
Mutasi Tambah	13.968.554
101 - Pembelian	2.996.474
102 - Transfer Masuk	7.940.507
Lain-lain	3.031.573
Mutasi Kurang	(14.934.345)
302 - Transfer Keluar	(7.898.473)
401 - Penghentian Aset Dari Penggunaan	(5.341.700)
Lain-lain	(1.694.172)
Saldo Akhir BMN	421.093.787
Take Out Revaluasi 2018	71.372.880
Saldo Akhir E-Rekon SAI	492.466.667

Rincian mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan dari belanja modal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 86
Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal
TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

BELANJA ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
534	Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan
TOTAL BELANJA	
MUTASI :	
Pembelian	2.996.474
Penyelesaian pembangunan langsung	366.666
Pengembangan langsung	677.393
Perolehan KDP	300
Pengembangan KDP	1.529.995
TOTAL MUTASI ASET	5.570.828
SELISIH	800.882
PENJELASAN SELISIH:	
BM JIJ untuk Pengembangan/Perolehan Aset selain JIJ	1.873.923
Perolehan/Pengembangan JIJ dari BM selain BM JIJ	(1.095.873)
Perolehan/Pengembangan JIJ dari Belanja Barang	22.831
Koreksi karena Pengembalian Belanja Modal	-
Kurang/ Lebih Kapitalisasi	1

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Nilai Aset
Tetap
Lainnya
Rp51,09
Miliar*

Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar **Rp51.089.377.176,00** dan **Rp55.953.215.349,00**. Terdapat penurunan nilai Aset Tetap Lainnya pada TA 2018 sebesar **Rp4.863.838.173,00** atau **8,69** persen. Dalam nilai Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2018, terdapat Aset Tetap Lainnya milik Badan Layanan Umum (BLU) sebesar **Rp13.726.917.964,00**.

Adapun rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 87
Rincian Aset Tetap Lainnya
TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

Kelompok Barang	Nilai	Penyusutan
Aset Tetap Renovasi	18.896.227	-
Bahan Perpustakaan Tercetak	26.064.787	-
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	1.300.215	-
Kartografi, Naskah, dan Lukisan	1.095.727	-
Barang Bercorak Kesenian	3.347.997	(585.697)
Alat Bercorak Kebudayaan	382.989	-
Barang Koleksi Non Budaya	1.435	-
TOTAL	51.089.377	(585.697)

Pada kelompok barang Aset Tetap Lainnya hanya Barang Bercorak Kesenian yang disusutkan sedangkan untuk Aset Tetap Renovasi tidak disusutkan karena renovasi yang dilakukan tidak menambah masa manfaat.

Adapun mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya pada TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 88
Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya
TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

Saldo Awal E-Rekon SAI	55.953.215
Reklasifikasi ATR	369.928
Saldo Awal BMN	56.323.143
Mutasi Tambah	25.013.669
101 - Pembelian	4.477.640
102 - Transfer Masuk	2.548.632
105 - Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	14.947.229
954 - Penyelesaian dengan KDP Aset Tetap Renovasi	1.910.278
Lain - lain	1.129.890
Mutasi Kurang	(17.363.124)
302 - Transfer Keluar	(15.112.564)
401 - Penghentian Aset Dari Penggunaan	(1.944.222)
Lain - lain	(306.338)
Saldo Akhir BMN	63.973.688
Reklasifikasi ATR	(12.884.311)
Saldo Akhir E-Rekon SAI	51.089.377

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal pada TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 89
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal
TA 2018

		(dalam ribuan rupiah)
ASET TETAP LAINNYA		
MUTASI TERKAIT BELANJA :		
Pembelian INTRA		4.477.640
pembelian EKSTRA		-
Penyelesaian pembangunan langsung		276.236
Pengembangan langsung		-
Perolehan KDP		1.066.984
Pengembangan KDP		18.704.940
TOTAL MUTASI ASET		24.525.800
BELANJA PEROLEHAN/PENGEMBANGAN ATL :		
52 Belanja Barang		126.871
531 Belanja Modal Tanah		-
532 Belanja Modal Peralatan dan Mesin		2.701.361
533 Belanja Modal Gedung dan Bangunan		5.718.089
534 Belanja Modal JIJ		64.955
536 Belanja Modal Lainnya		12.544.631
537 Belanja Modal BLU		3.369.893
TOTAL BELANJA		24.525.800
SELISIH		
PENJELASAN SELISIH:		
Kurang/ Lebih Kapitalisasi		-

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp278,97
Miliar*

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar [Rp278.968.308.402,00](#) dan [Rp206.417.421.601,00](#). Terdapat kenaikan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada TA 2018 sebesar [Rp72.550.886.801,00](#) atau [35,15](#) persen. Dalam nilai Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2018, terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Badan Layanan Umum (BLU) sebesar [Rp5.367.943.352,00](#).

Mutasi/perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 90
Mutasi/Perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan
TA 2018

		(dalam ribuan rupiah)
Saldo Awal E-Rekon SAI		206.417.422
Mutasi Tambah		864.245.142
502 - Perolehan KDP		3.559.101
501 - Saldo Awal KDP		275.487.184
503 - Pengembangan KDP		582.066.352
Lain - lain		3.132.505
Mutasi Kurang		(791.694.256)
505 - Penghentian KDP		(702.160)
507 - Transfer Keluar KDP		(19.504.549)
564 - Koreksi Nilai Berkurang KDP		(771.450.653)
599 - Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi		(36.894)
Saldo Akhir E-Rekon SAI		278.968.308

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp14.81
Triliun*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar **Rp14.808.785.207.013,00** dan **Rp13.825.901.087.233,00**. Dalam nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2018, terdapat Akumulasi Aset Tetap pada Badan Layanan Umum (BLU) sebesar **Rp83.860.998.440,00**.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan selama periode TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 91
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	14.107.977.236	10.861.430.456	3.246.546.780
2	Gedung dan Bangunan	14.544.545.225	3.755.337.542	10.789.207.683
3	Jalan dan Jembatan	242.577.020	92.795.022	149.781.998
4	Irigasi	54.804.052	29.805.809	24.998.243
5	Jaringan	195.085.596	68.830.681	126.254.915
6	Aset Tetap Lainnya	32.193.150	585.697	31.607.453
JUMLAH		29.177.182.279	14.808.785.207	14.368.397.072

C.3. Piutang Jangka Panjang

*Piutang
Jangka
Panjang
Rp278,42
Juta*

Nilai Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar **Rp278.418.524,00** dan **Rp403.273.129,00**, seluruhnya merupakan saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).

Rincian Piutang Jangka Panjang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 92
Komposisi Piutang Jangka Panjang
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan (Penurunan)	
			Rupiah	%
Piutang Tagihan TP/TGR	12.051.328	11.935.622	115.706	0,97
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	(11.772.909)	(11.532.349)	(240.561)	2,09
Tagihan TP/TGR (Neto)	278.419	403.273	(124.855)	(30,96)

C.3.1. Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

*Piutang TP/
TGR
Rp12,05
Miliar*

Nilai Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Kementerian Keuangan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar **Rp12.051.328.428,00** dan **Rp11.935.622.280,00**.

Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

C.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

*Penyisihan
Piutang TP/
TGR
Rp11,77
Miliar*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Tagihan TP/TGR berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Penyajian akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar **Rp11.772.909.904,00** dan **Rp11.532.349.151,00** dihitung berdasarkan persentase penyisihan piutang sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR per Unit Eselon I dapat dilihat pada lampiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR per per Unit Eselon I.

C.3.3. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

*Tagihan TP/
TGR (Neto)
Rp278,42
Juta*

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Neto per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar **Rp278.418.524,00** dan **Rp403.273.129,00**. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaianya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaianya.

Daftar rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR per Unit Eselon I dapat dilihat pada lampiran daftar Tagihan TGR Kementerian Keuangan TA 2018 *Audited*.

C.4. Aset Lainnya

*Aset Lainnya
Rp514,84
Miliar*

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar **Rp514.836.470.216,00** dan **Rp414.295.541.672,00** merupakan saldo Aset Tak Berwujud, Aset Lain-lain, dan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya.

Rincian Aset Lainnya per Jenis Aset dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 93
Komposisi Aset Lainnya Per Jenis Aset
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	(dalam ribuan rupiah)	
			Kenaikan (Penurunan)	
			Rupiah	%
Aset Tak Berwujud	1.370.630.221	1.202.236.915	168.393.306	14,01
Aset Lain-lain	1.139.813.993	865.287.703	274.526.290	31,73
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(1.995.607.744)	(1.653.229.076)	(342.378.668)	20,71
Jumlah	514.836.470	414.295.542	100.540.928	24,27

C.4.1. Aset Tak Berwujud

*Aset Tak
Berwujud
Rp1,37
Triliun*

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar **Rp1.370.630.220.833,00** dan **Rp1.202.236.914.878,00**. Aset Tak Berwujud terdiri dari *Software*, *Lisensi*, *Hasil Kajian/Penelitian*, dan Aset Tak Berwujud Lainnya.

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 94
Aset Tak Berwujud per Jenis Aset
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	(dalam ribuan rupiah)	
			Kenaikan (Penurunan)	
			Rupiah	%
Software	971.292.378	892.559.006	78.733.372	8,82
Lisensi	392.695.081	303.458.603	89.236.478	29,41
Hasil Kajian/Penelitian	809.983	809.983	0	0,00
Aset Tak Berwujud Lainnya	5.832.779	5.409.323	423.456	7,83
Jumlah	1.370.630.221	1.202.236.915	168.393.306	14,01

C.4.2. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain
Rp1,14
Triliun*

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar **Rp1.139.813.993.517,00** dan **Rp865.287.703.248,00**.

Rincian Aset Lain-lain per jenis aset per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 95
Rincian Aset Lain-Lain
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan (Penurunan)	
			Rupiah	%
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1.026.203.110	760.088.948	266.114.162	35,01
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	113.610.883	105.198.755	8.412.128	8,00
JUMLAH	1.139.813.993	865.287.703	274.526.290	31,73

Aset Lain-lain sebesar **Rp1.139.813.993.517,00** merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan.

Rincian Aset Lain-Lain per Unit Eselon I dapat dilihat pada Lampiran Aset Lainnya per Unit Eselon I.

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
penyusutan/
amortisasi
aset lainnya
Rp1,99
Triliun*

Akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah **Rp1.995.607.744.134,00** dan **Rp1.653.229.076.454,00**.

Rincian Akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya per jenis aset per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 96
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan (Penurunan)	
			Rupiah	%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	910.595.401	700.350.560	210.244.841	30,02
Akumulasi Amortisasi Software	839.584.857	751.652.996	87.931.862	11,70
Akumulasi Amortisasi Lisensi	132.642.201	98.147.711	34.494.490	35,15
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	112.785.285	103.077.809	9.707.475	9,42
JUMLAH	1.995.607.744	1.653.229.076	342.378.668	20,71

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya dapat dilihat pada Lampiran Aset Lainnya per Unit Eselon I.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban
Jangka
Pendek
Rp25,25
Triliun

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar [Rp25.247.726.225.714,00](#) dan [Rp19.053.902.192.422,00](#). Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek ini terdiri dari Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang yang belum ditagihkan, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka dari KPPN, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 97
Rincian Kewajiban Jangka Pendek
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	(dalam ribuan rupiah)	
			Kenaikan (Penurunan) Rupiah	%
Utang kepada Pihak Ketiga	472.206.297	1.486.741.002	(1.014.534.705)	(68,24)
Utang yang Belum Ditagihkan	117.500	0	117.500	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	24.681.785.708	17.295.682.218	7.386.103.490	42,70
Pendapatan Diterima Dimuka	88.730.205	267.311.530	(178.581.325)	(66,81)
Uang Muka dari KPPN	2.313.040	2.533.211	(220.171)	(8,69)
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.573.476	1.634.232	939.244	57,47
Kewajiban Jangka Pendek	25.247.726.226	19.053.902.193	6.193.824.033	32,51

C.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang
kepada
Pihak Ketiga
Rp472,21
Miliar

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar [Rp472.206.297.236,00](#) dan [Rp1.486.741.001.607,00](#).

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per Unit Eselon I dapat dilihat pada Lampiran Kewajiban Jangka Pendek per Unit Eselon I.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Akun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 98
Utang Kepada Pihak Ketiga
per Akun Per 31 Desember 2018

Akun	Uraian Akun	31 Desember 2018	31 Desember 2017	(dalam ribuan rupiah)	
				Kenaikan (Penurunan) Rupiah	%
212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	10.816.392	9.829.437	986.955	10,04
212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	31.839.727	900.676.767	(868.837.040)	(96,46)
212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	74.254.560	114.744.189	(40.489.628)	(35,29)
212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	58.059.076	54.838.122	3.220.954	5,87
212192	Dana Pihak Ketiga	294.512.644	403.972.982	(109.460.338)	(27,10)
212193	Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU	2.723.898	2.679.504	44.394	0,00
Jumlah		472.206.297	1.486.741.001	(1.014.534.704)	(68,24)

C.5.2. Utang Yang Belum Ditagihkan

*Utang Yang
Belum
Ditagihkan
Rp117,5
Juta*

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar **Rp117.500.000,00** dan **Rp0,00**.

Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan belanja pengadaan barang dan atau jasa yang telah memiliki kontrak dan atau Berita Acara Serah Terima (BAST) namun belum terbit SPP (Surat Perintah Pembayaran) sampai dengan periode pelaporan. Atas utang yang belum ditagihkan tersebut akan dilakukan pembayaran pada tahun 2019.

C.5.3. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

*Utang
Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan
Rp24,68
Triliun*

Nilai Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar **Rp24.681.785.707.564,00** dan **Rp17.295.682.218.033,00**. Nilai tersebut merupakan pengembalian kelebihan pembayaran perpajakan pada DJP, DJBC, DJPB, dan DJKN per 31 Desember 2018 yang belum terbit SP2D-nya.

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per Unit Eselon I dapat dilihat pada Lampiran Kewajiban Jangka Pendek per Unit Eselon I.

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per Akun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 99
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per Akun
Per 31 Desember 2018

Akun	Uraian Akun	31 Desember 2018	31 Desember 2017	(dalam ribuan rupiah)	
				Rupiah	%
219111	Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	6.698.614.306	3.060.829.239	3.637.785.067	118,85
219112	Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	17.900.745.312	14.028.757.147	3.871.988.165	27,60
219114	Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	4.649.615	158.999.513	(154.349.898)	(97,08)
219116	Utang Kelebihan Bayar Bea Masuk	77.745.646	47.064.099	30.681.547	65,19
219123	Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya	30.828	32.220	(1.392)	(4,32)
Jumlah		24.681.785.707	17.295.682.218	7.386.103.489	42,70

C.5.4. Pendapatan Diterima Dimuka

*Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp88,73
Miliar*

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar **Rp88.730.205.183,00** dan **Rp267.311.529.885,00**. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Pendapatan Diterima Dimuka antara lain merupakan pendapatan sewa ruangan untuk mesin ATM, fotocopy, kantin, dan sewa tanah untuk *Base Transceiver Station* (BTS).

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per Unit Eselon I dapat dilihat pada Lampiran Kewajiban Jangka Pendek per Unit Eselon I.

C.5.5. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka
dari KPPN
Rp2,31
Miliar*

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar **Rp2.313.040.226,00** dan **Rp2.533.211.245,00**. Nilai tersebut merupakan saldo uang muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN dapat dilihat pada Lampiran Kewajiban Jangka Pendek per Unit Eselon I.

C.5.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

*Utang
Jangka
Pendek
Lainnya
Rp2,57
miliar*

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar **Rp2.573.475.505,00** dan **Rp1.634.231.652,00**. Nilai tersebut merupakan utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan yang belum disetor ke rekening kas negara.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per Unit Eselon I dapat dilihat pada Lampiran Kewajiban Jangka Pendek per Unit Eselon I.

C.6. Ekuitas

*Ekuitas
Ekuitas
Rp73,51
Triliun*

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar **Rp73.514.668.353.763,00** dan **Rp58.566.437.595.383,00**. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Sesuai PSAP 12 tentang Laporan Operasional, Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional periode TA 2018 disandingkan dengan Laporan Operasional periode TA 2017.

D.1. Pendapatan Kegiatan Operasional

*Pendapatan
Operasional
Rp1.521,66
triliun*

Pendapatan Operasional pada Kementerian Keuangan TA 2018 adalah sebesar Rp1.521.657.589.406.736,00 terdiri dari pendapatan perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Komposisi pendapatan Kementerian Keuangan per jenis penerimaan TA 2018 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.

Tabel 100
Perbandingan Pendapatan Operasional Kementerian Keuangan
Periode TA 2018 dan TA 2017

No.	Unit Eselon I	TA 2018	TA 2017	(dalam ribuan rupiah)
				% Naik/ (Turun)
1	Pendapatan Perpajakan	1.500.170.160.061	1.363.088.775.091	10,06
2	Pendapatan Negara Bukan Pajak	21.487.429.346	18.399.630.272	16,78
	Jumlah	1.521.657.589.407	1.381.488.405.363	10,15

Perbandingan pendapatan per unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan Periode TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 101
Perbandingan Pendapatan Operasional Per Unit Eselon I
Periode TA 2018 dan TA 2017

No.	Unit Eselon I	TA 2018	TA 2017	(dalam ribuan rupiah)
				% Naik/ (Turun)
1	Sekretariat Jenderal	2.366.643.736	1.741.536.586	35,89
2	Inspektorat Jenderal	1.200	6.299	(80,95)
3	Ditjen Anggaran	13.581	26.849	(49,42)
4	Ditjen Pajak	1.285.787.971.176	1.169.991.635.653	9,90
5	Ditjen Bea dan Cukai	214.427.171.139	193.141.181.995	11,02
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	94.848	88.401	7,29
7	Ditjen PPR	51.787.673	69.195.372	(25,16)
8	Ditjen Perbendaharaan	15.571.011.805	14.788.601.754	5,29
9	Ditjen Kekayaan Negara	3.406.762.415	1.708.495.081	99,40
10	BPPK	46.116.195	47.637.372	(3,19)
11	Badan Kebijakan Fiskal	15.639	-	0,00
	Jumlah	1.521.657.589.407	1.381.488.405.363	10,15

D.1.1. Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan Rp1.500,17 triliun Pendapatan Perpajakan periode TA 2018 adalah sebesar **Rp1.500.170.160.060.551,00**. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Perpajakan periode TA 2017, maka terjadi kenaikan sebesar **Rp137.081.384.969.411,00** atau **10,06** persen.

Rincian pendapatan perpajakan per jenis pajak TA 2018 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 102
Perbandingan Pendapatan Perpajakan Per Akun
Periode TA 2018 dan TA 2017

Uraian	TA 2018	TA 2017	(dalam ribuan rupiah) % Naik/ (Turun)
Pendapatan Pajak Penghasilan	731.838.117.941	662.417.200.380	10,48
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	526.856.640.020	479.591.110.490	9,86
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	20.136.546.792	17.128.469.834	17,56
Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan	-	1.216.912	(100,00)
Pendapatan Cukai	168.411.747.415	153.286.335.416	9,87
Pendapatan Pajak Lainnya	6.796.688.675	11.065.264.994	(38,58)
Pendapatan Bea Masuk	39.464.702.541	35.054.329.773	12,58
Pendapatan Bea Keluar	6.665.716.677	4.544.847.292	46,67
Jumlah	1.500.170.160.061	1.363.088.775.091	10,06

Pendapatan perpajakan di lingkungan Kementerian Keuangan dikelola oleh Direktorat jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Rincian Pendapatan Perpajakan per Unit Eselon I periode TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 103
Perbandingan Pendapatan Perpajakan Per Unit Eselon I
Periode TA 2018 dan TA 2017

No.	Unit Eselon I	TA 2018	TA 2017	(dalam ribuan rupiah) % Naik/ (Turun)
1	Ditjen Pajak	1.285.775.473.431	1.169.977.035.007	9,90
2	Ditjen Bea dan Cukai	214.394.686.629	193.111.740.084	11,02
	Jumlah	1.500.170.160.061	1.363.088.775.091	10,06

Pendapatan Perpajakan diatas merupakan pelunasan pajak periode Januari sampai dengan Desember 2018 yang dilakukan oleh Wajib Pajak tanpa terlebih dahulu adanya penetapan dan ketetapan, serta keputusan yang mengakibatkan kurang bayar yang diterbitkan pada TA 2018.

D.1.2. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp21,49 triliun

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) periode TA 2018 adalah sebesar Rp21.487.429.346.185,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak periode TA 2017, maka terjadi kenaikan sebesar Rp3.087.799.074.187,00 atau 16,78 persen. Pendapatan tersebut terdiri dari PNBP Badan Layanan Umum dan PNBP Lainnya.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per jenis penerimaan periode TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 104
Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Per Jenis Penerimaan
Periode TA 2018 dan TA 2017

No.	Uraian	TA 2018	TA 2017	(dalam ribuan rupiah)
				% Naik/ (Turun)
1	PNBP BLU	20.871.220.659	17.847.102.595	16,94
2	PNBP Lainnya	616.208.688	552.527.677	11,53
	Jumlah	21.487.429.346	18.399.630.272	16,78

Perbandingan pendapatan bukan pajak per unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan periode TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 105
Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Per Unit Eselon I
Periode TA 2018 dan TA 2017

No.	Unit Eselon I	TA 2018	TA 2017	(dalam ribuan rupiah)
				% Naik/ (Turun)
1	Sekretariat Jenderal	2.366.643.736	1.741.536.586	35,89
2	Inspektorat Jenderal	1.200	6.299	(80,95)
3	Ditjen Anggaran	13.581	26.849	(49,42)
4	Ditjen Pajak	12.497.745	14.600.646	(14,40)
5	Ditjen Bea dan Cukai	32.484.510	29.441.911	10,33
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	94.848	88.401	7,29
7	Ditjen PPR	51.787.673	69.195.372	(25,16)
8	Ditjen Perpendaharaan	15.571.011.805	14.788.601.754	5,29
9	Ditjen Kekayaan Negara	3.406.762.415	1.708.495.081	99,40
10	BPPK	46.116.195	47.637.372	(3,19)
11	Badan Kebijakan Fiskal	15.639	-	0,00
	Jumlah	21.487.429.346	18.399.630.272	16,78

Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut termasuk pendapatan bukan pajak pada satker BLU di lingkungan Kementerian Keuangan.

Perbandingan Pendapatan Bukan Pajak per Satker BLU di lingkungan Kementerian Keuangan periode TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 106
Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Per Satker BLU
Periode TA 2018 dan TA 2017

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2018	TA 2017	% Naik/ (Turun)
1	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	2.338.973.903	1.703.411.108	37,31
2	Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit	15.462.050.028	14.782.471.301	4,60
3	Pusat Investasi Pemerintah	105.674.219	24.689.476	328,01
4	Lembaga Manajemen Aset Negara	2.920.851.096	1.291.001.738	126,25
5	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	44.100.753	45.771.018	(3,65)
	Jumlah	20.871.649.999	17.847.344.640	16,95

PNBP terbesar berasal dari Satker BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebesar **Rp15.462.050.028.398,00**, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebesar **Rp2.920.851.096.094,00**, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Sekretariat Jenderal sebesar **Rp2.338.973.902.947,00**.

D.2. Beban Operasional

*Beban operasional
Rp48,38
triliun*

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi dan/atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang mengakibatkan penurunan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atas konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban operasional merupakan beban yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan operasional entitas.

Beban Operasional pada Kementerian Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar **Rp48.384.485.610.749,00** dan **Rp62.454.086.093.838,00**.

Rincian Beban Operasional dapat dilihat dalam rincian tabel berikut.

Tabel 107
Rincian Beban Operasional
Periode TA 2018 dan TA 2017

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan/ Penurunan	Naik
Beban Pegawai	20.455.990.237	17.349.699.254	3.106.290.983	17,90
Beban Persediaan	402.192.661	374.600.258	27.592.403	7,37
Beban Barang dan Jasa	12.932.743.025	18.545.831.764	(5.613.088.739)	(30,27)
Beban Pemeliharaan	1.245.505.584	1.243.607.606	1.897.978	0,15
Beban Perjalanan Dinas	1.760.282.212	1.626.381.717	133.900.495	8,23
Beban Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	453.463.604	465.338.955	(11.875.351)	(2,55)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.653.119.745	1.591.499.699	61.620.046	3,87
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	9.481.188.543	21.257.126.841	(11.775.938.298)	(55,40)
Jumlah	48.384.485.611	62.454.086.094	(14.069.600.483)	(22,53)

Sedangkan rincian Beban Operasional per Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 108
Rincian Beban Operasional per Unit Eselon I
Periode TA 2018 dan TA 2017

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2018	TA 2017	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	19.729.959.863	16.780.726.326	2.949.233.537	17,58
2	Inspektorat Jenderal	100.948.942	95.154.632	5.794.310	6,09
3	Ditjen Anggaran	123.248.791	127.354.205	(4.105.414)	(3,22)
4	Ditjen Pajak	16.133.099.567	27.187.334.604	(11.054.235.036)	(40,66)
5	Ditjen Bea dan Cukai	3.867.140.474	4.112.486.646	(245.346.172)	(5,97)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	115.493.703	107.629.563	7.864.140	7,31
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	108.283.235	101.312.552	6.970.683	6,88
8	Ditjen Perbendaharaan	7.010.798.832	12.800.240.376	(5.789.441.544)	(45,23)
9	Ditjen Kekayaan Negara	2.181.873.740	2.109.729.965	72.143.775	3,42
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	651.963.009	625.682.352	26.280.657	4,20
11	Badan Kebijakan Fiskal	130.811.460	133.278.748	(2.467.288)	(1,85)
	Jumlah	50.153.621.616	64.180.929.969	(14.027.308.354)	(21,86)

Nilai Beban Operasional 31 Desember 2018 pada tabel di atas belum termasuk koreksi sebesar **Rp1.769.136.005.044,00** yang dilakukan pada satuan kerja konsolidasi BA 015. Koreksi tersebut merupakan koreksi atas tidak disajikannya

nilai revaluasi pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 015). Adapun nilai Beban Operasional sebelum dan setelah koreksi adalah sebagai berikut.

No	Uraian	TA 2018
1	Beban Operasional sebelum koreksi	50.153.621.615.798
2	Koreksi satker konsolidasi BA 015	(1.769.136.005.044)
3	Beban Operasional setelah koreksi	48.384.485.610.754

*Beban
Pegawai
Rp20,46
triliun*

D.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar **Rp20.455.990.236.598,00** dan **Rp17.349.699.254.266,00**.

Rincian Beban Pegawai disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 109
Rincian Beban Pegawai Per Akun
Periode TA 2018 dan TA 2017

Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	4.349.660.955	4.140.592.288	209.068.667	5,05
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	43.998.804	34.780.831	9.217.973	26,50
Beban Lembur	122.548.187	145.579.125	(23.030.938)	(15,82)
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	15.842.793.721	12.956.881.012	2.885.912.709	22,27
Beban Barang BLU	96.988.570	71.853.932	25.134.638	34,98
Beban Gaji Pokok Non PNS	-	12.066	(12.066)	100,00
Jumlah	20.455.990.237	17.349.699.254	3.106.290.983	17,90

Sedangkan rincian Beban Pegawai per unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 110
Rincian Beban Pegawai per Unit Eselon I
Periode TA 2018 dan TA 2017

No.	Unit Eselon I	TA 2018	TA 2017	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	16.056.833.082	13.154.542.931	2.902.290.151	22,06
2	Inspektorat Jenderal	43.502.054	41.484.954	2.017.100	4,86
3	Ditjen Anggaran	59.720.969	59.261.006	459.963	0,78
4	Ditjen Pajak	2.401.925.174	2.298.480.579	103.444.595	4,50
5	Ditjen Bea dan Cukai	862.010.132	801.463.888	60.546.244	7,55
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	32.904.999	28.650.967	4.254.032	14,85
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	30.274.104	29.482.431	791.673	2,69
8	Ditjen Perbendaharaan	586.920.363	589.173.562	(2.253.199)	(0,38)
9	Ditjen Kekayaan Negara	262.599.816	233.179.288	29.420.528	12,62
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	84.620.218	80.661.682	3.958.536	4,91
11	Badan Kebijakan Fiskal	34.679.326	33.317.967	1.361.359	4,09
	Jumlah	20.455.990.237	17.349.699.254	3.106.290.983	17,90

D.2.2. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp402,19
miliar*

Beban Persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp402.192.660.657,00 dan Rp374.600.258.261,00.

Rincian Beban Persediaan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 111
Rincian Beban Persediaan Per Akun
Periode TA 2018 dan TA 2017

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA2018	TA2017	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	344.363.860	336.790.729	7.573.131	2,25
Beban Persediaan amunisi	691.475	458.843	232.632	50,70
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	900	82.725	(81.825)	(98,91)
Beban Persediaan bahan baku	45.347.527	24.018.151	21.329.376	88,81
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	-	167.883	(167.883)	(100,00)
Beban Persediaan Lainnya	11.788.899	13.081.927	(1.293.028)	(9,88)
Jumlah	402.192.661	374.600.258	27.592.403	7,37

Sedangkan rincian Beban Persediaan per unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 112
Rincian Beban Persediaan Per Unit Eselon I
Periode TA 2018 dan TA 2017

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA2018	TA2017	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	12.174.079	15.322.042	(3.147.963)	(20,55)
2	Inspektorat Jenderal	1.232.969	1.254.142	(21.173)	(1,69)
3	Ditjen Anggaran	897.653	1.174.122	(276.469)	(23,55)
4	Ditjen Pajak	195.543.376	202.211.091	(6.667.715)	(3,30)
5	Ditjen Bea dan Cukai	114.904.534	85.389.750	29.514.784	34,56
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	2.258.173	2.153.429	104.744	4,86
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	2.887.121	2.998.781	(111.660)	(3,72)
8	Ditjen Perbendaharaan	27.832.743	29.453.151	(1.620.408)	(5,50)
9	Ditjen Kekayaan Negara	14.668.376	17.012.345	(2.343.969)	(13,78)
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	27.913.178	15.244.432	12.668.746	83,10
11	Badan Kebijakan Fiskal	1.880.459	2.386.973	(506.514)	(21,22)
	Jumlah	402.192.661	374.600.258	27.592.403	7,37

D.2.3. Beban Barang dan Jasa

*Beban
Barang dan
Jasa
Rp12,93
triliun*

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa pada pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp12.932.743.025.323,00 dan Rp18.545.831.763.959,00.

Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 113
Rincian Beban Barang dan Jasa Per Akun
Periode TA 2018 dan TA 2017

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
Beban Barang Operasional	1.576.847.564	2.138.428.930	(561.581.366)	(26,26)
Beban Barang Non Operasional	2.072.413.269	1.348.315.314	724.097.955	53,70
Beban Langganan Daya dan Jasa	408.537.412	412.808.688	(4.271.276)	(1,03)
Beban Jasa Pos dan Giro	281.468	219.681	61.787	28,13
Beban Jasa Konsultan	19.629.851	27.592.821	(7.962.970)	(28,86)
Beban Sewa	427.673.658	390.301.530	37.372.128	9,58
Beban Jasa Profesi	117.754.134	70.949.296	46.804.838	65,97
Beban Jasa Lainnya	520.893.621	576.922.408	(56.028.787)	(9,71)
Beban Barang dan Jasa BLU	7.780.398.526	13.579.648.189	(5.799.249.663)	(42,71)
Beban Aset Ekstrakomptabel	8.313.522	644.907	7.668.615	1.189,10
Jumlah	12.932.743.025	18.545.831.764	(5.613.130.733)	(30,27)

Sedangkan rincian Beban Barang dan Jasa per unit Eselon disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 114
Rincian Beban Barang dan Jasa Per Unit Eselon I
Periode TA 2018 dan TA 2017

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2018	TA 2017	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	3.189.721.057	3.152.470.154	37.250.903	1,18
2	Inspektorat Jenderal	17.899.946	16.969.104	930.842	5,49
3	Ditjen Anggaran	27.864.620	31.707.280	(3.842.660)	(12,12)
4	Ditjen Pajak	2.229.458.221	2.205.074.812	24.383.409	1,11
5	Ditjen Bea dan Cukai	1.055.661.845	889.571.023	166.090.822	18,67
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	31.574.187	31.409.601	164.586	0,52
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	43.068.649	33.032.061	10.036.588	30,38
8	Ditjen Perpendidikan dan Pelatihan Keuangan	5.783.267.068	11.616.280.495	(5.833.013.427)	(50,21)
9	Ditjen Kekayaan Negara	150.177.416	134.772.671	15.404.745	11,43
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	364.073.888	392.050.969	(27.977.081)	(7,14)
11	Badan Kebijakan Fiskal	39.976.128	42.493.594	(2.517.466)	(5,92)
	Jumlah	12.932.743.025	18.545.831.764	(5.613.088.739)	(30,27)

D.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp1,25 triliun

Beban Pemeliharaan adalah beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.245.505.584.295,00 dan Rp1.243.607.606.014,00.

Rincian Beban Pemeliharaan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 115
Rincian Beban Pemeliharaan Per Akun
Periode TA 2018 dan TA 2017

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	392.393.259	398.963.343	(6.570.084)	(1,65)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	765.464.776	756.003.646	9.461.130	1,25
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.432.039	3.138.692	1.293.347	41,21
Beban Pemeliharaan Lainnya	45.015.898	42.424.027	2.591.871	6,11
Beban Barang dan Jasa BLU	9.152.114	8.850.001	302.113	3,41
Beban Persediaan Suku Cadang	-	19.263.349	(19.263.349)	(100,00)
Beban Persediaan Untuk Pemeliharaan	29.000.786	14.922.554	14.078.232	94,34
Beban Aset Ekstrakomptabel	46.712	41.994	4.718	11,24
Jumlah	1.245.505.584	1.243.607.606	1.897.978	0,15

Sedangkan rincian Beban Pemeliharaan per eselon I disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 116
Rincian Beban Pemeliharaan Per Eselon I
Periode TA 2018 dan TA 2017

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2018	TA 2017	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	161.158.872	167.169.998	(6.011.126)	(3,60)
2	Inspektorat Jenderal	4.826.453	2.928.072	1.898.381	64,83
3	Ditjen Anggaran	4.378.995	4.245.297	133.698	3,15
4	Ditjen Pajak	451.407.515	458.575.674	(7.168.159)	(1,56)
5	Ditjen Bea dan Cukai	388.431.534	378.867.566	9.563.968	2,52
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	7.618.859	10.717.191	(3.098.332)	(28,91)
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	4.241.292	3.913.753	327.538	8,37
8	Ditjen Perbendaharaan	149.437.266	149.237.285	199.980	0,13
9	Ditjen Kekayaan Negara	46.755.117	46.822.120	(67.002)	(0,14)
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	20.357.799	15.775.341	4.582.458	29,05
11	Badan Kebijakan Fiskal	6.891.882	5.355.309	1.536.573	28,69
	Jumlah	1.245.505.584	1.243.607.606	1.897.978	0,15

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp1,76
triliun*

D.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar **Rp1.760.282.211.778,00** dan **Rp1.626.381.716.763,00**.

Rincian Beban Perjalanan Dinas disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 117
Rincian Beban Perjalanan Dinas per Akun
Periode TA 2018 dan TA 2017

Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan / Penurunan	(dalam ribuan rupiah) Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1.317.200.127	1.218.819.121	98.381.006	8,07
Beban Perjalanan Tetap	16.928	-	16.928	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	105.519.526	94.922.317	10.597.209	11,16
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	102.539.378	98.462.000	4.077.378	4,14
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	115.644.630	106.893.908	8.750.722	8,19
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	52.376.106	52.159.005	217.101	0,42
Beban Perjalanan Tetap - Luar Negeri	15.610.792	17.325.557	(1.714.765)	(9,90)
Beban Perjalanan	51.374.725	37.799.809	13.574.916	35,91
Jumlah	1.760.282.212	1.626.381.717	133.900.495	8,23

Sedangkan rincian Beban Perjalanan Dinas per unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 118
Rincian Beban Perjalanan Dinas Per Eselon I
Periode TA 2018 dan TA 2017

No.	Unit Eselon I	TA 2018	TA 2017	Kenaikan / Penurunan	(dalam ribuan rupiah) Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	126.331.729	106.869.393	19.462.336	18,21
2	Inspektorat Jenderal	28.791.782	27.945.393	846.389	3,03
3	Ditjen Anggaran	22.293.596	22.125.651	167.945	0,76
4	Ditjen Pajak	705.500.409	666.004.356	39.496.053	5,93
5	Ditjen Bea dan Cukai	338.019.761	336.883.123	1.136.638	0,34
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	32.331.699	28.482.308	3.849.391	13,52
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	20.808.407	25.461.968	(4.653.561)	(18,28)
8	Ditjen Perbendaharaan	189.451.884	166.044.939	23.406.945	14,10
9	Ditjen Kekayaan Negara	173.513.024	144.212.547	29.300.477	20,32
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	84.788.854	61.228.674	23.560.180	38,48
11	Badan Kebijakan Fiskal	38.451.067	41.123.365	(2.672.298)	(6,50)
	Jumlah	1.760.282.212	1.626.381.717	133.900.495	8,23

*Beban
Barang
Untuk
Diberikan
Kepada
Masyarakat
Rp453,46
miliar*

D.2.6. Beban Barang untuk Diberikan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diberikan kepada Masyarakat adalah beban barang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diberikan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar **Rp453.463.604.095,00** dan **Rp465.338.954.744,00**.

Rincian Beban Barang untuk Diberikan kepada Masyarakat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 119
Rincian Beban Barang untuk Diberikan Kepada Masyarakat Per Akun
Periode TA 2018 dan TA 2017

Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan / Penurunan	(dalam ribuan rupiah)
Beban Barang Lainnya Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pemda	453.463.604	465.338.955	(11.875.351)	(2,55)
Jumlah	453.463.604	465.338.955	(11.875.351)	(2,55)

Sedangkan rincian Beban Barang untuk Diberikan kepada Masyarakat per eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 120
Rincian Beban Barang untuk Diberikan Kepada Masyarakat Per Eselon I
Periode TA 2018 dan TA 2017

No.	Unit Eselon I	TA 2018	TA 2017	Kenaikan / Penurunan	(dalam ribuan rupiah)
1	Sekretariat Jenderal	0	8.011	(8.011)	(100,00)
2	Inspektorat Jenderal	0	0	-	-
3	Ditjen Anggaran	0	0	-	-
4	Ditjen Pajak	141.109.986	153.272.755	(12.162.769)	(7,94)
5	Ditjen Bea dan Cukai	312.353.618	312.058.189	295.429	0,09
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	0	0	-	-
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	0	0	-	-
8	Ditjen Perbendaharaan	0	0	-	-
9	Ditjen Kekayaan Negara	0	0	-	-
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	0	0	-	-
11	Badan Kebijakan Fiskal	0	0	-	-
	Jumlah	453.463.604	465.338.955	(11.875.351)	(2,55)

D.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp1,65
triliun*

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Adapun beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Jumlah beban penyusutan dan amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar **Rp1.653.119.744.914,00** dan **Rp1.591.499.698.350,00**.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 121
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per Akun
Periode TA 2018 dan TA 2017

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.085.491.037	1.066.529.424	18.961.613	1,78
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	395.659.875	376.246.942	19.412.933	5,16
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.382.321	16.583.164	(200.843)	(1,21)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	66.470	118.584	(52.114)	(43,95)
Beban Amortisasi Aset Lainnya	138.181.526	117.754.908	20.426.618	17,35
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	17.338.516	14.266.676	3.071.840	21,53
Jumlah	1.653.119.745	1.591.499.698	61.620.047	3,87

Sedangkan rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 122
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per Unit Eselon I
Periode TA 2018 dan TA 2017

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2018	TA 2017	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	183.570.155	181.229.346	2.340.809	1,29
2	Inspektorat Jenderal	4.695.763	4.572.986	122.777	2,68
3	Ditjen Anggaran	7.935.313	6.777.411	1.157.902	17,08
4	Ditjen Pajak	611.619.585	565.000.069	46.619.516	8,25
5	Ditjen Bea dan Cukai	711.945.098	692.616.839	19.328.259	2,79
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	8.805.763	6.217.886	2.587.877	41,62
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	7.003.619	6.423.558	580.061	9,03
8	Ditjen Perbendaharaan	273.893.466	250.059.962	23.833.504	9,53
9	Ditjen Kekayaan Negara	1.533.919.959	1.533.514.897	405.062	0,03
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	69.934.385	60.593.467	9.340.918	15,42
11	Badan Kebijakan Fiskal	8.932.644	8.601.585	331.059	3,85
	Jumlah	3.422.255.750	3.315.608.006	106.647.504	3,22

Tabel di atas belum termasuk koreksi atas Beban Penyusutan dan Amortisasi terkait hasil revaluasi Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan pada satuan kerja konsolidasi BA 015. Adapun nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi sebelum dan setelah koreksi adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018
1	Beban Penyusutan dan Amortisasi sebelum koreksi	3.422.255.749.958
2	Koreksi satker konsolidasi BA 015	(1.769.136.005.044)
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi setelah koreksi	1.653.119.744.914

D.2.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp9,48
triliun*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing **Rp9.481.188.543.090,00** dan **Rp21.257.126.841.481,00**.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 123
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per Akun
Periode TA 2018 dan TA 2017

Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan / Penurunan	(dalam ribuan rupiah) Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Pajak	9.480.573.981	21.254.350.032	(11.773.776.051)	(55,39)
Beban Penyisihan Piutang PNBP	(100.420)	(87.596)	(12.824)	14,64
Beban Penyisihan Piutang TP/TGR	62.403	(28.349)	90.752	(320,12)
Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional BLU	361.305	774.411	(413.106)	(53,34)
Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Non Operasional BLU	400	(330)	730	(221,22)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang	290.874	2.118.673	(1.827.799)	(86,27)
Jumlah	9.481.188.543	21.257.126.841	(11.775.938.298)	(55,40)

Sedangkan rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 124
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per Unit Eselon I
Periode TA 2018 dan TA 2017

No.	Unit Eselon I	TA 2018	TA 2017	Kenaikan / Penurunan	(dalam ribuan rupiah) Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	170.889	3.114.450	(2.943.561)	(94,51)
2	Inspektorat Jenderal	(24)	(19)	(5)	28,57
3	Ditjen Anggaran	157.644	2.063.439	(1.905.795)	(92,36)
4	Ditjen Pajak	9.396.535.303	20.638.715.267	(11.242.179.964)	(54,47)
5	Ditjen Bea dan Cukai	83.813.951	615.636.270	(531.822.319)	(86,39)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	23	(1.818)	1.841	(101,26)
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	42	-	42	-
8	Ditjen Perbendaharaan	(3.957)	(9.020)	5.063	(56,13)
9	Ditjen Kekayaan Negara	240.030	216.098	23.932	11,07
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	274.687	127.787	146.900	114,96
11	Badan Kebijakan Fiskal	(45)	(45)	0	(0,00)
	Jumlah	9.481.188.543	21.259.862.410	(11.778.673.867)	(55,40)

D.3. Surplus/ Defisit Kegiatan Operasional

*Surplus dari
Kegiatan
Operasional
Rp1.473,27
triliun*

Pos Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang sifatnya rutin dan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas selama satu periode pelaporan. Surplus Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar **Rp1.473.273.103.795.986,00** dan **Rp1.319.034.319.269.300,00**. Surplus Kegiatan Operasional merupakan selisih antara total Pendapatan

Operasional sebesar **Rp1.521.657.589.406.813,00** dan total Beban Operasional sebesar **Rp48.384.485.610.749,00**.

D.4. Surplus/ Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar

*Defisit dari
Pelepasan
Aset Non
Lancar
Rp13,60
miliar*

Surplus/ Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar terdiri dari pendapatan pelepasan aset non lancar dan beban kerugian pelepasan aset non lancar. Surplus/ Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah defisit sebesar **Rp13.602.319.294,00** dan surplus **Rp3.433.465.743,00**. Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar pada 31 Desember 2018 merupakan selisih antara total Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar **Rp25.893.211.740,00** dan total Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar **Rp39.495.531.034,00**.

Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada 31 Desember 2018 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 125
Rincian Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar Per Akun
Periode TA 2018 dan TA 2017

Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan/ Penurunan	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.912	51.825	(40.913)	(78,94)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	5.512.890	2.998.427	2.514.463	83,86
Pendapatan dari Pemindahtempatannya BMN Lainnya	20.369.410	28.074.780	(7.705.370)	(27,45)
Jumlah	25.893.212	31.125.032	(5.231.820)	(16,81)

Sedangkan rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 126
Rincian Beban Kerugian dari Pelepasan Aset Non Lancar Per Unit Eselon I
Periode TA 2018 dan TA 2017

No.	Unit Eselon I	TA 2018	TA 2017	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	1.246.513	359.264	887.249	246,96
2	Inspektorat Jenderal	71.900	0	71.900	-
3	Ditjen Anggaran	457.975	16.000	441.975	2.762,34
4	Ditjen Pajak	8.504.660	6.791.423	1.713.237	25,23
5	Ditjen Bea dan Cukai	11.371.930	18.669.946	(7.298.016)	(39,09)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	121.983	1.486.828	(1.364.845)	(91,80)
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	235.040	0	235.040	-
8	Ditjen Perbendaharaan	1.758.082	798.760	959.322	120,10
9	Ditjen Kekayaan Negara	1.131.319	1.165.356	(34.037)	(2,92)
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	550.214	665.888	(115.674)	(17,37)
11	Badan Kebijakan Fiskal	443.596	1.171.567	(727.971)	(62,14)
	Jumlah	25.893.212	31.125.032	(5.231.820)	(16,81)

Kenaikan Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar pada unit eselon I Ditjen Anggaran merupakan hasil penjualan lelang atas BMN berupa kendaraan bermotor, hasil bongkaran dan persediaan usang.

Rincian Beban Kerugian Pelepasan Aset Non Lancar disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 127
Rincian Beban Kerugian dari Pelepasan Aset Non Lancar
Periode TA 2018 dan TA 2017

Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan/ Penurunan	Naik (Turun) %
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	40.173.340	27.691.566	12.481.774	45,07
Jumlah	40.173.340	27.691.566	12.481.774	45,07

Sedangkan rincian Beban Kerugian Pelepasan Aset Non Lancar per unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 128
Rincian Beban Kerugian dari Pelepasan Aset Non Lancar Per Unit Eselon I
Periode TA 2018 dan TA 2017

No.	Unit Eselon I	TA 2018	TA 2017	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	8.548.931	419.736	8.129.195	1.936,74
2	Inspektorat Jenderal	3.469	0	3.469	-
3	Ditjen Anggaran	19.003	0	19.003	-
4	Ditjen Pajak	3.375.896	6.788.593	(3.412.697)	(50,27)
5	Ditjen Bea dan Cukai	19.697.112	16.294.130	3.402.982	20,88
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	34.757	476	34.281	7.201,92
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	34.757	241	34.516	14.344,53
8	Ditjen Perbendaharaan	4.149.017	3.311.090	837.927	25,31
9	Ditjen Kekayaan Negara	1.367.956	255.893	1.112.063	434,58
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	2.942.442	197.772	2.744.670	1.387,80
11	Badan Kebijakan Fiskal	0	423.635	(423.635)	(100,00)
	Jumlah	40.173.340	27.691.566	12.481.774	45,07

Tabel di atas belum termasuk koreksi atas Beban Pelepasan Aset Non Lancar terkait hasil revaluasi Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan pada satuan kerja konsolidasi BA 015. Adapun nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebelum dan setelah koreksi adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018
1	Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebelum koreksi	40.173.340.337
2	Koreksi satker konsolidasi BA 015	(677.809.303)
3	Beban Pelepasan Aset Non Lancar setelah koreksi	39.495.531.034

D.5. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp156,21 miliar

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Surplus sebesar Rp156.207.458.393,00 dan Rp8.328.887.478,00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan selisih antara total Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp270.541.832.126,00 dan total Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp114.334.373.733,00.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 129
Rincian Pendapatan dari Kegiatan non Operasional Lainnya
Periode TA 2018 dan TA 2017

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0	1.140.691	(1.140.691)	(100,00)
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	0	34.571	(34.571)	(100,00)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	680.217	0	680.217	-
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	0	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	4.240.103	4.065.452	174.651	4,30
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	16.097.124	16.424.529	(327.405)	(1,99)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	693.481	0	693.481	-
Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi - BLU	10.971.331	938.348	10.032.983	1.069,22
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	6.773.072	178.014	6.595.058	3.704,79
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	74.356.313	54.556.503	19.799.810	36,29
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi BLU	258.139	38.456	219.683	571,26
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	22.848	3.990.413	(3.967.565)	(99,43)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	21.199.014	99.140.338	(77.941.324)	(78,62)
Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs	135.250.190	0	135.250.190	-
Jumlah	270.541.832	180.507.315	90.034.517	49,88

Sedangkan rincian Pendapatan dari Kegiatan non Operasional Lainnya per eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 130
Rincian Pendapatan dari Kegiatan non Operasional Lainnya Per Eselon I
Periode TA 2018 dan TA 2017

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2018	TA 2017	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	4.440.720	4.076.388	364.332	8,94
2	Inspektorat Jenderal	117.553	326.978	(209.425)	(64,05)
3	Ditjen Anggaran	462.411	215.213	247.198	114,86
4	Ditjen Pajak	220.552.697	150.467.709	70.084.987	46,58
5	Ditjen Bea dan Cukai	15.189.982	18.883.905	(3.693.923)	(19,56)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	427.372	143.654	283.718	197,50
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	445.967	133.991	311.976	232,83
8	Ditjen Perbendaharaan	10.010.184	2.906.650	7.103.535	244,39
9	Ditjen Kekayaan Negara	13.644.970	1.671.013	11.973.957	716,57
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	4.630.963	955.745	3.675.218	384,54
11	Badan Kebijakan Fiskal	619.012	726.069	(107.057)	(14,74)
	Jumlah	270.541.832	180.507.315	90.034.517	49,88

Rincian Beban dari kegiatan non operasional lainnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 131
Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Akun
Periode TA 2018 dan TA 2017

Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan/ Penurunan	Naik (Turun)
Beban Kerugian Persediaan Rusak/Usang	8.150.589	340.261	7.810.328	2.295,40
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	4.175.026	106.887.843	(102.712.817)	(96,09)
Beban Lain-Lain Selisih Kurs Terealisasi	4.800.875	8.408.469	(3.607.594)	(42,90)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	41.716.374	55.969.081	(14.252.707)	(25,47)
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU	66.183	-	66.183	-
Beban Penyesuaian Selisih Kurs	55.425.327	572.773	54.852.554	9.576,67
Jumlah	114.334.374	172.178.427	(57.844.053)	(33,60)

Beban kerugian selisih kurs belum terealisasi adalah selisih kurs atas piutang perpajakan wajib pajak yang menggunakan pembukuan dalam mata uang asing dan selisih kurs arus kas uang persediaan di perwakilan luar negeri.

Sedangkan rincian Beban dari kegiatan non operasional lainnya per unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 132
Rincian Beban dari Kegiatan non Operasional Lainnya Per Unit Eselon I
Periode TA 2018 dan TA 2017

(dalam ribuan rupiah)					
No.	Unit Eselon I	TA 2018	TA 2017	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	74.507.867	138.073	74.369.794	53.862,71
2	Inspektorat Jenderal	50.394	115.750	(65.356)	(56,46)
3	Ditjen Anggaran	109.731	31.439	78.292	249,03
4	Ditjen Pajak	89.756.097	136.715.854	(46.959.757)	(34,35)
5	Ditjen Bea dan Cukai	9.304.918	26.276.944	(16.972.026)	(64,59)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	52.371	84.306	(31.935)	(37,88)
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	61.431	4.515	56.916	1.260,60
8	Ditjen Perpendidaraan	6.825.312	7.465.484	(640.172)	(8,58)
9	Ditjen Kekayaan Negara	5.554.986	792.573	4.762.413	600,88
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	1.662.288	546.570	1.115.718	204,13
11	Badan Kebijakan Fiskal	141.111	6.919	134.192	1.939,35
	Jumlah	188.026.506	172.178.427	15.848.079	9,20

Tabel di atas belum termasuk koreksi atas Beban Penyesuaian Nilai Investasi atas penilaian investasi non permanen yang merupakan kategori *available for sale* pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dilakukan pada satuan kerja konsolidasi BA 015. Adapun nilai Beban dari kegiatan non operasional lainnya sebelum dan setelah koreksi adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018
1	Beban dari Kegiatan non Operasional Lainnya sebelum koreksi	188.026.505.733
2	Koreksi satker konsolidasi BA 015	(73.692.132.000)
3	Beban dari Kegiatan non Operasional Lainnya setelah koreksi	114.334.373.733

D.6. Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional

*Surplus
Kegiatan
Non
Operasional
Rp142.61
miliar*

Pos Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional diperoleh dari selisih antara pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Surplus sebesar **Rp142.605.139.099,00** dan **Rp11.762.353.221,00**. Surplus Kegiatan Non Operasional merupakan selisih antara Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar **Rp156.207.458.393,00** dan defisit dari Pelepasan Aset Non sebesar **Rp13.602.319.294,00**.

D.7. Surplus/ Defisit Laporan Operasional

*Surplus
Laporan
Operasional
Rp1.473,42
triliun*

Nilai Surplus/ Defisit Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah Surplus sebesar **Rp1.473.415.708.935.085,00**. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah antara Surplus Kegiatan Operasional sebesar **Rp1.473.273.103.795.986,00** dan Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar **Rp142.605.139.099,00**.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas kementerian adalah kekayaan bersih kementerian yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban kementerian pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal
Rp58,56
Triliun*

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah senilai **Rp58.566.437.595.383,00** dan **Rp53.903.725.923.605,00**.

Rincian Ekuitas Awal per Unit Eselon I dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 133
Rincian Ekuitas Awal Per Unit Eselon I
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Uraian	(dalam ribuan rupiah)		
		31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	34.437.956.192	9.637.230.250	257,34
2	Inspektorat Jenderal	96.447.763	21.625.941	345,98
3	Ditjen Anggaran	37.149.759	27.633.684	34,44
4	Ditjen Pajak	47.229.463.697	23.700.106.898	99,28
5	Ditjen Bea dan Cukai	19.301.943.877	8.376.817.398	130,42
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	24.255.545	18.284.053	32,66
7	Ditjen PPR	358.819.384	154.436.878	132,34
8	Ditjen Perbendaharaan	22.195.161.238	8.836.719.944	151,17
9	Ditjen Kekayaan Negara	21.002.955.833	967.865.947	2.070,03
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	6.822.257.127	2.144.570.113	218,12
11	Badan Kebijakan Fiskal	30.651.524	18.434.818	66,27
12	Konsolidasi Kementerian Keuangan	(92.970.624.344)	0	
	Jumlah	58.566.437.595	53.903.725.924	8,65

E.2. Surplus/Defisit LO

*Surplus LO
Rp1.473,41
Triliun*

Jumlah Surplus/ Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah surplus senilai **Rp1.473.415.708.935.086,00** dan **Rp1.319.046.081.622.521,00**. Surplus LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Rincian Surplus/ Defisit LO per Unit Eselon I dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 134
Rincian Surplus/ Defisit LO Per Unit Eselon I
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Uraian	(dalam ribuan rupiah)		
		31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	(17.440.685.692)	(15.035.311.897)	(16,00)
2	Inspektorat Jenderal	(100.812.152)	(94.937.104)	(6,19)
3	Ditjen Anggaran	(122.443.557)	(127.127.581)	3,68
4	Ditjen Pajak	1.269.790.796.974	1.142.818.055.734	11,11
5	Ditjen Bea dan Cukai	210.557.590.547	189.023.678.125	11,39
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	(114.936.627)	(105.995.461)	(8,44)
7	Ditjen PPR	(55.910.744)	(31.987.945)	(74,79)
8	Ditjen Perbendaharaan	8.561.006.911	1.981.290.214	332,09
9	Ditjen Kekayaan Negara	1.232.742.021	(399.446.979)	408,61
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	(605.270.367)	(577.167.690)	(4,87)
11	Badan Kebijakan Fiskal	(129.874.325)	(131.811.668)	1,47
12	Konsolidasi Kementerian Keuangan	1.843.505.946	1.726.843.875	6,76
	Jumlah	1.473.415.708.935	1.319.046.081.623	11,70

Kenaikan surplus LO tertinggi pada Ditjen Kekayaan Negara yaitu sebesar 408,61% dibanding tahun 2017 terutama disebabkan adanya kenaikan PNBP Lainnya pada BLU LMAN. Adapun kenaikan surplus LO tertinggi kedua terjadi pada Ditjen Perbendaharaan sebesar 332,09% yang disebabkan adanya penurunan Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada BLU BPDPKS.

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp18,58 juta

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah senilai **Rp18.577.099,00** dan **Rp1.092.429.501,00**

Adapun rincian koreksi nilai persediaan per Unit Eselon I dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 135
Rincian Koreksi Nilai Persediaan per Unit Eselon I
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Uraian	(dalam ribuan rupiah)		
		31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	0	0	
2	Inspektorat Jenderal	0	0	
3	Ditjen Anggaran	0	0	
4	Ditjen Pajak	1.628	19.569	(91,68)
5	Ditjen Bea dan Cukai	15	1.065.799	(100,00)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	0	0	
7	Ditjen PPR	0	0	
8	Ditjen Perbendaharaan	13.512	7.061	91,36
9	Ditjen Kekayaan Negara	3.422	0	
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	0	0	
11	Badan Kebijakan Fiskal	0	0	
12	Konsolidasi Kementerian Keuangan	0	0	
	Jumlah	18.577	1.092.429	(98,30)

E.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih
Revaluasi
Aset Tetap
Rp0,00*

Selisih Revaluasi Aset Tetap adalah selisih yang diakibatkan oleh penilaian kembali aset tetap. Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 nilai selisih revaluasi aset tetap adalah senilai Rp0,00.

Revaluasi aset tetap dilakukan berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali BMN/D pada Kementerian Keuangan. Rincian selisih revaluasi aset tetap per Unit Eselon I dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 136
Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per Unit Eselon I
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Uraian	(dalam ribuan rupiah)		
		31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	0	25.258.125.694	(100,00)
2	Inspektorat Jenderal	0	64.429.843	(100,00)
3	Ditjen Anggaran	0	16.685.953	(100,00)
4	Ditjen Pajak	945.903	25.505.269.582	(100,00)
5	Ditjen Bea dan Cukai	54.674.865	11.235.313.975	(99,51)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	0	0	
7	Ditjen PPR	0	199.380.435	(100,00)
8	Ditjen Perbendaharaan	0	7.663.161.660	(100,00)
9	Ditjen Kekayaan Negara	0	1.388.706.710	(100,00)
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	0	4.642.496.470	(100,00)
11	Badan Kebijakan Fiskal	0	1.852.710	(100,00)
12	Konsolidasi Kementerian Keuangan	(55.620.768)	(75.975.423.032)	99,93
	Jumlah	0	0	

Per tanggal 31 Desember 2017, Kementerian Keuangan telah menyelesaikan revaluasi aset dengan nilai selisih revaluasi aset tetap mencapai Rp75.975.423.031.858,00. Namun berdasarkan pemeriksaan BPK RI pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2017, penyajian nilai revaluasi aset tetap Kementerian Keuangan menunggu diselesaikannya pelaksanaan revaluasi objek penilaian kembali pada seluruh Kementerian/Lembaga.

Adapun pada tahun 2018, Kementerian Keuangan kembali melakukan revaluasi aset tetap dengan nilai selisih sebesar Rp54.674.865.618,00 pada 3 satker lingkup DJBC dan Rp945.902.567,00 pada 4 satker lingkup DJP. Namun berdasarkan pemeriksaan BPK RI TA 2018, BPK belum dapat meyakini hasil penilaian revaluasi tersebut. Dengan demikian, Kementerian Keuangan belum menyajikan angka selisih hasil revaluasi sebesar total Rp76.031.043.800.043,00 pada Laporan Keuangan TA 2018.

E.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

*Koreksi Nilai
Aset Non
Revaluasi
(Rp24,61
miliar)*

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan perolehan aset tetap misalnya reklasifikasi antar Aset Tetap yang menyebabkan perubahan penyusutan karena perbedaan masa manfaat Aset Tetap, dan koreksi atas kesalahan jurnal kirim SIMAK BMN ke SAIBA. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah senilai (Rp24.609.806.951,00) dan Rp203.454.580.356,00.

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per Unit Eselon I dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 137
Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per Unit Eselon I
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Uraian	(dalam ribuan rupiah)		
		31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	(770.164)	53.311.821	(101,44)
2	Inspektorat Jenderal	(275)	11.153.250	(100,00)
3	Ditjen Anggaran	3.075	321	857,94
4	Ditjen Pajak	(39.269.587)	51.051.502	(176,92)
5	Ditjen Bea dan Cukai	(1.575.347)	9.359.845	(116,83)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	98.876	0	
7	Ditjen PPR	26.181	493.800	(94,70)
8	Ditjen Perbendaharaan	(352.415)	11.774.515	(102,99)
9	Ditjen Kekayaan Negara	348.488.888	(3.732.912)	9.435,58
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	1.722.229	1.228.163	40,23
11	Badan Kebijakan Fiskal	0	0	
12	Konsolidasi Kementerian Keuangan	(332.981.268)	68.814.275	(583,88)
	Jumlah	(24.609.807)	203.454.580	(112,10)

Koreksi nilai aset non revaluasi tertinggi terjadi pada Ditjen Kekayaan Negara senilai **Rp348.488.888.192,00**. Nilai tersebut terdiri dari koreksi nilai aset tetap non revaluasi sebesar (**Rp337.727.644,00**) dan koreksi nilai aset lainnya non revaluasi sebesar **Rp348.826.615.836,00**. Salah satu penyumbang koreksi nilai aset non revaluasi adalah penyajian nilai *capital gain* hasil penilaian aset eks HTBI sebesar **Rp378.245.260.000,00**. Adapun yang lainnya merupakan koreksi dengan nilai netto minus **Rp29.756.371.808,00**.

Terkait dengan kebijakan tidak disajikannya aset yang dimiliki oleh BUN beserta akumulasi penyusutannya pada tingkat UAPA BA 015, maka koreksi nilai aset non revaluasi dimaksud dilakukan jurnal eliminasi pada Satker Konsolidasi Kementerian Keuangan.

E.6. Koreksi Lain-lain

*Koreksi
Lain-lain
Rp29.91
triliun*

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi atas nilai ekuitas yang disebabkan oleh selain koreksi nilai persediaan, revaluasi aset tetap dan koreksi nilai aset non revaluasi. Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah senilai **Rp29.907.120.106.114,00** dan senilai **Rp20.515.894.018,00**.

Adapun rincian Koreksi Lain-lain per Unit Eselon I dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut.

Tabel 138
Rincian Koreksi Lain-lain Menurut Eselon I
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Uraian	(dalam ribuan rupiah)		
		31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	(105.297.921)	(74.802)	(140.668,86)
2	Inspektorat Jenderal	0	0	
3	Ditjen Anggaran	0	0	
4	Ditjen Pajak	29.994.138.191	23.274.896	128.769,05
5	Ditjen Bea dan Cukai	(12.931.335)	2.146.095	(702,55)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	0	0	
7	Ditjen PPR	(66.000)	0	
8	Ditjen Perbendaharaan	35.015.815	(4.129.426)	947,96
9	Ditjen Kekayaan Negara	(964.900)	(1.537.515.540)	99,94
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	(37.567)	59.997	(162,62)
11	Badan Kebijakan Fiskal	0	0	
12	Konsolidasi Kementerian Keuangan	(2.736.177)	1.536.754.675	(100,18)
	Jumlah	29.907.120.106	20.515.895	145.675,36

Koreksi lain-lain tertinggi jika dilihat dari persentase terjadi pada Sekretariat Jenderal yang disebabkan kebijakan pengakuan nilai amortisasi premium kepemilikan Surat Utang Negara oleh BLU LPDP sebesar **Rp133.694.216.832,00** sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.

Adapun kenaikan koreksi lain-lain tertinggi secara nominal rupiah terjadi di Ditjen Pajak senilai **Rp29.994.138.191.495,00**. Koreksi dimaksud sebagian besar disebabkan koreksi tambah piutang perpajakan atas piutang pajak yang terjadi pada periode tahun sebelumnya yang sesuai dengan proses bisnis Ditjen Pajak baru diakui /dicatat pada periode berjalan (rincian pada tabel berikut).

Tabel 139
Rincian Koreksi Lain-lain pada Ditjen Pajak
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018

Akun	Uraian	(dalam rupiah)		
		Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Koreksi Netto
115121	Piutang PPh Pasal 21	362.077.903.327	(50.948.858.717)	311.129.044.610
115122	Piutang PPh Pasal 22	25.111.952.469	(1.151.932.947)	23.960.019.522
115124	Piutang PPh Pasal 23	2.119.197.823.359	(95.373.560.528)	2.023.824.262.831
115125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	213.552.818.049	(30.323.026.823)	183.229.791.226
115126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	13.908.317.480.385	(956.369.904.957)	12.951.947.575.428
115127	Piutang PPh Pasal 26	2.530.823.392.256	(413.962.806.413)	2.116.860.585.843
115128	Piutang PPh Final	2.189.294.625.685	(114.164.002.132)	2.075.130.623.553
115131	Piutang PPN Dalam Negeri	9.416.354.073.283	(658.577.014.934)	8.757.777.058.349
115141	Piutang PPnBM dalam Negeri	249.934.001.229	(2.627.012.852)	247.306.988.377
115153	Piutang PBB Perkebunan	153.834.067.272	(43.876.968.034)	109.957.099.238
115154	Piutang PBB Kehutanan	112.719.024.839	(58.208.807.532)	54.510.217.307
115155	Piutang PBB Pertambangan	1.107.013.743.740	(265.240.164.335)	841.773.579.405
115159	Piutang PBB Lainnya	538.168.095	-	538.168.095
115172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	398.862.000	(284.384.000)	114.478.000
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	1.449.407.908.127	(1.509.745.143.489)	(60.337.235.362)
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	262.819.853.025	(2.221.969.182)	260.597.883.843
115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	94.355.358.971	-	94.355.358.971
-	Koreksi Non Piutang	1.572.784.890	(110.092.631)	1.462.692.259
	Jumlah	34.197.323.841.001	(4.203.185.649.506)	29.994.138.191.495

E.7. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi
Antar Entitas
(Rp1.488,35
triliun)*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah senilai **(Rp1.488.350.007.052.967,00)** dan **(Rp1.314.608.432.854.618,00)**. Nilai tersebut merupakan transaksi antara Entitas Pelaporan dengan Entitas Pelaporan lain (Diterima dari Entas Lain, Ditagihkan ke Entitas Lain dan Pengesahan Hibah Langsung) serta antar unit di dalam Entitas Pelaporan itu sendiri maupun dengan Entitas Pelaporan lain (Transfer Masuk dan Transfer Keluar). Transfer Masuk dan Transfer Keluar sebagian besar disebabkan adanya perpindahan aset berupa piutang pajak dan aset tetap dari satu instansi/satker ke instansi/satker lain.

Rincian Transaksi Antar Entitas per Akun dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 140
Rincian Transaksi Antar Entitas per Akun
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam ribuan rupiah)					
No.	Akun	Uraian Akun	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik (Turun) %
1	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	31.174.136.163	27.009.602.444	15,42
2	313121	Diterima dari Entitas Lain	(1.519.507.489.543)	(1.344.188.604.171)	(13,04)
3	313211	Transfer Keluar	(7.010.187.583)	(1.311.216.843)	(434,63)
4	313221	Transfer Masuk	6.979.801.983	1.354.352.395	415,36
5	391131	Pengesahan Hibah Langsung	13.887.909	27.433.320	(49,38)
6	391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(155.982)	0	
7	391141	Setoran Surplus BLU	0	2.500.000.000	(100,00)
		Jumlah Transaksi Antar Entitas	(1.488.350.007.053)	(1.314.608.432.855)	(13,22)

Adapun selisih antara Transfer Keluar dan Transfer Masuk per 31 Desember 2018 senilai **Rp30.385.599.920,00** dapat dijelaskan berikut:

1. Sebesar **Rp32.690.814.487,00** merupakan transfer keluar Kementerian Keuangan ke K/L lain.
2. Sebesar **(Rp535.186.248,00)** merupakan kesalahan pencatatan yang sudah dilakukan koreksi.
3. Sebesar **(Rp1.770.028.319,00)** merupakan selisih akibat *take out* revaluasi BMN.

Rincian Transaksi Antar Entitas per Unit Eselon I dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 141
Rincian Transaksi Antar Entitas per Unit Eselon I
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Uraian			(dalam ribuan rupiah)
		31 Desember 2018	31 Desember 2017	
1	Sekretariat Jenderal	17.173.796.683	14.524.675.126	18,24
2	Inspektorat Jenderal	103.891.466	94.175.835	10,32
3	Ditjen Anggaran	137.796.213	119.957.382	14,87
4	Ditjen Pajak	(1.306.656.439.752)	(1.144.868.314.483)	(14,13)
5	Ditjen Bea dan Cukai	(201.981.949.927)	(189.346.437.359)	(6,67)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	129.223.086	111.966.953	15,41
7	Ditjen PPR	21.089.842	36.496.215	(42,21)
8	Ditjen Perbendaharaan	1.747.091.437	3.706.337.269	(52,86)
9	Ditjen Kekayaan Negara	347.863.527	20.587.078.607	(98,31)
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	645.615.435	611.070.074	5,65
11	Badan Kebijakan Fiskal	133.774.189	142.175.664	(5,91)
12	Konsolidasi Kementerian Keuangan	(151.759.252)	(20.327.614.138)	99,25
	Jumlah	(1.488.350.007.053)	(1.314.608.432.855)	13,22

E.8. Ekuitas Akhir

***Ekuitas Akhir**
Rp73,51
triliun*

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah senilai **Rp73.514.668.353.763,00** dan **Rp58.566.437.595.383,00**. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan saldo awal ekuitas, Surplus/ Defisit LO, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar dan Transaksi Antar Entitas.

Rincian Ekuitas Akhir per Unit Eselon I dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 142
Rincian Ekuitas Akhir per Unit Eselon I
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Uraian			(dalam ribuan rupiah)
		31 Desember 2018	31 Desember 2017	
1	Sekretariat Jenderal	34.064.999.097	34.437.956.192	(1,08)
2	Inspektorat Jenderal	99.526.803	96.447.763	3,19
3	Ditjen Anggaran	52.505.491	37.149.759	41,33
4	Ditjen Pajak	40.319.637.054	47.229.463.697	(14,63)
5	Ditjen Bea dan Cukai	27.917.752.696	19.301.943.877	44,64
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	38.640.880	24.255.545	59,31
7	Ditjen PPR	323.958.663	358.819.384	(9,72)
8	Ditjen Perbendaharaan	32.537.936.499	22.195.161.238	46,60
9	Ditjen Kekayaan Negara	22.931.088.790	21.002.955.833	9,18
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	6.864.286.857	6.822.257.127	0,62
11	Badan Kebijakan Fiskal	34.551.388	30.651.524	12,72
12	Konsolidasi Kementerian Keuangan	(91.670.215.864)	(92.970.624.344)	1,40
	Jumlah	73.514.668.354	58.566.437.595	25,52

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

*Temuan dan
Tindak Lanjut
Temuan BPK*

Daftar temuan dan tindak lanjut temuan BPK RI sampai dengan 31 Desember 2018 terlampir .

F.2. Rekening Pemerintah

*Rekening
Pemerintah*

Jumlah rekening pemerintah lingkup Kementerian Keuangan yang terdata sampai 31 Desember 2018 adalah 2.326 rekening senilai Rp29.918.735.601.866,00. Rekapitulasi rekening pemerintah lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 143
Rekening Pemerintah Lingkup Kementerian Keuangan
per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Kode Unit	Nama Unit Eselon I	Mata Uang	Rekening Pengeluaran		Rekening Penerimaan		Rekening Lainnya	
			Jumlah	Saldo	Jumlah	Saldo	Jumlah	Saldo
01	Sekretariat Jenderal	IDR	32	12.296.573.921	2	-	36	329.868.329.109
02	Inspektorat Jenderal	IDR	4	-	-	-	1	-
03	Ditjen Anggaran	IDR	1	-	-	-	1	-
04	Ditjen Pajak	IDR	583	12.335.564	-	-	397	984
05	Ditjen Bea dan Cukai	IDR	138	216.000	80	5.207.252.814	173	201.425.859.670
06	Ditjen Perimbangan Keuangan	IDR	1	-	-	-	1	-
07	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	IDR	1	-	-	-	-	-
08	Ditjen Perbendaharaan	IDR	219	204.298.475	-	-	287	23.815.913.566.562
09	Ditjen Kekayaan Negara	IDR	90	86.971	1	-	232	5.524.375.204.181
11	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	IDR	21	-	3	18.800.000	19	29.413.077.615
12	Badan Kebijakan Fiskal	IDR	1	-	-	-	2	-
JUMLAH		IDR	1.091	12.513.510.931	86	5.226.052.814	1.149	29.900.996.038.121

Daftar rekening pemerintah lingkup Kementerian Keuangan terlampir.

F.3. Rekapitulasi Piutang Negara Instansi Pemerintah/Lembaga Negara yang aktif diurus oleh PUPN/DJKN

F.3.1. Piutang Negara

Jumlah Piutang Negara yang diserahkan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga Negara kepada DJKN per 31 Desember 2018 adalah 65.755 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) sebesar Rp68.800.031.729.186,00 dalam jumlah mata uang rupiah. Realisasi Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS) sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp221.799.993.836,28 atau sebesar 44,75% jika dibandingkan dengan target PNDS tahun 2018 sebesar Rp495.559.642.060,00. Sedangkan realisasi BIAD PPN sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp11.735.947.235,56 atau sebesar 42,48% jika dibandingkan dengan target BIAD PPN tahun 2018 sebesar Rp27.629.721.509,00.

F.3.2. Daftar Barang Jaminan

Jumlah Barang Jaminan BKPN Instansi Pemerintah/Lembaga Negara per 31 Desember 2018 sebanyak **10.378** unit. Jumlah tersebut terdiri dari Barang Bergerak sebanyak **4.518** unit dan Barang Tidak Bergerak sebanyak **5.860** unit. Rekapitulasi Daftar Barang Jaminan per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 144
Rekapitulasi Barang Jaminan Per 31 Desember 2018

Penyerah Piutang	Saldo Barang Jaminan		
	Barang Bergerak	Barang Tidak Bergerak	Total
Instansi Pemerintah Pusat	4.183	4.422	8.605
Instansi Pemerintah Daerah	335	1.438	1.773
JUMLAH	4.518	5.860	10.378

F.4. Pengungkapan Lain-Lain

F.4.1. Implementasi SPAN-SAKTI

Di Indonesia, pengelolaan keuangan negara dimulai dengan adanya transaksi keuangan di lingkup Satuan Kerja di Kementerian Negara/Lembaga. Dalam lingkup satuan kerja tersebut, implementasi *Integrated Financial Management Information System (IFMIS)* diwujudkan dalam bentuk beberapa penyempurnaan proses bisnis pengelolaan keuangan negara dengan menggunakan aplikasi yang terintegrasi. Perubahan yang dilaksanakan meliputi penyederhanaan aplikasi yang saat ini jumlahnya sangat banyak pada satuan kerja dengan *database* yang terpisah-pisah, menjadi satu aplikasi dengan *database* yang terintegrasi. Penyederhanaan sistem aplikasi ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya duplikasi pekerjaan dan pengulangan *entry data*.

Duplikasi pekerjaan dan *entry data* pada prakteknya seringkali menyebabkan terjadinya perbedaan data antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya sehingga informasi yang dihasilkan pun menjadi tidak akurat. Penggabungan aplikasi dan *database* pada tingkat satuan kerja akan diwujudkan dalam suatu sistem aplikasi di lingkup satuan kerja yang dinamakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

SAKTI meliputi penggabungan fungsi-fungsi dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan APBN, hingga penyusunan laporan keuangan. Dalam penyusunan anggaran, fungsi yang akan digabung meliputi penyusunan RKAKL, penyusunan DIPA dan revisi DIPA. Dalam pelaksanaan APBN, akan terdapat beberapa proses bisnis yang baru, yaitu manajemen data *supplier*, manajemen data kontrak, Resume Tagihan dan Surat Perintah Membayar. Dalam penyusunan laporan keuangan, penyempurnaan yang akan dilakukan meliputi aplikasi akuntansi keuangan, akuntansi barang milik negara, rekonsiliasi SAI, penyusunan LPJ bendahara, dan akuntansi persediaan. Untuk memfasilitasi pengiriman data dari aplikasi SAKTI yang ada di lingkup satuan kerja ke aplikasi SPAN yang ada pada Kementerian Keuangan, juga dikembangkan aplikasi pendukung yang meliputi Portal SPAN dan SPAN SMS. Sejak tahun 2015, semua KPPN di Indonesia telah menerapkan SPAN.

Pelaksanaan *Piloting SAKTI* meliputi seluruh modul yang terdapat dalam aplikasi SAKTI yaitu:

- a. Modul Penganggaran;
- b. Modul Komitmen;
- c. Modul Bendahara;
- d. Modul Pembayaran;
- e. Modul Persediaan;
- f. Modul Aset Tetap; dan
- g. Modul Akuntansi dan Pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018, bahwa piloting SAKTI telah dilaksanakan pada seluruh satker di Kementerian Keuangan pada Desember 2018 hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (4) PMK 159/PMK.05/2018.

F.4.2. Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Triwulan IV TA 2018

Sampai dengan 31 Desember 2018, Kementerian Keuangan menerima Pinjaman dan Hibah dari entitas lain, dengan realisasi pinjaman sebesar [Rp0,00](#) dan realisasi hibah sebesar [Rp42.344.743.234,00](#) dengan rekapitulasi PHLN per unit eselon I sebagai berikut:

Tabel 145
Rekapitulasi PHLN Per 31 Desember 2018

NO	REGISTER	NAMA PINJAMAN / HIBAH	SUMBER DANA	JENIS	PAGU DIPA 2018	REALISASI s.d. Q4		STATUS/KETERANGAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB
						NILAI	%		
BERDASARKAN DATA LPK-PHLN TERDAPAT DATA SEBAGAI BERIKUT									
1	2H816GHA	Public Financial Management Multi Donor Trust (PPFM-MDTF) II	European Union (EU) melalui WB	HIBAH TERENCANA BARANG/JASA	USD498.446 (Rp6.679.171.000)	USD181.000 (Rp2.600.078.230)	38,93%	-	PSSU SETJEN
2	2H816GHA	Public Financial Management Multi Donor Trust (PPFM-MDTF) II	European Union (EU) melalui WB	HIBAH TERENCANA BARANG/JASA	USD351.0000 (Rp4.703.400.000)	USD325.370 (Rp4.359.967.880)	92,69%	-	SPAN, DJPB
3	2H816GHA	Public Financial Management Multi Donor Trust (PPFM-MDTF) II	European Union (EU) melalui WB	HIBAH TERENCANA BARANG/JASA	235.560.000	125.302.830	53,19%	-	Direktorat KITSDA, DJP
4	74973301	Sustainable Infrastructure Assistance Program (C TA SIAP) Sub-project 9 - Strengthening Fiscal Risk Management of Accelerated Infrastructure Delivery	Australia - ADB	HIBAH LANGSUNG	-	274.800.000	-	-	DJPPR
5	24DE9BGA	Indonesia Infrastructure Finance Development Trust Fund (InIFD)	Canada melalui WB	HIBAH TERENCANA BARANG/JASA	19.001.526.000	16.968.301.515	89,30%	-	PDPP, DJPPR
6	71484001	Australia-Indonesia Partnership For Economic Governance (APEG)	APEG	HIBAH LANGSUNG JASA	-	3.762.282.381	HIBAH LANGSUNG YANG BELUM DISAHKAN	Direktorat KITSDA, DJP	
7	71012601	Government Partnership Fund (GPF) Phase II	APEG	HIBAH LANGSUNG JASA	-	2.751.612.930	-	Direktorat KITSDA, DJP	
8	905001	Project For Enhancing Tax Monitoring and Enforcement through the DGT Through The Prevention of Tax Disputes and Improvement in The Management of Human Resource and Management	JICA	HIBAH LANGSUNG JASA	-	1.630.118.600	HIBAH LANGSUNG YANG BELUM DISAHKAN	Direktorat KITSDA, DJP	
9	2VBBMK3A	Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kegiatan (KOMPAK)	Pemerintah Australia	HIBAH LANGSUNG BARANG/JASA	-	3.126.237.977	HIBAH LANGSUNG YANG SUDAH DISAHKAN	Sekretariat Ditjen	
10	21SRT4Y3	Strengthening Knowledge Sharing in Indonesia	Asian Development Bank	HIBAH LANGSUNG UANG	-	155.981.923	HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN	PKEM, BKF	
11	2UL5W29A	Promoting Innovative Financial Inclusion (PIFI)	Asian Development Bank	HIBAH LANGSUNG BARANG/JASA	-	75.308.140	HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN	PKSK, BKF	
12	251YQ1FA	Biodiversity Finance Initiative (BioFIN)	UNDP	HIBAH LANGSUNG BARANG/JASA	-	3.358.966.303	HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN	PKPPIM, BKF	
13	2Q36JPE4	Sustainable Development Financing	UNDP	HIBAH LANGSUNG BARANG/JASA	-	2.209.437.657	HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN	PKPPIM, BKF	
BERDASARKAN DATA SISTEM MONITORING REGISTER HIBAH DJPPR TERDAPAT DATA SEBAGAI BERIKUT									
NO	REGISTER	NAMA PINJAMAN / HIBAH	SUMBER DANA	JENIS	PAGU DIPA 2018	REALISASI s.d. Q4		STATUS/KETERANGAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB
						NILAI	%		
14	24622UXA	HIBAH BARANG BERUPA BANGUNAN MUSHOLA	PAGUYUBAN PEGAWAI KPP PRATAMA MUJARA BUNGO	HIBAH LANGSUNG BARANG	-	20.000.000	-	HIBAH LANGSUNG YANG SUDAH DISAHKAN	KPP PRATAMA MUJARA BUNGO
15	29SX5JSA	HBALANGSUNG BARANG BERUPA TANAH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C MOROWALI	PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI	HIBAH LANGSUNG BARANG	-	1.280.000.000	-	HIBAH LANGSUNG YANG SUDAH DISAHKAN	KPPBC TMP C PASANG KAYU
16	28EYVB1A	HIBAH LANGSUNG BARANG UNTUK KP2KP PASANGKAYU	PEMKB PASANGKAYU	HIBAH LANGSUNG BARANG	-	254.491.577	-	HIBAH LANGSUNG YANG SUDAH DISAHKAN	KP2KP PASANG KAYU
17	2CQS0RF4	HIBAH LANGSUNG BARANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN MASJID	DKM BAITUT TAQWA KEPADA KPP BEA DAN CUKAI TMP C BLITAR	HIBAH LANGSUNG BARANG	-	280.800.000	-	HIBAH LANGSUNG YANG SUDAH DISAHKAN	KPPBC TMP C BLITAR
18	2UD9SLUA	HIBAH TANAH BANGUNAN KANTOR KP2KP SIMPANG AMPAT	PEMDA KAB.PASAMAN BARAT	HIBAH LANGSUNG BARANG	-	140.026.645	-	HIBAH LANGSUNG YANG SUDAH DISAHKAN	KP2KP SIMPANG AMPAT
19	2ZDL9D6A	HIBAH LANGSUNG BARANG BERUPA PERALATAN MUSIC DAN DRONE	BADAN PEMBINA OLAHHRAGA DAN SENI (BAPORS) KPPN SANGGAU	HIBAH LANGSUNG BARANG	-	39.890.000	-	HIBAH LANGSUNG YANG SUDAH DISAHKAN	KPPN SANGGAU
20	2J3PP6AA	HIBAH LANGSUNG BARANG BERUPA 4 (EMPAT) BUAH KONTAINER UNTUK KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA BAGIAN TIMUR	PT.OKIPULP AND PAPER	HIBAH LANGSUNG BARANG	-	120.000.000	-	HIBAH LANGSUNG YANG SUDAH DISAHKAN	KANWIL DJBC SUMATERA BAGIAN TIMUR
21	2VMR88SA	HIBAH LANGSUNG BARANG BERUPA TANAH DAN BANGUNAN KPPBC SINTETE	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	HIBAH LANGSUNG BARANG	-	540.551.010	-	HIBAH LANGSUNG YANG SUDAH DISAHKAN	KPPBC SINTETE
22	21SRT4Y3	STRENGTHENING KNOWLEDGE SHARING IN INDONESIA	ADB	HIBAH LANGSUNG BARANG	-	-	-	HIBAH LANGSUNG YANG SUDAH DISAHKAN	PKEM, BKF
23	2X9MDPA4	HIBAH LANGSUNG BARANG BERUPA SARANA OLAHARGA	KELURAHAN TELUK AIR KECAMATAN KARIMUN	HIBAH LANGSUNG BARANG	-	451.733.000	-	HIBAH LANGSUNG YANG SUDAH DISAHKAN	KANWIL DJBC KEPULAUAN RIAU
24	2DXCX49A	HIBAH BARANG BERUPA BANGUNAN MUSHOLA PADA KPP PRATAMA BARABAI	PAGUYUBAN PEGAWAI KPP PRATAMA BARABAI	HIBAH LANGSUNG BARANG	-	387.505.000	-	HIBAH LANGSUNG YANG SUDAH DISAHKAN	KPP PRATAMA BARABAI
25	2VMU3N6A	HIBAH LANGSUNG BARANG BERUPA 2 (DUA) UNIT OVERHEAD CRANE PADA KANWIL DJBC KEPULAUAN RIAU	KOPERASI PRIMABAKTI	HIBAH LANGSUNG BARANG	-	361.451.000	-	HIBAH LANGSUNG YANG SUDAH DISAHKAN	PANGSAROP TANJUNG BALAI KARIMUN
26	2ACAQSRA	HIBAH LANGSUNG BARANG BERUPA PARTISIMEJA KERJA PADA KP2KP MARTAPURA IBA	MOKHAMAD REZA MUSLIM, DKK	HIBAH LANGSUNG BARANG	-	15.200.000	-	HIBAH LANGSUNG YANG SUDAH DISAHKAN	KP2KP MARTAPURA IBA
27	2CT8EMBA	HIBAH LANGSUNG BARANG BERUPA TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH PADA KP2KP PADANG ARO	PEMDA KAB. SOLOK SELATAN	HIBAH LANGSUNG BARANG	-	440.732.400	-	HIBAH LANGSUNG YANG SUDAH DISAHKAN	KP2KP PADANG ARO
28	27WQC72A	HIBAH LANGSUNG BARANG BERUPA GEDUNG BANGUNAN KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR 1	KOPERASI BINI CIPTA	HIBAH LANGSUNG BARANG	-	234.000.000	-	HIBAH LANGSUNG YANG SUDAH DISAHKAN	KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR 1
29	2315TERA	HIBAH LANGSUNG BARANG	YAFI TANZIL HUDA	HIBAH LANGSUNG BARANG	-	10.195.000	-	HIBAH LANGSUNG YANG SUDAH DISAHKAN	KPPN BATURAJA

F.4.3. Satker Konsolidasi

Satuan kerja konsolidasi adalah satker pada Kementerian Keuangan yang dibentuk untuk menampung transaksi resiprokal, koreksi atas transaksi yang belum diupload ke aplikasi e-Rekon & LK. Pada tahun 2018, transaksi yang direkam di satker konsolidasi adalah sebagai berikut:

1. Transaksi resiprokal antara LPDP dan LMAN terkait Belanja Dibayar Dimuka dan Pendapatan Diterima Dimuka;
2. Koreksi atas penyajian dana BUN yang dikelola oleh BLU berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-3481/PB/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Petunjuk Teknis Koreksi atas Penyajian Transaksi Terkait Investasi Jangka Panjang BLU Yang Bersumber Dari Anggaran BUN, termasuk dalam koreksi adalah Pendapatan yang Masih Harus Diterima milik BLU LMAN atas pengenaan *bank fee* yang seharusnya tidak dikenakan pada rekening dana kelolaan (pendanaan tanah PSN);
3. Transaksi *take out* revaluasi Aset yang dilakukan TA 2017 dan TA 2018;
4. Eliminasi transaksi ATR (Aset Tetap Renovasi) di Kementerian Keuangan.

F.4.4. Pengelolaan terkait Penyelesaian Kerugian Negara

Data Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan sebanyak 130 kasus dengan nilai sebesar [Rp14.716.336.327,70](#). Dalam laporan keuangan dicatat hanya 102 kasus dengan nilai [Rp12.290.518.550,18](#). Perbedaan pencatatan tersebut, terjadi karena terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pencatatan. Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan mencatat kasus kerugian negara pada Laporan Perkembangan Kerugian Negara apabila telah terdapat laporan kerugian negara kepada Menteri Keuangan, sedangkan pencatatan piutang TGR/TP pada Laporan Keuangan sesuai dengan Bultek Piutang dilakukan dalam hal kasus kerugian negara telah terdapat dokumen pengakuan piutang. Dokumen pengakuan piutang tersebut berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), Surat Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Negara, dan/atau SK Pembebanan BPK, sehingga kasus yang belum terdapat dokumen pengakuan piutang (SKTM, SKPGR, dan SK Pembebanan BPK) belum dapat diakui sebagai piutang dan tidak dicatat dalam Laporan Keuangan.

F.4.5. Pengendalian Intern Penyusunan Laporan Keuangan (PIPK)

Guna memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan disusun dengan pengendalian intern yang memadai, Kementerian Keuangan pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan telah menerapkan PIPK berdasarkan PMK 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan akun signifikan sebagai objek penilaian PIPK sebagai berikut:

1. Untuk satker DJP dan DJBC:
 - a. Piutang
 - b. Pendapatan
 - c. Penerimaan
2. Untuk satker selain DJP dan DJBC
 - a. Kas
 - b. Persediaan
 - c. Aset Tetap
 - d. PNBP
 - e. Beban

F.4.6. Revaluasi Aset Kementerian Keuangan

Pada tahun 2017 dilakukan penilaian kembali/revaluasi atas aset tetap. Penilaian Kembali merupakan proses revaluasi sesuai standar akuntansi pemerintah yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian. Pelaksanaan penilaian kembali aset tetap dilaksanakan berdasarkan:

- a. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
- c. PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- d. PMK Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara;
- e. PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

Penilaian kembali aset tetap dilakukan terhadap Barang Milik Negara berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, dan bangunan Air yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Penilaian kembali tidak dilakukan terhadap Barang Milik Negara yang telah mendapat persetujuan penghapusan atau pemindahtempahan dari Pengelola Barang/Pengguna Barang, dan Barang Milik Negara yang secara fisik tidak ditemukan.

Penilaian kembali aset tetap dilanjutkan sampai dengan 2018 oleh penilaian pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Penilaian BMN dilakukan dengan menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan. Penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek revaluasi Barang Milik Negara berupa tanah, sedangkan untuk Barang Milik Negara selain tanah tidak dilakukan survei lapangan.

Hasil Penilaian Kembali Aset Tetap tersebut belum dapat diyakini kebenarannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang, K/L selaku Pengguna Barang, dan Instansi terkait Lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah menunda pencatatan hasil penilaian kembali BMN sampai dengan perbaikan hasil penilaian kembali BMN.

Perubahan nilai aset tetap akibat penilaian kembali tidak dicatat sebagai koreksi hasil penilaian kembali aset tetap pada tahun 2018 dan tidak diakui sebagai penambahan ekuitas di dalam Laporan Keuangan BA 015.

F.4.7. Tuntutan Hukum

Berdasarkan PMK Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, perlakuan akuntansi atas tuntutan hukum kepada pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, dan telah dianggarkan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL;

- b. dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang *inkracht*, telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam CaLK LKKL secara agregat (yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum);
- c. dalam hal tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CaLK LKKL.

Pada 31 Desember 2018 terdapat 1 tuntutan hukum pada Sekretariat Jenderal yang telah memiliki putusan pengadilan *inkracht*, telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah, namun belum dianggarkan dalam DIPA senilai **Rp512.325.000,00**.

F.4.8. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP)

Pemberian Insentif BM-DTP Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2018 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018. BM-DTP diberikan kepada Industri Sektor tertentu dengan kriteria penilaian:

- a. memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi oleh masyarakat luas, dan/atau melindungi kepentingan konsumen;
- b. meningkatkan daya saing;
- c. meningkatkan penyerapan tenaga kerja; dan
- d. meningkatkan pendapatan negara.

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) tidak diberikan atas :

- a. Barang dan Bahan yang dikenakan tarif umum Bea Masuk sebesar 0% (nol persen);
- b. Barang dan Bahan yang dikenakan tarif Bea Masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
- c. Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/ Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan;
- d. Barang dan Bahan yang ditujukan untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.

ALOKASI PAGU BM-DTP TAHUN 2018

Pemerintah bersama dengan DPR telah menetapkan alokasi pagu BM-DTP tahun 2018 dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp646.358.978.000**.

DASAR PELAKSANAAN BM-DTP TAHUN 2018

Dasar pelaksanaan BM-DTP yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri sektor tertentu (PMK induk). Berdasarkan PMK tersebut, selanjutnya dihimpun sektor-sektor industri yang dapat menerima BM-DTP, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PMK BM-DTP induk tersebut. Hasil dari penilaian kelayakan sektor industri dimaksud, ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, yang didalamnya terdapat penetapan sektor industri tertentu beserta besaran pagu yang dialokasikan untuk BM-DTP. Untuk tahun 2018, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 146

Daftar Pagu Anggaran Sektor Industri dan Kuasa Pengguna Anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2018

No	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
1.	Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka - Kementerian Perindustrian	Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, <i>Biaxially Oriented Poly Propylene Film</i> , <i>Cast Poly Propylene Film</i> , Karung Plastik, Palet Plastik, Botol Dan Jerigen Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang dan/ atau Perabot Rumah Tangga dari Plastik	114.000.000.000
		Pembuatan Kosmetik	15.000.000.000
		Pembuatan <i>Polyester</i> Berlapis Logam dan Kaca Film	520.000.000
		Pembuatan Amplas	400.000.000

	Pembuatan Resin Berupa <i>Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Emulsi Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Latex Synthetic Resin Dispersion, Plasticizer, Formaldehyde dan Formaldehyde Resin</i>	6.000.000.000
	Pembuatan Bahan Kimia Khusus yaitu <i>Masterbach; Penetralsir Air Limbah berupa Aquaclear Series (Flocculant), Bahan Kimia untuk Kertas, dan Katalis berupa Mepoxe, Cypoxe, Cypoxe Liquid, Benzoxe</i>	3.000.000.000
	Pembuatan Pupuk <i>Borate</i>	3.000.000.000
	Pembuatan Dikalsinasi Kokas (<i>Calcined Petroleum Coke</i>)	8.000.000.000
	Karpet, Permadani, Sajadah dan/atau PU, PVC <i>Artificial</i>	65.000.000.000
	Pembuatan Serat/Benang/Strip Filamen Buatan dan/ atau Serat Stapel	3.130.482.000
	Pembuatan Mainan Anak	4.000.000.000
	Pembuatan Kacamata	2.000.000.000

2.	Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika Kementerian Perindustrian	Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar	800.000.000
		Pembuatan Komponen Alat dan Mesin Pertanian	2.000.000.000
		Pembuatan Peralatan Energi dan Ketenagalistrikan	8.000.000.000
		Pembuatan Komponen dan Peralatan Pabrik	3.691.500.000
		Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor	150.000.000.000
		Pembuatan Sepeda	40.000.000.000
		Pembuatan dan Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/Diesel, Bogie, dan Komponen Kereta Api	20.000.000.000
		Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika	21.064.151.500
		Pembuatan Kabel Serat Optik	2.471.519.000
		Pembuatan Peralatan Telekomunikasi	3.571.200.000
		Pembuatan <i>Smart Card</i> Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik <i>Security</i> , Kartu Elektronik dan Kartu Telepon Selular	8.699.954.000
		Pembuatan Telepon Selular	8.480.721.500
3.	Direktur Jenderal Industri Argo – Kementerian Perindustrian	Pembuatan Kemasan Kaleng dan Tutup Botol (<i>Crown Cork</i>)	21.000.000.000
		Pembuatan <i>Lead Ingots</i> (Timah Hitam)	6.000.000.000
4.	Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA - Badan Pengawas Obat dan Makanan	Pengolahan Kacang Almond	1.876.592.000
		Pembuatan Sediaan Farmasi	12.000.000.000

DJBC juga menyiapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mengatur teknis pemberian BM-DTP beserta tata cara importasi dan pertanggungjawaban dokumen importasi sehubungan dengan pemberian BM-DTP tersebut. Perdirjen dimaksud ditetapkan melalui PER-10/BC/2018 tanggal 21 Mei 2018.

REALISASI BM-DTP TAHUN 2018

Dari alokasi pagu BM-DTP Tahun 2018 tersebut terealisasi sebesar Rp370.614.637.000 atau sebesar **57,34** persen dari alokasi pagunya sebesar Rp646.358.978.000.

F.4.9. Monitoring Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI)

SP3DRI merupakan surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berfungsi sebagai alat penyampaian data/informasi perpajakan terkait dengan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang tidak atau kurang dibayar oleh importir atau pengguna jasa dan telah dilakukan penagihan pajak sampai dengan surat teguran oleh DJBC. Penyerahan data PDRI tersebut bersamaan dengan terbitnya Surat Paksa di DJBC.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang tata cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai, SP3DRI merupakan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor berupa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dari Kepala Kantor Pabean (KPPBC/KPU BC) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah penanggung (penanggung). Penanggung yang tidak melunasi kewajibannya atas tagihan surat penetapan/surat keputusan/surat tagihan dalam jangka waktu (paling cepat) 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran (60 hari sejak tanggal penetapan atau keputusan) dan tidak sedang mengangsur/menunda pembayaran berdasarkan persetujuan, tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan banding, maka Pejabat Bea dan Cukai (Kepala Kantor Pelayanan) akan menerbitkan surat teguran. Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran tersebut penanggung belum melunasi kewajibannya, maka Kepala Kantor Pabean pada hari kerja berikutnya harus:

1. menerbitkan surat paksa untuk penagihan piutang Bea Masuk, Cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga kepada penanggung;
2. menyampaikan SP3DRI kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah penanggung.

Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-22/BC/2009 diatur mengenai petunjuk pelaksanaan penyampaian SP3DRI yang meliputi:

1. Penegasan bahwa SP3DRI disampaikan pada hari kerja berikutnya setelah dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran, dimana penanggung belum melunasi kewajibannya;
2. Penyampaian SP3DRI disertai dengan:
 - a. Surat Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-25/BC/2009 tanggal 18 Mei 2009; dan
 - b. Risalah Penetapan Pejabat.
3. SP3DRI disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah penanggung, yaitu KPP yang mengawasi sesuai dengan domisili dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Melaporkan hasil tindak lanjut SP3DRI setiap bulannya kepada Direktur Jenderal.

Kantor Pelayanan Pajak yang menerima SP3DRI kemudian melakukan langkah-langkah sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-78/PJ./2008 tanggal 18 Desember 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI). Dalam SE tersebut

antara lain diatur bahwa Kantor Pelayanan Pajak dapat melakukan himbauan, penelitian/pemeriksaan dan menerbitkan SKPKB atas pajak-pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam SP3DRI tersebut. SP3DRI yang ditindak lanjuti dengan SKPKB akan menambah piutang pajak dalam Laporan Perkembangan Piutang dari masing-masing KPP.

Adapun rincian Data SP3DRI Yang Disampaikan DJBC kepada DJP Tahun 2010 s.d 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 147

Rincian Data SP3DRI Yang Disampaikan DJBC kepada DJP Tahun 2010 s.d 31 Desember 2018

Tahun	Diterbitkan DJBC	Tindak Lanjut DJP						Total
		Belum ada tindak lanjut	Permintaan Penjelasan/Keterangan WP	Sudah Dibayar	Telah terbit ketetapan	Tidak dapat diterbitkan	NPWP tdk Valid	
2010	62.557.441.962	1.565.543.663	4.576.520.849	21.959.654.224	7.750.402.714	26.705.320.512		62.557.441.962
2011	325.647.811.823	1.270.123.486	1.097.542.058	203.403.415.360	71.253.159.455	48.623.571.464		325.647.811.823
2012	75.781.936.926	2.283.116.576	3.328.991.169	55.931.484.149	2.620.983.179	11.617.361.853		75.781.936.926
2013	89.545.192.197	1.591.236.820	585.386.654	4.417.837.420	7.366.916.485	75.583.814.818		89.545.192.197
2014	373.189.144.104	4.452.159.356	2.819.919.110	112.375.280.641	214.300.860.103	39.240.924.894		373.189.144.104
2015	89.563.817.591	1.769.643.591	59.123.528.000	203.348.000	3.548.359.000	24.918.939.000		89.563.817.591
2016	81.053.183.484	13.281.957.000	107.811.000	739.756.000	5.507.435.500	61.416.223.984		81.053.183.484
2017	10.167.989.500	9.361.057.000	55.398.000	640.398.500	111.136.000			10.167.989.500
2018	193.400.034.000	193.321.197.000	20.196.000	56.000	17.991.000		40.594.000	193.400.034.000
Total	1.300.906.551.587	228.896.034.492	71.715.292.840	399.671.230.294	312.477.243.436	288.106.156.525	40.594.000	1.300.906.551.587

F.4.10. Kompensasi Atas Perusakan dan Penerimaan Pengembalian Pita Cukai (CK-2 dan CK-3)

Dokumen Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai (CK-2) adalah dokumen tanda bukti perusakan pita cukai yang telah dilekatkan pada barang kena cukai namun atas barang kena cukai tersebut kemudian diekspor, diolah kembali, dimusnahkan, atau tidak jadi diimpor dan masih berada dalam kawasan pabean. Di dalam dokumen CK-2 terdapat informasi mengenai jumlah keping pita cukai yang dikembalikan dan nilai cukai yang setara dengan pita cukai yang dikembalikan tersebut. Berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda, atas nilai cukai yang tercantum dalam dokumen CK-2 tersebut dapat digunakan untuk pemotongan utang cukai dan/atau sebagai kompensasi pemesanan pita cukai berikutnya. Pengembalian cukai atas barang kena cukai yang diekspor, diolah kembali, atau dimusnahkan hanya diberikan pada pengusaha pabrik barang kena cukai. Sedangkan pengembalian cukai atas barang kena cukai yang tidak jadi diimpor hanya diberikan pada importir barang kena cukai. Masa berlaku pemotongan dan/atau kompensasi adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterbitkannya CK-2. Adapun nilai cukai dalam dokumen CK-2 yang diterbitkan oleh DJBC pada tahun anggaran 2018 dan 2017 masing-masing sebesar **Rp956.564.526.188,00** dan **Rp793.827.193.870,00**, atau naik sebesar **21%**.

Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai (CK-3) adalah dokumen tanda bukti penerimaan pengembalian pita cukai yang rusak atau tidak dipakai oleh pengusaha pabrik ataupun importir barang kena cukai. Pita cukai yang rusak adalah pita cukai yang kurang sempurna fisik dan cetakannya dan belum dilekatkan pada barang kena cukai. Pita cukai yang tidak dipakai adalah pita cukai yang belum dilekatkan pada barang kena cukai karena:

1. adanya perubahan harga jual eceran, tarif cukai, dan/atau desain pita cukai baik akibat kebijakan pemerintah maupun atas inisiatif/permintaan pengusaha pabrik atau importir;
2. batas waktu pelekatannya sudah berakhir sesuai ketentuan yang berlaku;
3. pengusaha pabrik tidak lagi memproduksi barang kena cukai untuk pemasaran dalam negeri;
4. pengusaha pabrik tidak lagi memproduksi barang kena cukai sesuai pesanan pita cukainya;
5. importir tidak lagi mengimpor barang kena cukai sesuai pesanan pita cukainya;
6. tidak sesuai dengan pesanan pengusaha pabrik atau Importir; dan
7. NPPBKC pengusaha pabrik atau importir dicabut.

Pita cukai yang dapat dikembalikan adalah pita cukai yang dipesan dalam tahun anggaran berjalan atau satu tahun terakhir sebelum tahun anggaran berjalan. Pengembalian atas pita cukai yang rusak dapat diterima apabila pita cukai masih dalam bentuk lembaran disertai dengan label pengawasan pencetak pita cukai. Sedangkan untuk pita cukai yang tidak dipakai dapat diterima pengembalian pita cukainya apabila pita cukai masih dalam bentuk lembaran sesuai yang dikirim dari pencetak pita cukai. Nilai cukai yang tercantum dalam dokumen CK-3 terlebih dahulu digunakan untuk melunasi hutang cukai dan dalam hal tidak memiliki hutang cukai, dapat diperhitungkan dan/atau dikompensasikan untuk pemesanan pita cukai selanjutnya. Masa berlaku pemotongan dan/atau kompensasi adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterbitkannya CK-3.

Adapun nilai cukai dalam dokumen CK-3 yang diterbitkan oleh DJBC pada tahun anggaran 2018 dan 2017 masing-masing sebesar [Rp319.423.048.050,00](#) dan [Rp1.549.012.038.168,00](#), atau turun sebesar [79%](#), hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain :

1. Pita cukai yang terlewat batas waktu pelekatannya;
2. Terjadi penurunan penjualan BKC akibat lesunya daya beli masyarakat dan peralihan dari rokok ke vape;
3. Realisasi pesanan distributor yang tidak sesuai dengan pesanan awal.

Pada tahun 2018 dan 2017 DJBC telah merealisasikan kompensasi pita cukai atas dokumen CK-2 terhadap pemesanan pita cukai (CK-1) masing-masing sebesar [Rp1.044.314.072.272,00](#) dan [Rp773.851.140.830,00](#), atau naik sebesar [35%](#). Sedangkan kompensasi pita cukai atas dokumen CK-3 terhadap pemesanan pita cukai (CK-1) masing-masing sebesar [Rp670.985.498.250,00](#) dan [Rp1.202.333.811.168,00](#), atau turun sebesar [44%](#).

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 masih terdapat dokumen CK-2 dan CK-3 yang belum digunakan oleh perusahaan untuk dikompensasikan pada pemesanan pita cukai masing-masing sebesar [Rp65.856.642.936,00](#) dan [Rp2.211.5298.600,00](#).

F.4.11. Annual Meeting IMF-WBG 2018

Pada Bulan Oktober 2018, telah dilaksanakan penyelenggaraan *Annual Meeting IMF-WB 2018* di Provinsi Bali sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggara Rangkaian Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia Tahun 2018 (*Annual Meeting International Monetary Fund-World Bank 2018*). Berdasarkan Keppres Nomor 11 Tahun 2017 tersebut, ditetapkan antara lain bahwa Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian, Lembaga Negara, Instansi Pemerintah Pusat, dan Instansi Daerah yang masuk ke dalam keanggotaan Panitia Nasional dapat membentuk tim kerja yang bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Panitia Nasional. Adapun pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan rangkaian AM IMF-WB 2018 dibebankan pada APBN Tahun 2017 dan 2018, APBD Tahun 2017 dan 2018, Anggaran BI Tahun 2017 dan 2018, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Menindaklanjuti Keppres Nomor 11 tahun 2017 tersebut, Kementerian Keuangan membentuk KMK Nomor KMK-770/KMK.01/2017 tentang Pembentukan Tim Kerja Persiapan Penyelenggaraan Rangkaian Pertemuan Tahunan *International Monetary Fund – World Bank* Tahun 2018, dan telah diubah terakhir dengan KMK Nomor KMK-312/KMK.01/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Kerja Persiapan Penyelenggaraan Rangkaian Pertemuan Tahunan *International Monetary Fund – World Bank* Tahun 2018 di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Tim Kerja sebagaimana KMK-770/KMK.01/2017 mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan membantu bidang-bidang dalam Panitia Nasional Penyelenggaraan Rangkaian Pertemuan Tahunan *International Monetary Fund – World Bank* Tahun 2018;
2. Membantu Sekretariat Panitia Nasional Penyelenggaraan Rangkaian Pertemuan Tahunan *International Monetary Fund – World Bank* Tahun 2018;
3. Mengadakan persiapan dan pelaksanaan program utama bermitra dengan *Meetings Team Secretariat* sesuai dengan panduan dalam *manual requirement*; dan
4. Melakukan pengawasan dan monitoring Penyelenggaraan Rangkaian Pertemuan Tahunan *International Monetary Fund – World Bank* Tahun 2018.

Penyelenggaraan Rangkaian Pertemuan Tahunan *International Monetary Fund – World Bank* Tahun 2018 memiliki manfaat jangka pendek berupa kehadiran ribuan peserta pada saat *low season* di bulan Oktober, diharapkan akan dapat menggerakkan roda perekonomian Bali terutama di sektor *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE), pariwisata, sektor jasa, industri kecil dan sektor pendukung lainnya, dan manfaat jangka panjang dalam bentuk perhatian dunia dan kehadiran para pelaku utama sektor keuangan dunia ke Indonesia terkait hal-hal:

1. *Leadership* berupa Kepemimpinan Indonesia untuk pembahasan isu-isu global terkait pembangunan infrastruktur, stabilitas sistem keuangan, penanganan *inequality*, pembangunan sumber daya manusia dan keuangan inklusif;

2. Promosi Pariwisata dan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) berupa Promosi dan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke destinasi utama Indonesia, promosi *event venues* untuk MICE dan momentum untuk perbaikan infrastruktur pariwisata;
3. Investasi dan Perdagangan berupa Pengenalan produk unggulan Indonesia di pasar global dan Pengenalan peluang investasi dan usaha di Indonesia; dan
4. *Knowledge Transfer* berupa bertambahnya pengalaman dan membangun *networking* dengan komunitas internasional dan pembelajaran mengenai penyelenggaraan *International Events*.

Realisasi anggaran Penyelenggaraan Rangkaian Pertemuan Tahunan International Monetary Fund – World Bank Tahun 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, dapat dilihat lebih lanjut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 148
Realisasi Penyelenggaraan Rangkaian Pertemuan Tahunan IMF – World Bank Tahun 2018

TA	Uraian Kegiatan	Pagu	Nilai Kontrak	Realisasi	Keterangan
2017	Professional Congress Organizer	Rp31.696.499.050,00	Rp4.267.973.543,00	Rp4.214.710.443,00	Nilai Kontrak ini mengalami perubahan setelah Adendum I. Nilai Kontrak semula sebesar Rp4.453.452.300,00
	Kesekretariatan (SM 2017, AM 2017, VTI, Kesekretariatan)	Rp13.719.391.000,00		Rp6.231.300.168,00	Realisasi per 31 Des 2017
Jumlah		Rp45.415.890.000,00	Rp4.267.973.543,00	Rp10.446.010.611,00	Realisasi 23%
2018	Professional Congress Organizer	Rp602.233.492.550,00	Rp500.986.938.100,00	Rp 383.429.950.450,00	Berdasarkan ADD-02/PPK3/SJ.6/2018
	Kesekretariatan (SM 2018, Biaya Rapat, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Kegiatan Pendukung AM 2018)	Rp147.850.082.000,00	n/a	Rp 24.423.199.513,00	Data realisasi per tgl 31 Desember 2018
	Dukungan Infrastruktur TIK (Sewa Jaringan)	Rp 43.556.081.000,00	Rp 40.854.000.000,00	Rp. 39.851.509.674,00	
	Dukungan Infrastruktur TIK (Pengadaan Perangkat)	Rp 16.523.210.000,00	Rp 14.574.964.736,00	Rp. 14.574.964.736,00	
Jumlah		Rp810.162.865.550,00	Rp556.415.902.836,00	Rp462.279.624.373,00	Realisasi 57%

Adapun sumber pendanaannya berasal dari DIPA Kantor Pusat Sekretariat Jenderal dan DIPA Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. Realisasi yang lebih kecil dari pagu dikarenakan efisiensi terutama atas beberapa komponen yaitu biaya jasa *Professional Congress Organizer*, belanja atas dukungan pelaksanaan rapat Tahunan IMF TA 2018, serta kegiatan perjalanan dinas kesekretariatan.

Atas kegiatan Penyelenggaraan Rangkaian Pertemuan Tahunan *International Monetary Fund – World Bank* Tahun 2018, terdapat PNBP yang diterima melalui rekening penerimaan dan telah disetorkan ke Kas Negara seluruhnya melalui Bendahara Penerimaan pada satker Sekretariat Jenderal dengan akun Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar **Rp14.640.747.077,00**.

F.4.12. Pencatatan Aset Lain-Lain BUN di BLU

Aset Lain-Lain BUN per 31 Desember 2018 sebagian besar merupakan tanah infrastruktur PSN yang dicatat oleh BLU LMAN dengan saldo sebesar **Rp40.749.988.341.572,00**. Kebijakan penyajian aset dimaksud sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.06/2019 tentang Perubahan PMK Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh LMAN. Adapun tanah infrastruktur PSN tersebut terbagi menjadi empat bidang, yaitu: jalan tol, bendungan, perkeretaapian, dan pelabuhan.

Berdasarkan kesepakatan pemerintah dan BPK pencatatan aset lain-lain yang semula dicatat di LMAN yaitu terdiri dari tanah bidang bendungan, tanah bidang perkertaapian, pelabuhan dan jalan tol tidak dicatat lagi oleh LMAN, tetapi pencatatannya dilakukan oleh kementerian/lembaga yang mempunyai tusi dimaksud yaitu Kementerian PUPERA dan Kementerian Perhubungan.

F.4.13. Pengungkapan atas pemeriksaan LK BLU oleh KAP

Pada Kementerian Keuangan terdapat 5 (lima) satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum bahwa penyusunan LK BLU selaku entitas pelaporan dilakukan dengan menggunakan SAP berbasis akrual, sehingga sejak PMK ini ditetapkan penyusunan dan penyampaian LK BLU mulai TA 2016 hanya mewajibkan penyusunan dengan standar SAP.

Berkaitan dengan hal diatas, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, maka reviu laporan keuangan dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAI dan LK BLU telah disajikan sesuai dengan SAP.

Namun demikian, dalam rangka kepentingan/kebutuhan informasi manajerial maka BLU dapat pula menyusun LK berbasis SAK. Adapun daftar BLU yang menyusun LK berbasis SAK dan telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) serta opini yang diberikan adalah sebagai berikut:

Tabel 149
Daftar BLU yang Menyusun LK Berbasis SAK dan Telah Diperiksa oleh KAP

Nama BLU	Standar Akuntansi	Nama KAP	Opini
Politeknik Keuangan Negara STAN	-	-	-
Pusat Investasi Pemerintah	-	-	-
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Standar Akuntansi Keuangan	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (<i>PricewaterhouseCoopers</i>)	Wajar Tanpa Pengecualian
Lembaga Manajemen Aset Negara	-	-	-
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	-	-	-



*BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
LANTAI 10 GEDUNG DJUANDA 1
JALAN DR WAHIDIN NO.1 JAKARTA PUSAT*